



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Barat



AGUSTUS 2026



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Laporan Perekonomian
PROVINSI SUMATERA BARAT
Agustus 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Sumatera Barat
Divisi Perumusan dan Implementasi Kebijakan
Ekonomi dan Keuangan Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 22 Padang
Telp: 0751-31700 Fax: 0751-27313



• **Penerbit :**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat
Divisi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah
Jl. Jenderal Sudirman No. 22

P A D A N G

Telp : 0751-31700

Fax : 0751-27313

E-Mail : Rif'at Pasha

Ghifari Fathul Khoir

Larassayu Arvaneira Evanthe

Ilham Suwardi

(rpasha@bi.go.id)

(ghifari_fathul@bi.go.id)

(larassayu_a@bi.go.id)

(ilham_s@bi.go.id)



Kata Pengantar

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya kami kembali dapat menghadirkan publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat periode Agustus 2026. Laporan publikasi ini merupakan hasil asesmen perkembangan ekonomi terkini dari Sumatera Barat yang meliputi perkembangan ekonomi, inflasi, keuangan daerah, perbankan, sistem pembayaran, kesejahteraan masyarakat, kondisi ketenagakerjaan, serta ulasan atas isu terkini terkait ekonomi dan keuangan Sumatera Barat.

Kami mengharapkan publikasi ini dapat menjadi rujukan informasi dan bahan masukan tentang perkembangan ekonomi dan keuangan Sumatera Barat bagi para *stakeholders*, pemerintah daerah, industri keuangan, akademisi, pelaku usaha, dan para pihak terkait. Selain dalam bentuk buku (*hardcopy*), kami juga menerbitkan dalam bentuk *softcopy* yang dapat diakses melalui laman kami di www.bi.go.id.

Bank Indonesia menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penyediaan data dan informasi hingga terbitnya publikasi ini antara lain Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Sumatera Barat, kalangan pelaku usaha, perbankan, serta pihak-pihak lainnya. Semoga dukungan dan hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk penyempurnaan Laporan Perekonomian ini. Akhirnya, semoga publikasi ini memberikan manfaat bagi para pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi langkah kita dalam berkarya untuk negeri.

Padang, Agustus 2026
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT

(ttd)

Mohamad Abdul Majid Ikram
Kepala Perwakilan



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
TABEL INDIKATOR EKONOMI	xv

Bab 1 Perkembangan Ekonomi Makro Daerah 01

1.1. PERKEMBANGAN UMUM.....	03
1.2. DINAMIKA SISI PENGELUARAN	05
1.2.1. KONSUMSI RUMAH TANGGA.....	05
1.2.2. KONSUMSI PEMERINTAH.....	07
1.2.3. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	08
1.2.4. EKSPOR TOTAL	10
1.2.5. IMPOR TOTAL.....	12
1.3. DINAMIKA SISI LAPANGAN USAHA UTAMA PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT	14
1.3.1. LAPANGAN USAHA PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN.....	14
1.3.2. LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN SERTA REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.....	16
1.3.3. LAPANGAN USAHA TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	17
1.3.4. LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN	18

Bab 2 Perkembangan Inflasi Daerah 23

2.1. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2026	26
2.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA.....	27
2.3. INFLASI SPASIAL.....	29
2.4. <i>TRACKING</i> INFLASI TRIWULAN II 2026	30
2.5. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	32

Bab 3 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM 37

3.1. KONDISI UMUM.....	40
3.2. ASESMEN KINERJA PERBANKAN SUMATERA BARAT	40
3.2.1. PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA (DPK)	40
3.2.2. PENYALURAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN	41
3.3. ASESMEN SPASIAL	42
3.3.1. PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA	42
3.3.2. PENYALURAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN	42
3.4. ASESMEN SEKTOR KORPORASI.....	44
3.4.1. SUMBER KERENTANAN	44
3.4.2. EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR KORPORASI	45
3.5. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA.....	47
3.5.1. KONDISI RUMAH TANGGA.....	47
3.5.2. EKSPOSUR PERBANKAN PADA SEKTOR RUMAH TANGGA.....	48
3.6. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN KEPADA UMKM.....	49
BOKS 1: SUMATERA BARAT CREATIVE ECONOMY FESTIVAL 2026	52

Bab 4

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah 55

4.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI.....	57
4.1.1. TRANSAKSI MELALUI BANK INDONESIA - <i>REAL TIME GROSS SETTLEMENT</i> (BI-RTGS).....	57
4.1.2. TRANSAKSI MELALUI SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA	58
4.1.3. TRANSAKSI MELALUI BANK INDONESIA - <i>FAST PAYMENT</i> (BI - FAST).....	58
4.1.4. TRANSAKSI ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU (APMK) DAN UANG ELEKTRONIK.....	59
4.1.5. TRANSAKSI MENGGUNAKAN QR CODE <i>INDONESIAN STANDARD</i> (QRIS).....	60
4.2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI	61
BOKS 2: QRIS JELAJAH KULINER INDONESIA 2026: MENDORONG AKSEPTASI DIGITAL MELALUI KEKUATAN KULINER SUMATERA BARAT	63
BOKS 3: UANG PUN BERMANFAAT DEMI BIRUNYA LANGITKU	65

Bab 5

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah 69

5.1 KETENAGAKERJAAN DAERAH.....	72
5.2 KESEJAHTERAAN DAERAH	73
5.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN RASIO GINI	75
5.4 PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI SUMATERA BARAT	77

Bab 6

Prospek Perekonomian Daerah 81

6.1. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2026.....	83
6.1.1. PROSPEK EKONOMI GLOBAL.....	83
6.1.2. PROSPEK EKONOMI NASIONAL	83
6.1.3. PROSPEK EKONOMI SUMATERA BARAT	83
6.2. PRAKIRAAN INFLASI TAHUN 2026	87



Daftar Tabel

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Lapangan Usaha (% yoy).....	4
Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Pengeluaran (% yoy)	5
Tabel 2.1. Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Sumatera Barat Triwulan II 2026 (%yoy).....	27
Tabel 2.2. Realisasi Inflasi Sumatera Barat dan Kab/Kota Sampel Inflasi pada Juli 2026.....	31
Tabel 4.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai Sumatera Barat.....	57
Tabel 5.1. Indikator Ketenagakerjaan Daerah (ribu orang)	72
Tabel 5.2. Perkembangan NTP Provinsi di Sumatera.....	77
Tabel 6.1. Pertumbuhan Ekonomi Global.....	83



Daftar Grafik

Grafik 1.1	Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan	3
Grafik 1.2	Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Seluruh Provinsi di Wilayah Sumatera	5
Grafik 1.3	Pangsa PDRB triwulan II 2026 Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku	5
Grafik 1.4	Perkembangan NTP Sumatera Barat	6
Grafik 1.5	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	6
Grafik 1.6	Survei Konsumen Bank Indonesia	6
Grafik 1.7	Perkembangan Kredit Rumah Tangga Sumatera Barat	6
Grafik 1.8	Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga Sumatera Barat	7
Grafik 1.9	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah pada Triwulan II 2025 dan 2026	7
Grafik 1.10	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Triwulan II 2025 dan 2026	7
Grafik 1.11	Realisasi Belanja APBD pada Triwulan II 2025 dan 2026	7
Grafik 1.12	%Realisasi Belanja Pemerintah Daerah	8
Grafik 1.13	Belanja K/L di Daerah	8
Grafik 1.14	Realisasi Nilai dan Proyek PMA	9
Grafik 1.15	Realisasi Nilai dan Proyek PMDN	9
Grafik 1.16	Realisasi Belanja Modal Pemerintah	9
Grafik 1.17	Perkembangan Kredit Investasi	9
Grafik 1.18	Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat	10
Grafik 1.19	Perkembangan Volume Ekspor Sumatera Barat	10
Grafik 1.20	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Utama	10
Grafik 1.21	PMI Negara Mitra Dagang	10
Grafik 1.22	Komoditas Utama Ekspor Sumatera Barat	11
Grafik 1.23	Perkembangan Ekspor CPO	11
Grafik 1.24	Perkembangan Harga CPO	11
Grafik 1.25	Perkembangan Ekspor Karet	11
Grafik 1.26	Perkembangan Harga Karet	12
Grafik 1.27	Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat	12
Grafik 1.28	Perkembangan Nilai Impor Sumatera Barat	12
Grafik 1.29	Perkembangan Nilai Impor Migas	12
Grafik 1.30	Perkembangan Harga Minyak Dunia	13
Grafik 1.31	Perkembangan Nilai Impor Non Migas	13
Grafik 1.32	Perkembangan Volume Impor Non Migas	13
Grafik 1.33	Perkembangan Impor Menurut Golongan Penggunaan	13
Grafik 1.34	Komoditas Impor Non Migas Utama	13
Grafik 1.35	Curah Hujan Sumatera Barat Triwulan II 2026	14
Grafik 1.36	Luas Panen Jagung Pipilan Sumatera Barat	14
Grafik 1.37	Produksi Jagung Pipilan Sumatera Barat	15
Grafik 1.38	Luas Panen Padi Sumatera Barat	15
Grafik 1.39	Produksi Padi Sumatera Barat	15
Grafik 1.40	Perkembangan Harga TBS Sumatera Barat	15
Grafik 1.41	Perkembangan Kredit Pertanian Sumatera Barat	15
Grafik 1.42	Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama	16

Grafik 1.43	Perkembangan Transaksi Jual Beli Digital.....	16
Grafik 1.44	Perkembangan Konsumsi Listrik Bisnis.....	16
Grafik 1.45	Perkembangan Kredit Perdagangan	17
Grafik 1.46	Penjualan Kendaraan Bermotor Baru Sumatera Barat.....	17
Grafik 1.47	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Sumatera Barat.....	17
Grafik 1.48	Perkembangan Penumpang Bandara Internasional Minangkabau.....	17
Grafik 1.49	Perkembangan Kargo Bandara Internasional Minangkabau.....	18
Grafik 1.50	Perkembangan Kredit Transportasi	18
Grafik 1.51	Konsumsi Listrik Sektor Industri.....	18
Grafik 1.52	Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan.....	19
Grafik 1.53	Indeks Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan.....	19
Grafik 1.54	Konsumsi Semen Sumatera Barat.....	19
Grafik 1.55	Perkembangan Kredit Industri Pengolahan.....	19
Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan (%yoy) Sumatera Barat dan Nasional.....	26
Grafik 2.2	Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (%ytd) Sumatera Barat	26
Grafik 2.3	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (% yoy).....	28
Grafik 2.4	Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran (% yoy).....	29
Grafik 2.5	Perkembangan Inflasi Spasial Sumatera Barat (% yoy).....	30
Grafik 2.6	Historis Inflasi Tahunan Sumatera Barat	31
Grafik 2.7	Historis Inflasi Bulanan Sumatera Barat.....	31
Grafik 3.1	Dana Pihak Ketiga (DPK)	40
Grafik 3.2	Komposisi DPK.....	40
Grafik 3.3	Pertumbuhan Kredit	41
Grafik 3.4	Komposisi Kredit.....	41
Grafik 3.5	Rasio NPL Berdasarkan Penggunaan	42
Grafik 3.6	Nilai dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Menurut Wilayah.....	42
Grafik 3.7	Nilai dan Pertumbuhan Kredit Menurut Wilayah	43
Grafik 3.8	Pangsa Kredit Korporasi dan Rumah Tangga berdasarkan Wilayah.....	43
Grafik 3.9	Pangsa Kredit UMKM dan Non UMKM berdasarkan Wilayah.....	44
Grafik 3.10	<i>Likert Scale</i> Penjualan	45
Grafik 3.11	<i>Likert Scale</i> Biaya	45
Grafik 3.12	Kredit Korporasi.....	45
Grafik 3.13	Komposisi Kredit Korporasi	45
Grafik 3.14	DPK Korporasi	46
Grafik 3.15	Komposisi DPK Korporasi	46
Grafik 3.16	NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha.....	46
Grafik 3.17	Indeks Keyakinan Konsumen.....	47
Grafik 3.18	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	47
Grafik 3.19	Indeks Ekspetasi Konsumen	47
Grafik 3.20	DPK Rumah Tangga.....	48
Grafik 3.21	Komposisi DPK RT	48
Grafik 3.22	Kredit Sektor Rumah Tangga	48
Grafik 3.23	Komposisi Kredit RT	48
Grafik 3.24	NPL Rumah Tangga.....	49
Grafik 3.25	Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit.....	49

Grafik 3.26	Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha.....	50
Grafik 3.27	Komposisi Kredit Berdasarkan Skala Usaha.....	50
Grafik 3.28	Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha.....	50
Grafik 3.29	Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha.....	50
Grafik 3.30	NPL Berdasarkan Skala Usaha.....	51
Grafik 3.31	NPL Berdasarkan Lapangan Usaha	51
Grafik 4.1	Perkembangan Nominal BI-RTGS di Sumatera Barat.....	57
Grafik 4.2	Perkembangan Volume BI-RTGS di Sumatera Barat.....	57
Grafik 4.3	Perkembangan Nominal SKNBI di Sumatera Barat.....	58
Grafik 4.4	Perkembangan Volume SKNBI di Sumatera Barat	58
Grafik 4.5	Perkembangan Nominal BI FAST di Sumatera Barat.....	58
Grafik 4.6	Perkembangan Volume BI FAST di Sumatera Barat	58
Grafik 4.7	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit.....	59
Grafik 4.8	Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit.....	59
Grafik 4.9	Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Sumatera Barat	59
Grafik 4.10	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Sumatera Barat.....	60
Grafik 4.11	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Sumatera Barat	60
Grafik 4.12	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Sumatera Barat.....	60
Grafik 4.13	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Sumatera Barat	61
Grafik 4.14	Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Sumatera Barat.....	61
Grafik 4.15	Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk (<i>Inflow</i>) dan Keluar (<i>Outflow</i>) Sumatera Barat.....	62
Grafik 5.1	Pangsa Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	73
Grafik 5.2	Pangsa Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	73
Grafik 5.3	Garis Kemiskinan di Sumatera Barat	73
Grafik 5.4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat.....	74
Grafik 5.5	Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/kota.....	74
Grafik 5.6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	75
Grafik 5.7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	75
Grafik 5.8	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Sumatera Tahun 2025	76
Grafik 5.9	IPM Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025.....	76
Grafik 5.10	Pengeluaran per kapita Sumatera Barat per tahun (Rp ribu)	76
Grafik 5.11	Gini Ratio Provinsi di Sumatera September 2025.....	76
Grafik 5.12	Perkembangan Indeks Harga Diterima (It) dengan Indeks Harga Dibayar (Ib)	78
Grafik 5.13	NTP Sumbar Menurut Subsektor	78
Grafik 6.1	Proyeksi Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	87
Grafik 6.2	Proyeksi Harga Gas Alam Dunia (USD/mmbtu).....	88
Grafik 6.3	Proyeksi Harga Minyak Mentah Dunia (USD/barrel)	88
Grafik 6.4	Prakiraan Kondisi Ekonomi 6 Bulan ke Depan	88
Grafik 6.5	Prakiraan Tingkat Upah dan Harga Jual 1 Tahun ke Depan	88
Grafik 6.6	Proyeksi Harga Emas Dunia (USD/oz-t).....	89



Ringkasan Eksekutif

Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Agustus 2026

*Perekonomian Sumatera
Barat termoderasi.*

Ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2026 tumbuh 4,54% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 5,01%.

Normalisasi aktivitas ekonomi pasca pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional (Ramadan dan Idul Fitri) menjadi pendorong utama perlambatan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan belanja pemerintah dalam rangka penyelesaian infrastruktur pemulihan bencana; pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN); pembangunan fisik program prioritas nasional; belanja dalam rangka pembayaran gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri; penyaluran bantuan sosial termasuk untuk masyarakat terdampak bencana; serta masih tingginya permintaan karet, CPO, dan produk pertanian dari luar negeri maupun wilayah lain, menahan perlambatan ekonomi.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan didorong oleh belum cukup kuatnya permintaan konsumsi masyarakat dipengaruhi siklus konsumsi pasca HBKN, belum meratanya pertumbuhan ekonomi secara sektoral, peningkatan biaya energi dan *input*, serta penurunan persepsi ekonomi. Meski demikian, masih tingginya belanja pemerintah sehubungan dengan penyaluran gaji ke-13 dan belanja sosial lainnya, serta berlanjutnya belanja modal dalam rangka proses rehabilitasi bencana dan pembangunan infrastruktur; Investasi swasta yang tetap tumbuh; serta aktivitas ekspor yang masih cukup kuat menjaga pertumbuhan ekonomi pada triwulan II.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat triwulan II 2026 relatif belum cukup merata. Pertumbuhan triwulan II 2026 ditopang oleh membaiknya kinerja Lapangan Usaha (LU) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU konstruksi; dan LU administrasi pemerintahan di tengah perlambatan sektor utama seperti LU Perdagangan; LU Industri Pengolahan; serta LU Transportasi dan Jasa Perdagangan.

Tekanan inflasi meningkat namun diperkirakan menurun seiring dengan terjaganya inflasi pangan.

Dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga energi dan biaya *input* mendorong peningkatan inflasi Sumatera Barat triwulan II 2026. Lebih lanjut, penurunan produksi beberapa komoditas pangan akibat serangan hama mengakselerasi inflasi Sumatera Barat triwulan II 2026.

Secara bulanan, peningkatan tekanan inflasi terjadi sejak April 2026 dan mencapai puncaknya pada Mei 2026 seiring meningkatnya harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di berbagai sentra hortikultura. Sejalan dengan itu, tekanan inflasi juga didorong oleh inflasi kelompok transportasi seiring kenaikan harga energi global yang mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi serta tarif angkutan udara.

Meski mengalami peningkatan tekanan inflasi, secara akumulatif, realisasi inflasi sampai dengan Juni masih relatif rendah. Inflasi kumulatif Sumatera Barat hingga triwulan II 2026 tercatat 0,98% (ytd), terendah dalam tiga tahun terakhir. Rendahnya inflasi kumulatif tersebut ditopang oleh terkendalinya inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, terutama didorong membaiknya pasokan dan produktivitas komoditas hortikultura dampak berbagai program pengendalian inflasi pangan di daerah.

Dengan realisasi inflasi kumulatif yang masih sangat rendah, realisasi inflasi Sumatera Barat hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai sasaran target inflasi nasional 2,5% + 1%. Rendahnya inflasi terjadi tidak terlepas dari kuatnya sinergitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pelaksanaan program-program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Stabilitas sektor keuangan terjaga. Intermediasi meningkat namun belum optimal.

Di tengah terbatasnya permintaan kredit/pembiayaan, stabilitas sektor keuangan di Sumatera Barat tetap terjaga. Intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit/pembiayaan meningkat meski belum optimal didukung kapasitas pembiayaan yang meningkat pula serta kualitas kredit yang terjaga.

Kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit/pembiayaan masih ditopang oleh penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor korporasi terutama pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sementara pertumbuhan kredit/pembiayaan kepada sektor Rumah Tangga relatif stagnan imbas belum cukup kuatnya konsumsi masyarakat. Sebaliknya penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih melanjutkan tren kontraksi seiring dengan permintaan kredit yang terbatas, alokasi subsidi bunga KUR yang menurun, serta meningkatnya risiko kredit sektor UMKM.

Aktivitas Sistem pembayaran meningkat di tengah moderasi pertumbuhan ekonomi, baik pada segmen retail maupun wholesale.

Velositas sistem pembayaran tetap kuat. Meski demikian, akselerasi dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran belum cukup kuat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Aktivitas transaksi retail melalui uang elektronik maupun transaksi tunai cenderung melambat di tengah penguatan transaksi *wholesale* dan akselerasi transaksi digital.

Peningkatan transaksi *wholesale* terjadi sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), rekonstruksi infrastruktur bencana, dan peningkatan belanja pemerintah pada triwulan II. Sebaliknya perlambatan konsumsi dan normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan transaksi retail baik tunai maupun non tunai.

Perlambatan ekonomi mendorong penurunan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran. Meski demikian tingkat kemiskinan relatif menurun seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertanian.

Perlambatan pada sektor-sektor utama mendorong kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan mengalami penurunan meski belum berdampak pada penurunan kesejahteraan. Penyerapan tenaga kerja menurun terutama pada sektor perdagangan; transportasi dan pergudangan; serta industri pengolahan meski tertahan oleh penyerapan yang lebih baik pada sektor pertanian, akomodasi makanan dan minuman, serta konstruksi. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan.

Meski demikian, perkembangan ketenagakerjaan di atas belum berdampak pada peningkatan kemiskinan seiring terutama ditopang oleh membaiknya kesejahteraan petani khususnya wilayah pedesaan imbas membaiknya kinerja sektor pertanian.

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,53% – 5,33% (yoy) menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya seiring realisasi pertumbuhan triwulan II yang berada di bawah proyeksi. Perbaikan pertumbuhan terutama ditopang oleh menguatnya permintaan domestik, didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah untuk pelaksanaan program prioritas dan pemulihan pascabencana, serta berlanjutnya investasi infrastruktur pemerintah dan swasta. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari kembali menguatnya perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi, disertai perbaikan pertanian serta transportasi dan pergudangan.

Meski demikian, perlu diwaspadai risiko-risiko yang dapat menahan pertumbuhan khususnya berkaitan dengan keyakinan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap prospek ekonomi ke depan, hambatan realisasi anggaran dan proyek yang lebih lambat, kenaikan harga serta ketersediaan pasokan BBM bersubsidi, ketidakpastian geopolitik, serta faktor cuaca dan kebencanaan. Di sisi lain, percepatan pemulihan pascabencana, peningkatan permintaan komoditas unggulan, dan pemulihan lahan pertanian yang lebih cepat akan mendorong pertumbuhan lebih tinggi dari perkiraan.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan kembali pada sasaran.

Laju inflasi Sumatera Barat tahun 2026 diperkirakan menurun dan kembali stabil dalam rentang sasaran 2,5±1% (yoy), seiring sinergi berbagai pihak dalam percepatan pemulihan pascabencana serta berlanjutnya peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan. Secara fundamental, tekanan inflasi akan berasal dari sisi *supply* seiring dengan peningkatan biaya *input*, disrupsi rantai pasok dan biaya logistik, serta transmisi kenaikan inflasi global terhadap komoditas domestik. Meski demikian tekanan inflasi diperkirakan terbatas sejalan dengan terjaganya inflasi pangan dampak dari peningkatan produktivitas, perbaikan sarana prasarana pertanian,

serta terjaganya jalur distribusi selaras dengan progres penyelesaian infrastruktur pascabencana. Mengacu pada realisasi inflasi kumulatif hingga Juni yang masih rendah didukung berlanjutnya deflasi kelompok pangan, inflasi hingga akhir tahun diperkirakan dapat terjaga sesuai dengan sasaran $2,5\% \pm 1\%$. Meski demikian perlu diwaspadai beberapa risiko utama yaitu peningkatan eskalasi situasi global yang berdampak pada kenaikan harga energi, berlanjutnya depresiasi rupiah yang ditransmisikan secara langsung maupun melalui kenaikan harga *input* dan logistik, serta faktor cuaca termasuk kondisi Elnino yang berpotensi mendorong peningkatan permintaan dari wilayah luar Sumbar.

Untuk memastikan inflasi 2026 tetap berada dalam sasaran, TPID Sumatera Barat berkomitmen memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).



Tabel Indikator Ekonomi

A. PDRB

a. PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha (Sektoral) dalam triliun rupiah

No	Lapangan Usaha	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,40	10,46	10,57	11,04	42,47	11,06	10,88	11,10	11,19	44,23	11,41	11,47
2	Pertambangan dan Penggalian	1,86	1,86	1,95	1,99	7,66	1,92	1,96	1,91	1,94	7,73	2,06	2,09
3	Industri Pengolahan	4,39	4,43	4,57	4,50	17,89	4,65	4,58	4,98	4,65	18,86	4,88	4,78
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05
5	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05
6	Konstruksi	4,40	4,49	4,68	4,82	18,38	4,38	4,49	4,54	4,72	18,13	4,62	4,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,13	8,25	8,45	8,57	33,40	8,49	8,54	8,85	8,75	34,64	9,01	8,96
8	Transportasi dan Pergudangan	5,18	5,41	5,33	5,33	21,25	5,38	5,59	5,15	5,12	21,25	5,59	5,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,58	0,57	2,31	0,59	0,59	0,60	0,61	2,39	0,70	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	4,45	4,53	4,53	4,55	18,05	4,64	4,92	4,82	4,62	19,00	4,79	5,01
11	Jasa Keuangan	1,49	1,50	1,52	1,47	5,98	1,54	1,57	1,62	1,70	6,43	1,66	1,58
12	Real Estate	1,01	1,01	1,05	1,06	4,13	1,06	1,09	1,12	1,11	4,37	1,11	1,13
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,23	0,90	0,23	0,23	0,24	0,24	0,94	0,24	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,81	3,05	2,57	2,78	11,20	2,96	3,10	2,45	2,91	11,42	3,15	3,38
15	Jasa Pendidikan	1,99	2,03	2,03	2,10	8,14	2,09	2,12	2,18	2,10	8,50	2,20	2,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,80	0,86	0,91	3,39	0,87	0,86	0,92	1,02	3,67	0,92	0,92
17	Jasa lainnya	0,91	1,02	0,97	0,97	3,87	0,95	1,10	1,06	1,08	4,20	1,04	1,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		48,72	49,75	49,97	50,99	199,42	50,93	51,71	51,65	51,85	206,14	53,48	54,06

Sumber: BPS, diolah

b. PDRB ADHK Berdasarkan Pengeluaran dalam triliun rupiah

No	Uraian	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23,99	24,70	24,36	23,90	96,95	24,97	24,93	24,76	23,89	98,55	25,74	25,56
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,60	0,55	0,51	0,56	2,22	0,59	0,59	0,54	0,57	2,29	0,60	0,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	4,46	4,22	5,37	17,46	3,54	4,30	4,12	5,13	17,09	4,08	4,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,30	13,88	14,42	15,70	57,30	13,27	13,85	14,30	14,83	56,25	14,25	14,83
5	Perubahan Inventori	0,46	(0,04)	(0,27)	(0,34)	-0,19	0,53	(0,03)	(0,31)	(0,41)	-0,21	0,64	-0,02
6	Ekspor Luar Negeri	31,18	28,84	31,92	30,53	122,46	29,98	33,19	34,21	35,56	132,94	35,18	40,49
7	Impor Luar Negeri	24,21	22,63	25,19	24,74	96,77	21,95	25,12	25,97	27,73	100,76	27,01	32,13
8	Net Ekspor Antar Daerah	6,97	6,21	6,72	5,80	25,69	8,04	8,07	8,24	7,83	32,18	8,17	8,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		104,11	101,22	107,08	106,25	418,66	102,86	110,02	111,83	115,14	439,84	115,67	126,68

Sumber: BPS, diolah

B. INFLASI

a. Inflasi Spasial Tw-II 2026 (%yoy)

Inflasi (%yoy)	2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Kota Padang	5,94	3,03	1,93	2,55	3,39	3,45	1,28	1,00	0,40	0,79	3,52	4,66	3,30	4,20
Kota Bukittinggi	6,08	2,34	2,10	1,88	3,44	3,92	1,70	1,68	0,50	0,60	4,40	4,99	4,32	4,52
Kabupaten Pasaman Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,71	1,59	0,37	0,21	-0,34	6,38	7,09	2,73	5,89
Kabupaten Dharmasraya	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,88	2,85	0,49	-0,39	-0,37	4,61	4,77	4,28	5,92
Sumatera Barat	5,97	2,95	1,94	2,47	3,93	4,04	1,52	0,89	0,30	0,45	4,22	5,15	3,37	4,70

Sumber: BPS, diolah

b. Inflasi Kelompok Tw-II 2026 (%yoy)

Kota	Kelompok (%yoy)											
	Umum	Makanan, Minuman Dan Tembakau	Pakaian Dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan Dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya
Kota Padang	4,20	6,91	1,02	1,12	4,86	0,71	4,71	2,43	0,34	2,09	3,93	10,47
Kota Bukittinggi	4,52	6,12	0,83	3,00	4,11	1,29	3,98	2,15	1,27	3,18	3,26	13,11
Kab. Pasaman Barat	5,89	9,83	2,44	0,85	4,49	0,67	4,15	1,43	2,43	2,58	2,08	9,94
Kab. Dharmasraya	5,92	8,49	4,82	1,42	5,33	0,85	3,13	2,32	3,14	1,15	6,10	12,26
Sumatera Barat	4,70	7,76	1,58	1,25	4,80	0,77	4,46	2,25	1,04	2,17	3,72	10,73

Sumber: BPS, diolah

C. PERBANKAN

a. Indikator Umum

Indikator	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Aset (Rp triliun)	79,26	80,90	80,99	81,33	79,72	81,84	83,06	85,13	84,58	86,58	87,36	88,00	87,65	88,12	88,09	89,40	91,10	92,78
Pertumbuhan (%yoy)	12,86	8,30	7,62	6,83	0,58	1,16	2,56	4,67	6,10	5,80	5,17	3,37	3,63	1,78	0,84	1,59	3,52	5,85
DPK (Rp triliun)	50,10	51,84	51,55	51,63	49,16	50,49	50,69	51,01	51,64	53,46	53,12	53,24	54,79	55,21	55,49	55,91	59,87	62,39
Pertumbuhan (%yoy)	11,76	7,27	7,36	5,71	-1,88	-2,61	-1,66	-1,20	5,04	5,88	4,79	4,37	6,10	3,28	4,47	5,02	12,46	13,87
Kredit/Pembiayaan (Rp triliun)	63,62	65,13	66,60	67,88	69,64	69,47	72,03	74,36	75,36	76,94	78,00	78,14	78,23	78,25	78,20	78,75	81,06	83,16
Pertumbuhan (%yoy)	6,38	7,41	5,16	9,30	9,46	6,66	8,15	9,54	8,22	10,76	8,30	5,08	3,80	1,70	0,25	0,78	3,74	6,30
LDR %	126,99	125,63	129,20	131,48	141,66	137,59	142,09	145,78	145,94	143,93	146,85	146,77	142,79	141,73	140,92	140,85	135,39	133,29
NPL-gross %	1,87	1,92	1,83	1,69	1,85	1,88	1,93	1,74	2,13	2,27	2,11	1,91	2,22	2,32	2,43	2,42	2,50	2,59

Sumber: Bank Indonesia, diolah

b. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Simpanan	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total DPK (Rp triliun)	50,10	51,84	51,55	51,63	49,16	50,49	50,69	51,01	51,64	53,46	53,12	53,24	54,79	55,21	55,49	55,91	59,87	62,39
g. DPK (%yoy)	11,76	7,27	7,36	5,71	-1,88	-2,61	-1,66	-1,20	5,04	5,88	4,79	4,37	6,10	3,28	4,47	5,02	12,46	13,87
Giro	8,21	9,02	8,63	7,40	7,33	6,71	7,26	6,64	7,68	7,57	8,02	6,37	8,02	8,12	8,40	7,40	10,56	11,18
g. Giro (%yoy)	28,20	11,59	9,14	3,94	-10,64	-25,66	-15,88	-10,32	4,75	12,94	10,41	-3,96	4,47	7,18	4,74	16,03	65,60	39,34
Tabungan	28,27	29,65	28,93	30,61	28,10	29,79	29,02	30,90	29,88	31,45	31,11	32,70	32,62	32,73	32,63	34,93	35,41	36,29
g. Tabungan (%yoy)	10,99	7,96	6,09	3,32	-0,57	0,46	0,33	0,96	6,32	5,57	7,20	5,80	9,19	4,09	4,89	6,85	8,29	11,23
Deposito	13,63	13,17	13,99	13,62	13,72	13,99	14,41	13,47	14,08	14,44	13,99	14,17	14,14	14,36	14,47	13,58	13,91	14,92
g. Deposito (%yoy)	5,14	3,07	8,94	12,58	0,68	6,27	3,00	-1,11	2,59	3,17	-2,87	5,21	0,42	-0,54	3,38	-4,14	-1,81	5,52

Sumber: Bank Indonesia, diolah

c. Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan

Kredit/Pembiayaan	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit (Rp triliun)	63,62	65,13	66,60	67,88	69,64	69,47	72,03	74,36	75,36	76,94	78,00	78,14	78,23	78,25	78,20	78,75	81,06	83,16
g. Total Kredit (% yoy)	6,38	7,41	5,16	9,30	9,46	6,66	8,15	9,54	8,22	10,76	8,30	5,08	3,80	1,70	0,25	0,78	3,74	6,30
Modal Kerja	25,17	25,78	26,59	26,56	27,24	27,02	28,30	29,52	28,27	30,01	29,64	28,87	28,27	28,27	27,34	26,13	27,38	29,06
g. Kredit Modal Kerja (% yoy)	9,96	11,91	10,89	10,02	8,20	4,81	6,45	11,14	3,81	11,08	4,72	-2,20	-0,02	-5,80	-7,75	-9,48	-5,18	2,81
Investasi	9,92	9,97	10,04	10,71	11,37	11,23	11,86	12,39	13,39	12,93	13,13	13,38	13,64	13,39	13,76	14,90	15,52	15,63
g. Kredit Investasi (% yoy)	5,67	7,02	-4,56	17,24	14,60	12,65	18,13	15,73	17,81	15,10	10,72	7,97	1,85	3,61	4,78	11,42	16,01	14,62
Konsumsi	29,33	29,38	29,97	30,61	31,03	31,22	31,87	32,45	36,59	34,00	35,24	35,89	36,32	36,59	37,10	37,71	38,17	38,46
g. Kredit Konsumsi (% yoy)	4,66	3,86	3,93	6,19	5,80	6,26	6,32	5,99	17,89	8,93	10,59	10,61	-0,73	7,59	5,29	5,08	6,34	5,89

Sumber: Bank Indonesia, diolah

d. Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp triliun)

Kredit/Pembiayaan	2022				2023				2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Kredit	63,62	65,13	66,60	67,88	69,64	69,47	72,03	74,36	75,36	76,94	78,25	78,14	78,23	78,25	78,20	78,75	81,06	83,16
Pertanian & Perikanan	9,99	10,46	10,55	11,21	11,99	11,35	12,25	12,79	13,16	13,16	13,16	12,85	13,18	13,16	13,19	13,69	14,57	16,20
Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,15	0,17	0,21	0,19	0,17	0,16	0,15	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16	0,17	0,18
Industri Pengolahan	3,96	3,79	4,13	3,56	3,28	3,51	3,49	4,32	4,17	4,17	3,69	4,49	3,97	3,69	3,73	3,44	4,08	3,96
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22	0,21	0,23	0,24	0,26	0,23	0,22	0,22	0,23	0,22	0,46	0,46	0,69	0,60
Bangunan	0,53	0,60	0,66	0,62	0,63	0,72	0,73	0,62	0,62	0,67	0,59	0,61	0,60	0,59	0,62	0,65	0,74	0,85
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	16,99	17,86	18,06	18,43	18,58	18,73	18,91	19,01	19,52	19,62	19,40	19,39	19,29	19,40	18,56	18,23	18,12	18,03
Pengangkutan dan Komunikasi	0,64	0,68	0,75	0,77	1,27	0,88	1,50	1,70	1,06	1,78	1,27	1,31	1,20	1,27	1,19	1,11	1,10	0,90
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,51	0,55	0,60	0,66	0,71	0,74	0,83	0,85	0,88	0,90	0,95	0,93	0,95	0,95	0,96	1,16	1,25	1,70
Jasa-jasa	1,37	1,43	1,49	1,63	1,72	1,92	2,06	2,22	2,16	2,24	2,22	2,29	2,33	2,22	2,22	2,14	2,18	2,27
Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredit Rumah Tangga	29,25	29,38	29,97	30,61	31,03	31,22	31,87	32,45	33,38	34,00	36,59	35,89	36,32	36,59	37,10	37,71	38,17	38,46
Kredit Korporasi	34,38	35,75	36,62	37,27	38,60	38,25	40,16	41,91	41,98	42,94	41,67	42,25	41,91	41,67	40,58	41,04	42,89	44,70

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Halaman ini sengaja dikosongkan







BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH



Normalisasi aktivitas konsumsi dan mobilitas masyarakat pasca-Ramadan dan Idul Fitri mendorong moderasi ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II 2026. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sumatera Barat tercatat tumbuh 4,54% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01% (yoy). Secara sektoral, Normalisasi Konsumsi Rumah Tangga dan mobilitas masyarakat pasca-Ramadan dan HBKN Idulfitri mendorong melambatnya aktivitas perdagangan dan industri pengolahan khususnya yang berkaitan dengan pengolahan makanan dan minuman. Meski demikian, berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana, perbaikan produksi pertanian, keberlanjutan pembangunan infrastruktur, serta kuatnya kinerja ekspor menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan konsumsi rumah tangga tertahan oleh tetap kuatnya konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Konsumsi rumah tangga melambat sejalan dengan normalisasi belanja pasca-HBKN dan kecenderungan masyarakat untuk lebih selektif dalam melakukan pengeluaran. Sementara itu, investasi tetap solid didukung oleh pembangunan infrastruktur, peningkatan realisasi penanaman modal asing, belanja modal pemerintah, dan pertumbuhan kredit investasi. Ekspor mengalami akselerasi terutama ditopang oleh peningkatan kinerja CPO dan karet serta ekspor antar wilayah. Sementara itu impor tumbuh lebih tinggi sejalan dengan kebutuhan energi, bahan baku, dan kegiatan investasi.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan konsumsi rumah tangga menyebabkan perlambatan lapangan usaha perdagangan, industri pengolahan, serta kontraksi transportasi dan pergudangan. Perlambatan tertahan oleh akselerasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, didukung oleh perbaikan produksi tanaman pangan dan perkebunan serta peningkatan aktivitas peternakan pada momentum HBKN Iduladha.





1.1. PERKEMBANGAN UMUM



Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2026 tetap solid ditopang permintaan domestik yang tetap kuat. Meski demikian meningkatnya ketidakpastian global menahan akselerasi pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,29% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61% (yoy).

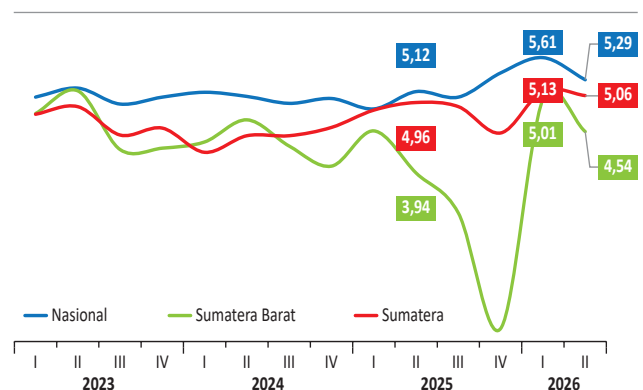
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat pada periode libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) didukung insentif belanja pemerintah melalui pembayaran gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Nasional (ASN), TNI, dan Polri, serta belanja sosial. Selain belanja pemerintah tersebut, realisasi belanja barang dan jasa pemerintah dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah menopang tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meningkat didukung oleh peningkatan realisasi investasi pemerintah; baik dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembangunan dapur SPPG, Sekolah Rakyat, maupun pembangunan infrastruktur; serta realisasi investasi swasta berkaitan dengan ekspansi kawasan industri. Pertumbuhan lebih tinggi tertahan oleh peningkatan impor yang melampaui pertumbuhan ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kinerja positif lapangan usaha utama. Industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, informasi dan komunikasi serta Lapangan Usaha

penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi kontributor utama pertumbuhan seiring dengan tetap kuatnya permintaan domestik terutama didukung oleh realisasi pelaksanaan program prioritas pemerintah dan masih cukup kuatnya pertumbuhan investasi. Di sisi lain kinerja pertambangan mengalami kontraksi, antara lain dipengaruhi oleh penurunan produksi beberapa komoditas tambang imbas penurunan kuota produksi tambang dan penyesuaian pengaturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi pelaku usaha tambang.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi terjadi di mayoritas wilayah Indonesia. Pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,10% (yoy), diikuti Jawa sebesar 5,65% (yoy), Sulawesi sebesar 5,53% (yoy), dan Sumatera sebesar 5,06% (yoy). Sementara itu, Kalimantan tumbuh sebesar 4,10% (yoy), sedangkan Maluku dan Papua tumbuh sebesar 1,36% (yoy).

Di tengah tetap kuatnya perekonomian nasional, ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tumbuh positif meskipun mengalami moderasi. Ekonomi Sumatera Barat tumbuh 4,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan tersebut juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29% (yoy) dan wilayah Sumatera sebesar 5,06% (yoy). Moderasi pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh normalisasi pola konsumsi dan mobilitas masyarakat pasca-Ramadan dan HBKN Idulfitri pada triwulan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.1 Perkembangan PDRB dan PDB Triwulanan



sebelumnya. Meski demikian, berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana; peningkatan produksi pertanian, peternakan dan perkebunan; keberlanjutan pembangunan infrastruktur, dan tetap kuatnya kinerja ekspor menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

Dari sisi pengeluaran, moderasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat didorong oleh perlambatan konsumsi rumah tangga, di tengah tetap kuatnya konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor. Pada triwulan II 2026, masyarakat cenderung menahan konsumsi dipengaruhi siklus konsumsi pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri; imbas kenaikan harga baik langsung maupun tidak langsung akibat kenaikan inflasi barang dan jasa yang harganya ditentukan pemerintah dan berlanjutnya depresiasi nilai tukar rupiah; serta persepsi terhadap perekonomian yang menurun. Perlambatan tertahan Konsumsi Pemerintah yang tetap tumbuh tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Tetap tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah terutama didorong oleh realisasi belanja dalam rangka pelaksanaan program prioritas pemerintah

maupun dalam rangka penyaluran gaji ke-13 dan belanja sosial. PMTB tumbuh solid didukung oleh keberlanjutan proyek infrastruktur, peningkatan realisasi penanaman modal, belanja modal pemerintah, serta realisasi investasi swasta. Dari sisi eksternal, peningkatan harga komoditas CPO dan Karet global serta faktor depresiasi rupiah menopang akselerasi kinerja ekspor terutama untuk komoditas CPO dan karet. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan energi, bahan baku, dan barang modal mendorong peningkatan impor tumbuh lebih tinggi sebesar 27,91% (yoy) dan menahan kinerja net ekspor untuk tumbuh lebih tinggi.

Perlambatan konsumsi rumah tangga menahan kinerja lapangan usaha perdagangan, transportasi pergudangan dan industri pengolahan. Perlambatan tertahan oleh peningkatan produksi pertanian, peternakan, dan perkebunan. Lapangan usaha perdagangan tumbuh melambat sejalan dengan normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat pasca-HBKN Idulfitri. Industri pengolahan juga tumbuh lebih rendah di tengah perlambatan aktivitas produksi dan peningkatan biaya bahan baku serta energi. Lapangan

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Lapangan Usaha (% yoy)

No	Lapangan Usaha	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,40	10,46	10,57	11,04	42,47	11,06	10,88	11,10	11,19	44,23	11,41	11,47
2	Pertambangan dan Penggalian	1,86	1,86	1,95	1,99	7,66	1,92	1,96	1,91	1,94	7,73	2,06	2,09
3	Industri Pengolahan	4,39	4,43	4,57	4,50	17,89	4,65	4,58	4,98	4,65	18,86	4,88	4,78
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05
5	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,05	0,05
6	Konstruksi	4,40	4,49	4,68	4,82	18,38	4,38	4,49	4,54	4,72	18,13	4,62	4,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,13	8,25	8,45	8,57	33,40	8,49	8,54	8,85	8,75	34,64	9,01	8,96
8	Transportasi dan Pergudangan	5,18	5,41	5,33	5,33	21,25	5,38	5,59	5,15	5,12	21,25	5,59	5,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,58	0,57	2,31	0,59	0,59	0,60	0,61	2,39	0,70	0,70
10	Informasi dan Komunikasi	4,45	4,53	4,53	4,55	18,05	4,64	4,92	4,82	4,62	19,00	4,79	5,01
11	Jasa Keuangan	1,49	1,50	1,52	1,47	5,98	1,54	1,57	1,62	1,70	6,43	1,66	1,58
12	Real Estate	1,01	1,01	1,05	1,06	4,13	1,06	1,09	1,12	1,11	4,37	1,11	1,13
13	Jasa Perusahaan	0,22	0,22	0,23	0,23	0,90	0,23	0,23	0,24	0,24	0,94	0,24	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,81	3,05	2,57	2,78	11,20	2,96	3,10	2,45	2,91	11,42	3,15	3,38
15	Jasa Pendidikan	1,99	2,03	2,03	2,10	8,14	2,09	2,12	2,18	2,10	8,50	2,20	2,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,80	0,86	0,91	3,39	0,87	0,86	0,92	1,02	3,67	0,92	0,92
17	Jasa lainnya	0,91	1,02	0,97	0,97	3,87	0,95	1,10	1,06	1,08	4,20	1,04	1,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		48,72	49,75	49,97	50,99	199,42	50,93	51,71	51,65	51,85	206,14	53,48	54,06

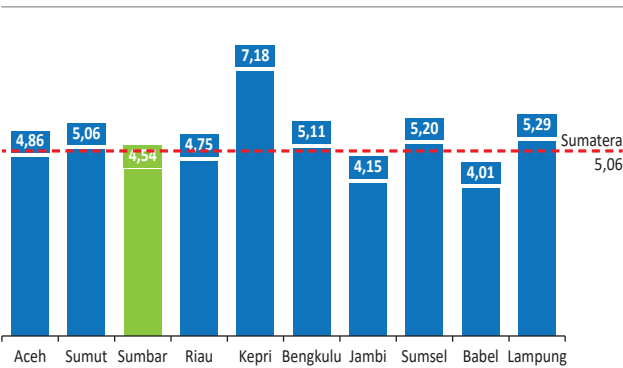
Sumber: BPS, diolah



Tabel 1.2. Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Harga Konstan Sisi Pengeluaran (% yoy)

No	Lapangan Usaha	2024					2025					2026	
		I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	I	II
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23,99	24,70	24,36	23,90	96,95	24,97	24,93	24,76	23,89	98,55	25,74	25,56
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,60	0,55	0,51	0,56	2,22	0,59	0,59	0,54	0,57	2,29	0,60	0,61
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,41	4,46	4,22	5,37	17,46	3,54	4,30	4,12	5,13	17,09	4,08	4,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,30	13,88	14,42	15,70	57,30	13,27	13,85	14,30	14,83	56,25	14,25	14,83
5	Perubahan Inventori	0,46	(0,04)	(0,27)	(0,34)	-0,19	0,53	(0,03)	(0,31)	(0,41)	-0,21	0,64	-0,02
6	Ekspor Total	31,18	28,84	31,92	30,53	122,46	29,98	33,19	34,21	35,56	132,94	35,18	40,49
7	Impor Total	24,21	22,63	25,19	24,74	96,77	21,95	25,12	25,97	27,73	100,76	27,01	32,13
8	Net Ekspor	6,97	6,21	6,72	5,80	25,69	8,04	8,07	8,24	7,83	32,18	8,17	8,36
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		104,11	101,22	107,08	106,25	418,66	102,86	110,02	111,83	115,14	439,84	115,67	126,68

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

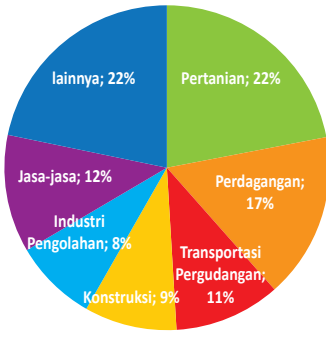
Grafik 1.2 Pertumbuhan PDRB Triwulan II 2026 Seluruh Provinsi di Wilayah Sumatera

usaha transportasi dan perdagangan terkontraksi terutama akibat penurunan mobilitas penumpang dan masih terbatasnya aktivitas angkutan barang. Di sisi lain, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami akselerasi didukung oleh perbaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan sejalan dengan perbaikan sarana prasarana produksi pascabencana dan peningkatan produktivitas.

1.2. DINAMIKA SISI PENGELUARAN

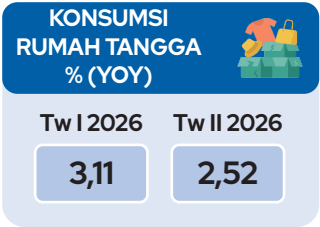
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga

Normalisasi pola belanja pasca HBKN Ramadan dan Idul Fitri; peningkatan harga imbas penyesuaian harga BBM dan efek depresiasi nilai tukar rupiah; serta penurunan persepsi konsumen mendorong perlambatan konsumsi rumah tangga. Pada triwulan



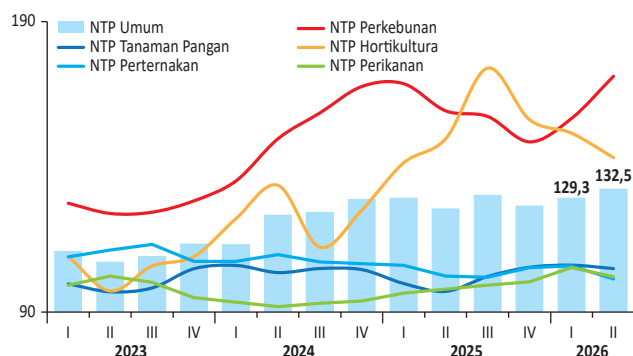
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.3 Pangsa PDRB triwulan II 2026 Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku



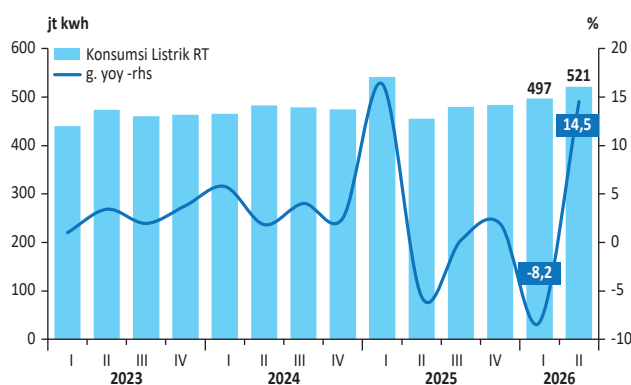
II 2026, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 2,52% (yoy) lebih rendah dibandingkan 3,11% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Penghasilan rumah tangga dan daya beli rumah tangga relatif terjaga didukung peningkatan harga komoditas khususnya CPO dan Karet serta berbagai insentif pemerintah melalui penyaluran gaji ke-13 bagi ASN, TNI/Polri, serta penyaluran bansos. Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat meningkat, dari 129,3 menjadi 132,5 (Grafik 1.7). Peningkatan NTP terutama didorong



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.4 Perkembangan NTP Sumatera Barat

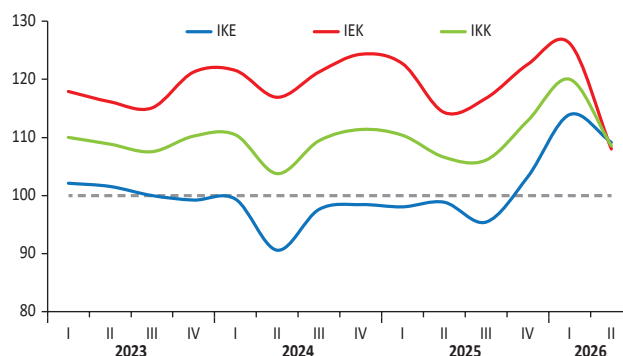


Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.5 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

oleh membaiknya NTP subsektor perkebunan, sejalan dengan kenaikan harga komoditas. Lebih lanjut konsumsi listrik rumah tangga juga tumbuh meningkat 14,5% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi (Grafik 1.8). Akan tetapi, perbaikan penghasilan rumah tangga tertahan peningkatan harga utamanya imbas kenaikan harga BBM, bahan baku dan barang-barang impor (*imported goods*). Hasil Survei Konsumen menunjukkan bahwa Indeks Penghasilan Konsumen mengalami penurunan dari 117,5 pada triwulan I menjadi 108,67.

Keyakinan konsumen melemah namun tetap terjaga. Survei Konsumen Bank Indonesia triwulan II 2026 mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan II 2026 sebesar 108,6, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya 120,0 (Grafik 1.4) meskipun masih

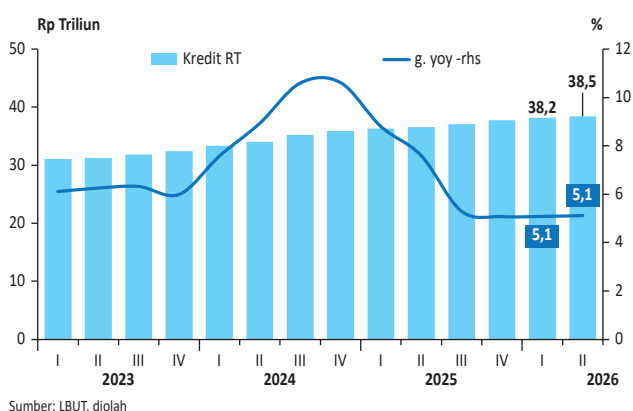


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.6 Survei Konsumen Bank Indonesia

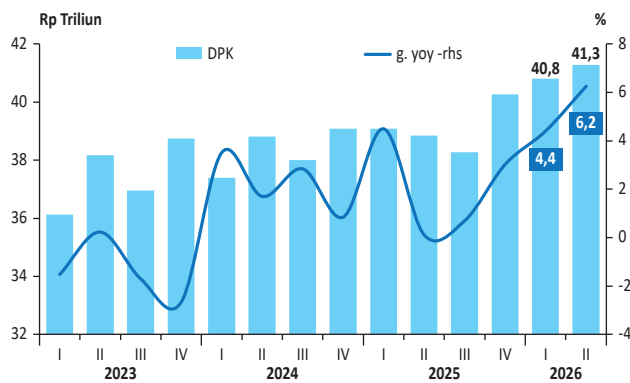
berada pada zona optimis (indeks >100). Dilihat dari indeks pembentuknya, penurunan persepsi terjadi baik pada komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Keduanya berturut-turut mengalami penurunan meski berada pada level optimis masing-masing sebesar 109,1 dan 108,0, lebih rendah dibandingkan dengan indeks triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 112,2 dan 129,7.

Penurunan keyakinan konsumen mendorong masyarakat untuk lebih selektif dan hati-hati dalam berbelanja. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit rumah tangga yang stagnan sebesar 5,12% (yoy) (Grafik 1.5), di tengah peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) rumah tangga dari 4,40% (yoy) menjadi 6,25% (yoy) (Grafik 1.6), khususnya pada DPK dari tabungan.



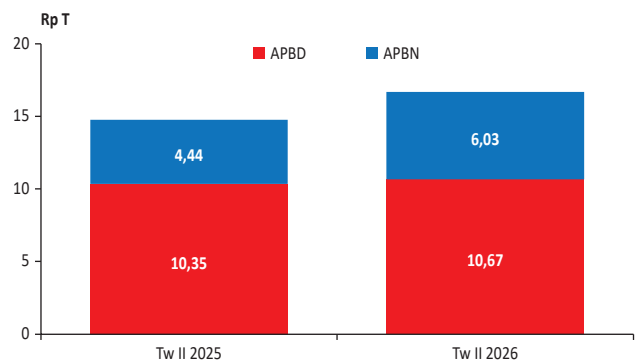
Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1.7 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Sumatera Barat



Sumber: LBUT, diolah

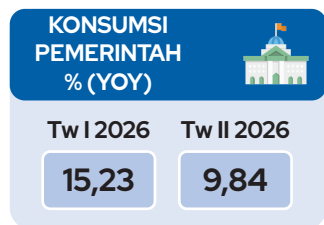
Grafik 1.8 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga Sumatera Barat



Sumber: DJPb dan BPKAD, diolah

Grafik 1.10 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga Triwulan II 2025 dan 2026

1.2.2. Konsumsi Pemerintah



Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi meskipun melambat.

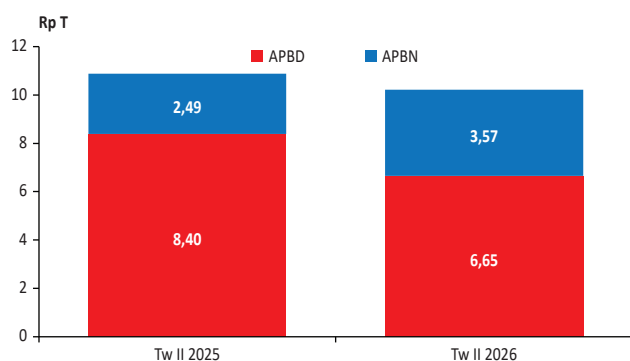
Konsumsi pemerintah tumbuh 9,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan 15,23% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Moderasi tersebut dipengaruhi penurunan realisasi belanja pemerintah daerah di tengah peningkatan belanja pemerintah pusat di daerah (Grafik 1.9).

Realisasi belanja daerah APBD triwulan II 2026 mengalami normalisasi.

Total belanja daerah (19 Kabupaten/Kota + Provinsi) pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp6,65 triliun atau kontraksi sebesar 20,80% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.9). Meski demikian, secara kumulatif belanja pemerintah daerah hingga triwulan II 2026 masih tumbuh sebesar 3,10% (yoy) (Grafik 1.10). Hal ini disebabkan oleh percepatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan I, terutama pada komponen belanja pegawai.

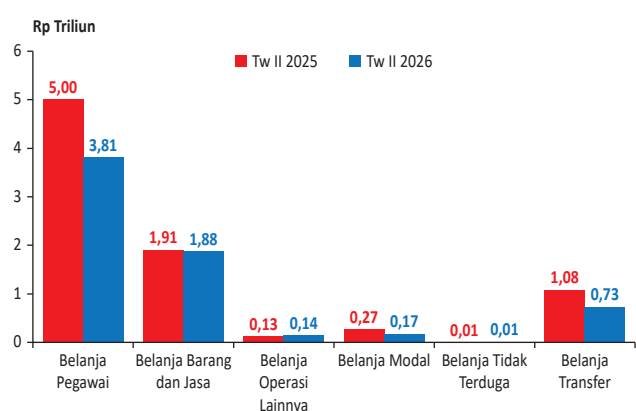
Lebih lanjut, realisasi belanja modal APBD masih terbatas.

Realisasi belanja modal baik secara triwulanan maupun kumulatif pada triwulan II 2026 masih mengalami



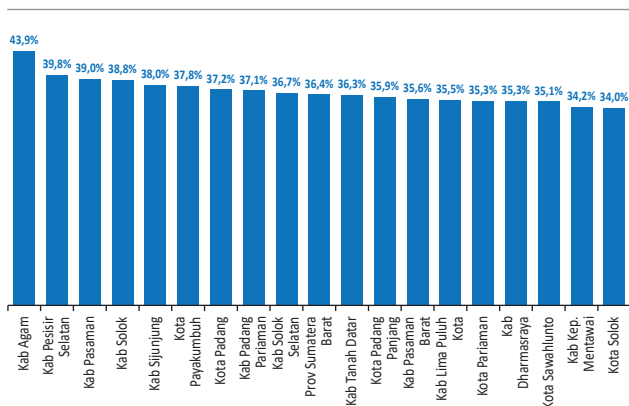
Sumber: DJPb dan BPKAD, diolah

Grafik 1.9 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah pada Triwulan II 2025 dan 2026



Sumber: BPKAD, diolah

Grafik 1.11 Realisasi Belanja APBD pada Triwulan II 2025 dan 2026



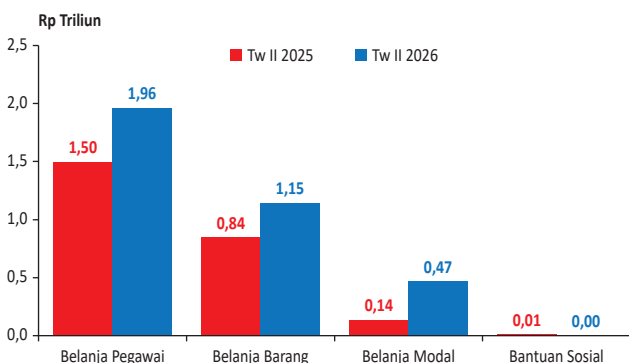
Sumber: BPKAD, diolah

Grafik 1.12 % Realisasi Belanja Pemerintah Daerah

kontraksi. Beberapa perubahan mekanisme mendorong penyesuaian proses administratif untuk belanja modal yang berdampak pada dorongan ekspansi belanja modal pemerintah daerah diperkirakan baru akan terjadi pada triwulan selanjutnya.

Secara spasial, realisasi belanja daerah masih belum merata, tercermin dari realisasi yang berkisar antara 34% hingga 44% dari pagu anggaran (Grafik 1.12). Realisasi belanja relatif lebih tinggi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam yang telah merealisasikan lebih dari 40% belanja. Sementara itu, sebagian besar daerah lainnya mencatatkan realisasi pada kisaran 34% sampai 40%.

Di sisi lain, belanja APBN di daerah pada triwulan II 2026 meningkat. Realisasi belanja pemerintah pusat atau kementerian dan lembaga (K/L) (di luar Transfer ke



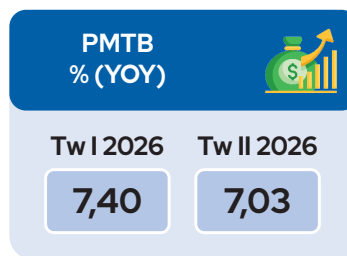
Sumber: DJPb, diolah

Grafik 1.13 Belanja K/L di Daerah

Daerah) di daerah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,57 triliun atau tumbuh 43,63% (yoy) (Grafik 1.13), didorong oleh seluruh komponen belanja. Komponen belanja pegawai meningkat seiring dengan penambahan jumlah pegawai khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) serta kenaikan tunjangan untuk beberapa posisi. Belanja modal juga meningkat seiring dengan berlanjutnya pemulihan infrastruktur pascabencana.

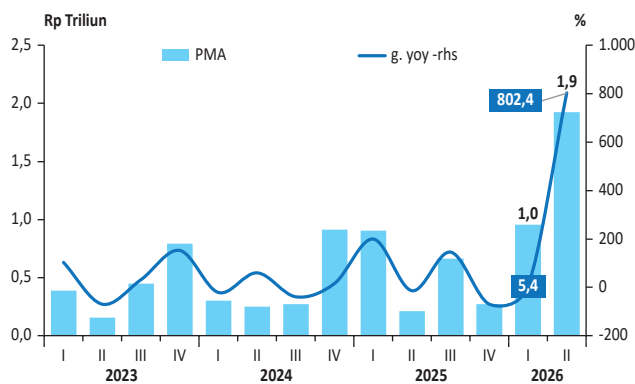
Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II 2026 didorong oleh akselerasi belanja pemerintah pusat di daerah yang bersumber dari APBN di tengah normalisasi kinerja belanja pemerintah daerah yang bersumber dari APBD.

1.2.3. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)



Kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tetap solid ditopang keberlanjutan proyek infrastruktur. PMTB pada triwulan II 2026 tumbuh 7,03% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,40%.

Peningkatan PMTB didukung progres pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, realisasi penanaman modal pada triwulan II 2026 tercatat Rp3,38 triliun atau tumbuh 38,50% (yoy), terutama didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tumbuh 802,4% (yoy) (Grafik 1.14), di tengah kontraksi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 34,61% (yoy) (Grafik 1.15). Peningkatan PMA yang sangat tinggi juga dipengaruhi

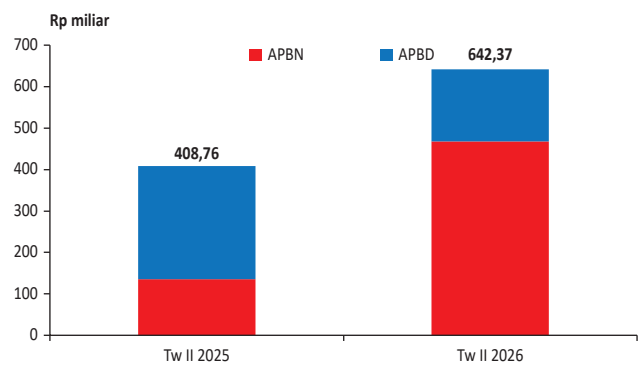


Sumber: DPMPSTSP Prov Sumbar, diolah

Grafik 1.14 Realisasi Nilai dan Proyek PMA

oleh basis realisasi yang relatif rendah pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara sektoral, penanaman modal didominasi investasi infrastruktur terutama pada sektor pertambangan dan pengadaan listrik, didorong oleh berlanjutnya pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kabupaten Solok Selatan.

Rekonstruksi infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi menyokong pertumbuhan investasi pemerintah, terutama yang bersumber dari APBN. Pada triwulan II 2026, belanja modal di Sumatera Barat tercatat Rp642,37 miliar atau tumbuh 57,15% (yoy) dibandingkan Rp408,76 miliar pada triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pemulihan infrastruktur pascabencana,

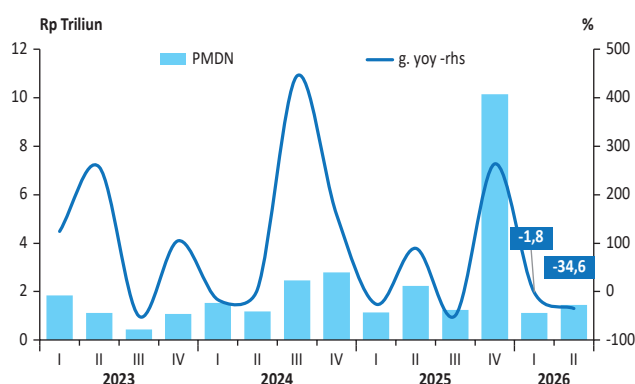


Sumber: DJPb dan BPKAD, diolah

Grafik 1.16 Realisasi Belanja Modal Pemerintah

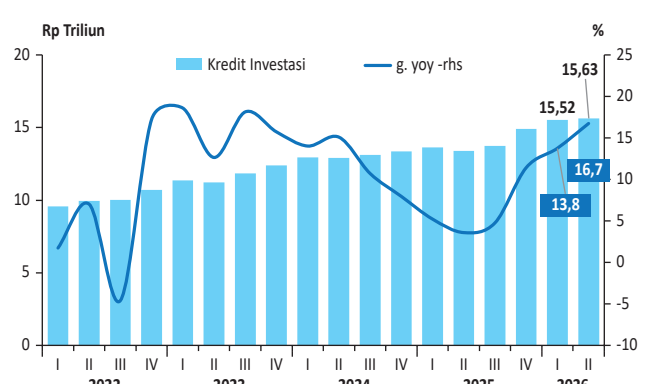
terutama yang bersumber dari APBN. Realisasi belanja modal pemerintah ini diperkirakan akan meningkat pada triwulan III dan IV terutama untuk pemulihan bencana, baik dari APBD maupun APBN.

Pertumbuhan investasi didukung kinerja pembiayaan. Kredit investasi untuk proyek berlokasi di Sumatera Barat tumbuh meningkat menjadi 16,74% (yoy) (Grafik 1.17), mencerminkan masih terjaganya *pipeline* investasi dan adanya ekspansi kapasitas pelaku usaha. Hasil liaison Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa pelaku usaha masih melakukan investasi meskipun sedikit termoderasi khususnya untuk penyelesaian proyek, kebutuhan peningkatan efisiensi, pemeliharaan, maupun ekspansi kapasitas produksi.



Sumber: DPMPSTSP Prov Sumbar, diolah

Grafik 1.15 Realisasi Nilai dan Proyek PMDN



Sumber: LBU, diolah

Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Investasi



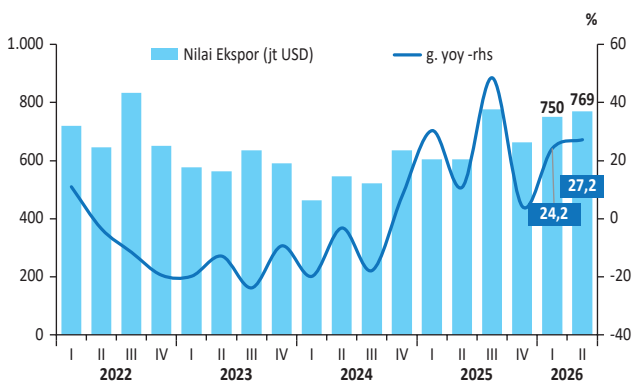
1.2.4. Ekspor Total



Peningkatan harga komoditas, permintaan mitra dagang (domestik dan luar negeri) yang terjaga, serta pelemahan nilai tukar mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor Sumatera Barat triwulan II 2026. Ekspor dari wilayah Sumatera Barat tercatat tumbuh 22,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,33% (yoy). Dampak kenaikan harga komoditas dan depresiasi rupiah terindikasi dari

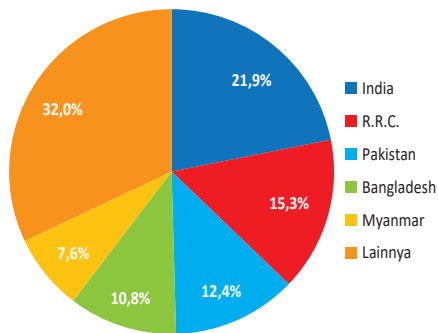
pertumbuhan nilai ekspor luar negeri di tengah kontraksi volume ekspor. Secara nominal, nilai ekspor luar negeri tumbuh 27,16% (Grafik 1.18) di tengah kontraksi volume ekspor -2,70% (yoy) (Grafik 1.19). Sejalan dengan itu, ekspor dalam negeri masih cukup kuat ditopang peningkatan penjualan produk-produk pertanian hortikultura, perkebunan, dan peternakan dari wilayah Sumatera Barat ke wilayah sekitar sejalan dengan peningkatan produksi pertanian pada triwulan II.

Permintaan negara mitra dagang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Di tengah penurunan *Purchasing Manager Index (PMI)* manufaktur negara mitra dagang utama, khususnya di Asia Selatan, ekspor luar negeri dari Sumatera Barat tetap tumbuh (Grafik 1.20 dan 1.21) ditopang peningkatan penjualan CPO dan Karet.

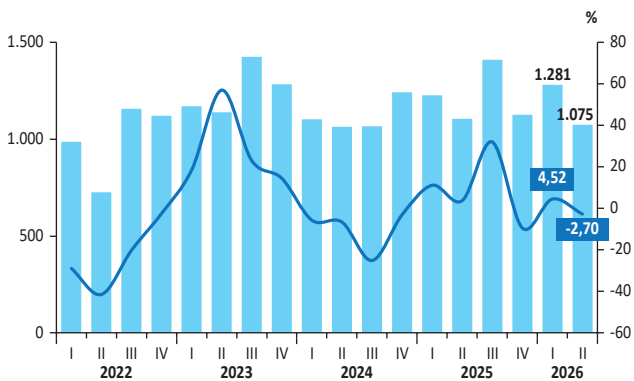


Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat

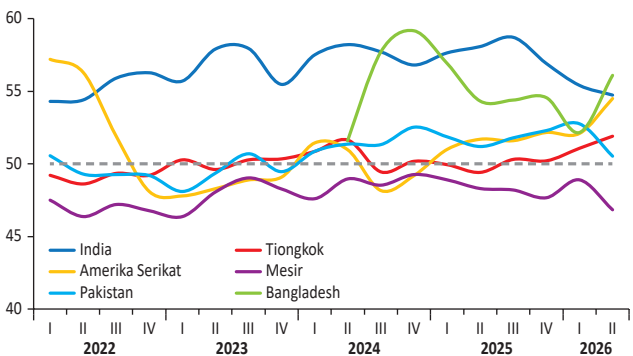


Grafik 1.20 Pangsa Negara Tujuan Ekspor Utama



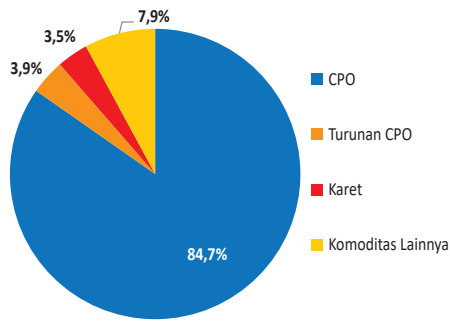
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.19 Perkembangan Volume Ekspor Sumatera Barat



Sumber: tradingeconomics, diolah

Grafik 1.21 PMI Negara Mitra Dagang

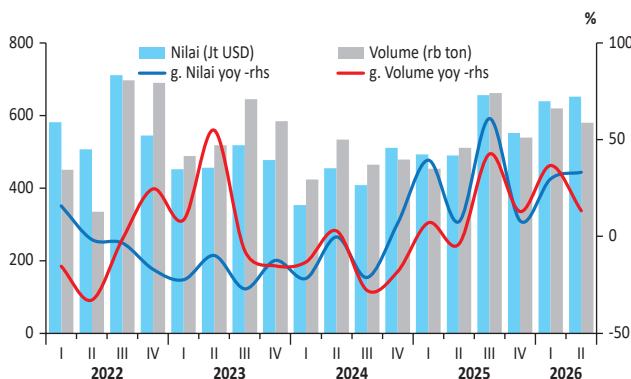


Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.22 Komoditas Utama Ekspor Sumatera Barat

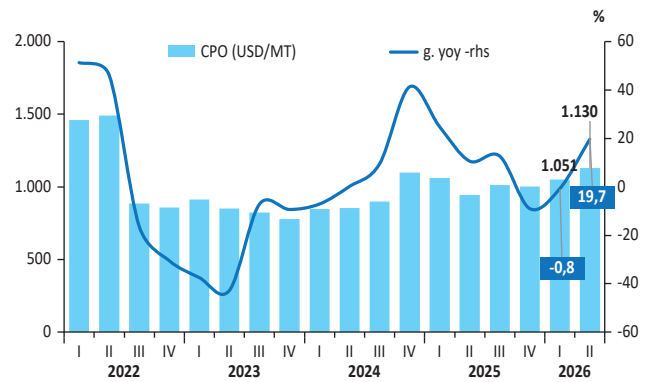
Dilihat dari komoditasnya, CPO (beserta produk turunannya) dan karet merupakan dua komoditas penyumbang nilai ekspor terbesar. Sebesar 84,7% ekspor Sumatera Barat disumbang oleh CPO, diikuti oleh produk turunan CPO 3,9% dan karet 3,5% (Grafik 1.22). Tingginya konsentrasi ini menjadikan kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh dinamika komoditas utama tersebut.

Pada triwulan II 2026, ekspor CPO mencatatkan kinerja yang solid dengan nilai ekspor mencapai 651,2 juta USD atau tumbuh 33,15% (yoy) sejalan dengan terjaganya pertumbuhan volume ekspor sebesar 13,24% (yoy) (Grafik 1.23). Peningkatan harga komoditas CPO dan depresiasi nilai tukar rupiah di tengah perlambatan volume ekspor menjadi penopang utama perbaikan kinerja ekspor CPO. (Grafik 1.24).



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.23 Perkembangan Ekspor CPO

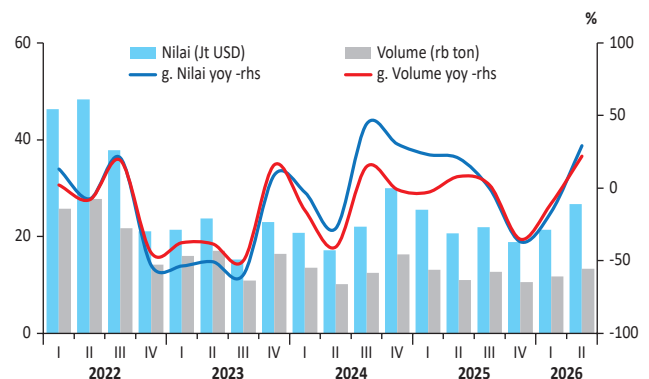


Sumber: bloomberg, diolah

Grafik 1.24 Perkembangan Harga CPO

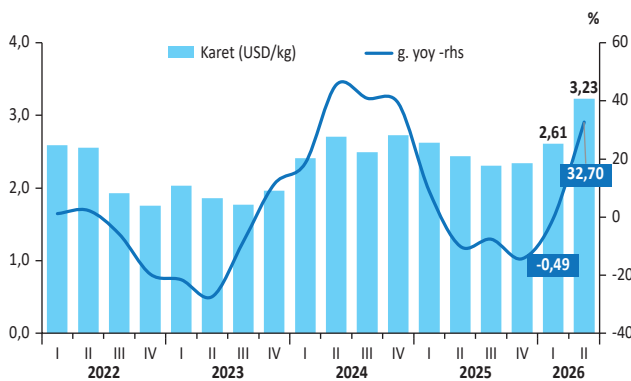
Lebih lanjut, kinerja ekspor karet menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai ekspor karet tercatat tumbuh sebesar 29,23% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi -16,49% (yoy) (Grafik 1.25). Perbaikan ini didukung oleh peningkatan volume ekspor dengan pertumbuhan 21,85% (yoy), serta perbaikan harga komoditas yang tumbuh 32,70% (yoy) (Grafik 1.26). Peningkatan ekspor karet terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan komoditas karet alam seiring meningkatnya harga karet sintetis imbas disrupsi rantai pasok global.

Peningkatan ekspor lebih tinggi tertahan oleh penurunan ekspor jasa. Penurunan ini terjadi seiring dengan menurunnya kunjungan wisatawan domestik maupun luar negeri ke Sumbar. Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat mengalami kontraksi



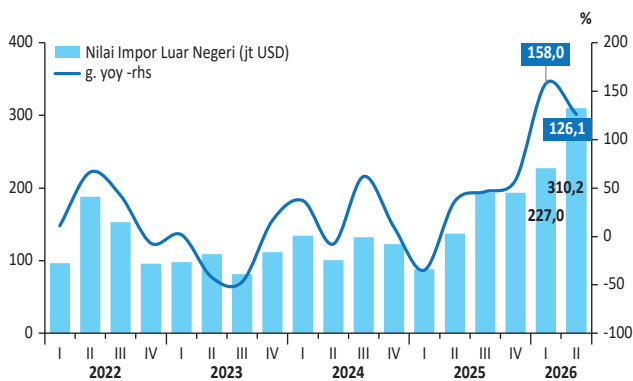
Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.25 Perkembangan Ekspor Karet



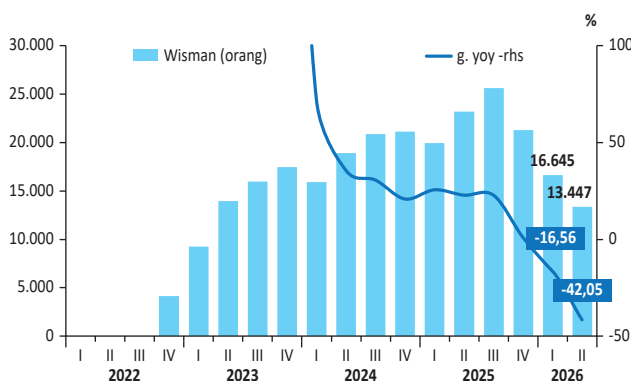
Sumber: bloomberg, diolah

Grafik 1.26 Perkembangan Harga Karet



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.28 Perkembangan Nilai Impor Sumatera Barat



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.27 Perkembangan Wisatawan Mancanegara ke Sumatera Barat

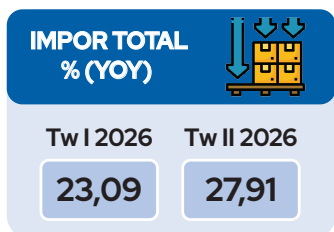
42,05% (yoy). Demikian pula dengan kunjungan wisatawan dalam negeri yang terkontraksi -11,57% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat tumbuh 17% (yoy).

triwulan II 2026 juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan. Total impor tumbuh 27,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 23,09% (yoy).

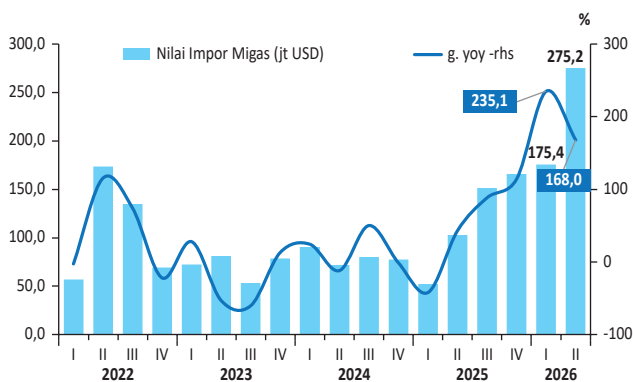
Nilai impor luar negeri Sumatera Barat triwulan II 2026 mencapai USD310,18 juta dengan pertumbuhan sebesar 126,13% (yoy) (Grafik 1.28). Meskipun tumbuh tinggi namun relatif lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 157,98% (yoy). Moderasi pertumbuhan impor luar negeri terjadi di tengah peningkatan pertumbuhan impor total mengindikasikan peningkatan aktivitas impor domestik (antar wilayah).

Berdasarkan nilainya, impor luar negeri didominasi oleh impor migas dengan pangsa mencapai 88,72%, sementara impor nonmigas sebesar 11,28%. Impor

1.2.5. Impor Total



Sejalan dengan masih cukup kuatnya investasi dan kebutuhan bahan baku, impor Sumatera Barat

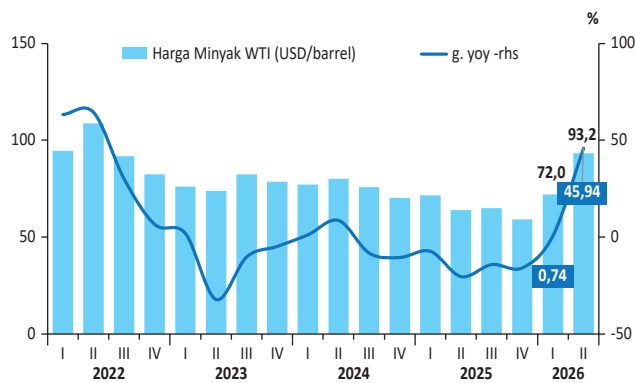


Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.29 Perkembangan Nilai Impor Migas

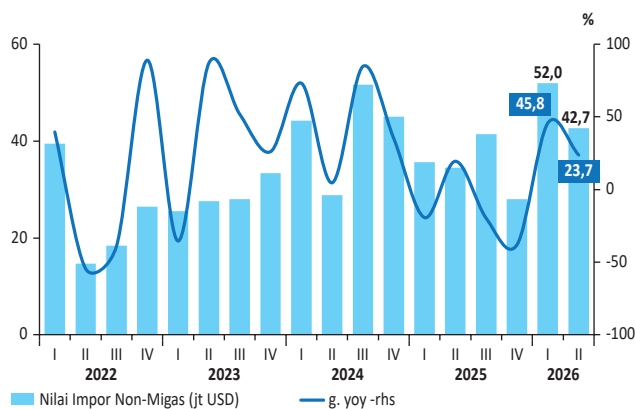


migas masih tumbuh tinggi sebesar 168,02% (yoy) (Grafik 1.29), dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan impor BBM dan bahan baku lainnya (Grafik 1.30).



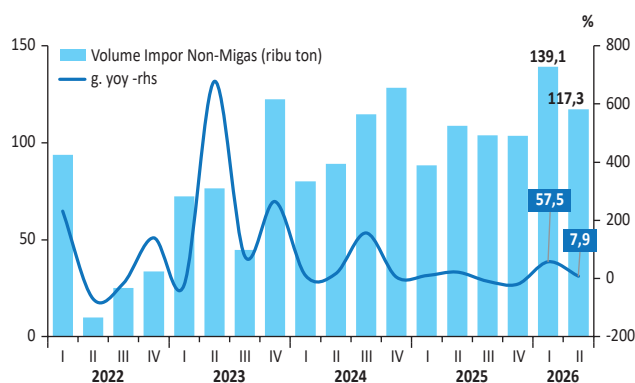
Sumber: bloomberg, diolah

Grafik 1.30 Perkembangan Harga Minyak Dunia



Sumber: DJBC, diolah

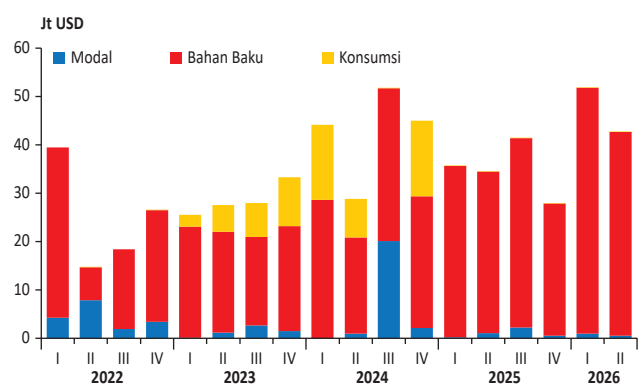
Grafik 1.31 Perkembangan Nilai Impor Non Migas



Sumber: DJBC, diolah

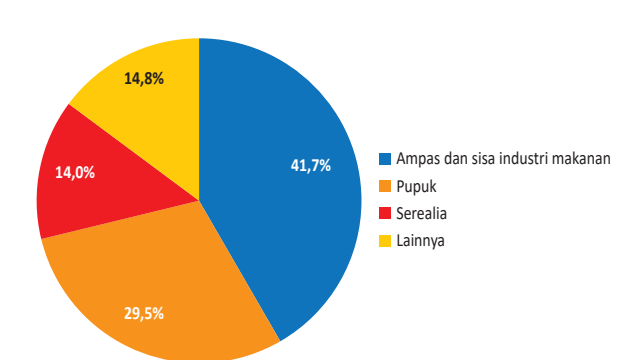
Grafik 1.32 Perkembangan Volume Impor Non Migas

Sejalan dengan pertumbuhan impor total, impor nonmigas mengalami moderasi pertumbuhan. Nilai dan volume impor nonmigas pada triwulan II 2026 masing-masing tercatat tumbuh sebesar 23,74% (yoy) dan 7,86% (yoy) (Grafik 1.31), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 45,82% (yoy) dan 57,54% (yoy) (Grafik 1.32). Berdasarkan golongan penggunaan, moderasi kinerja impor nonmigas terjadi pada seluruh komponen (Grafik 1.33). Salah satu faktor yang memengaruhi adalah meningkatnya biaya logistik sebagai dampak kenaikan harga energi global serta penguatan dolar AS terhadap Rupiah di tengah konflik geopolitik yang berlangsung. Kondisi tersebut diperkirakan mendorong pelaku usaha meningkatkan efisiensi impor dan



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.33 Perkembangan Impor Menurut Golongan Penggunaan



Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.34 Komoditas Impor Non Migas Utama



memprioritaskan pembelian bahan baku yang lebih mendesak. Berdasarkan komoditasnya, impor Sumatera Barat didominasi oleh bahan baku industri seperti ampas dan sisa industri makanan, serta komoditas pendukung sektor pertanian seperti pupuk dan sereal (Grafik 1.34).

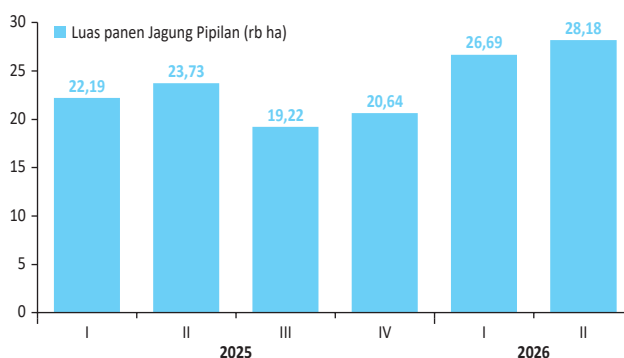
1.3. DINAMIKA SISI LAPANGAN USAHA UTAMA PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT

1.3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan



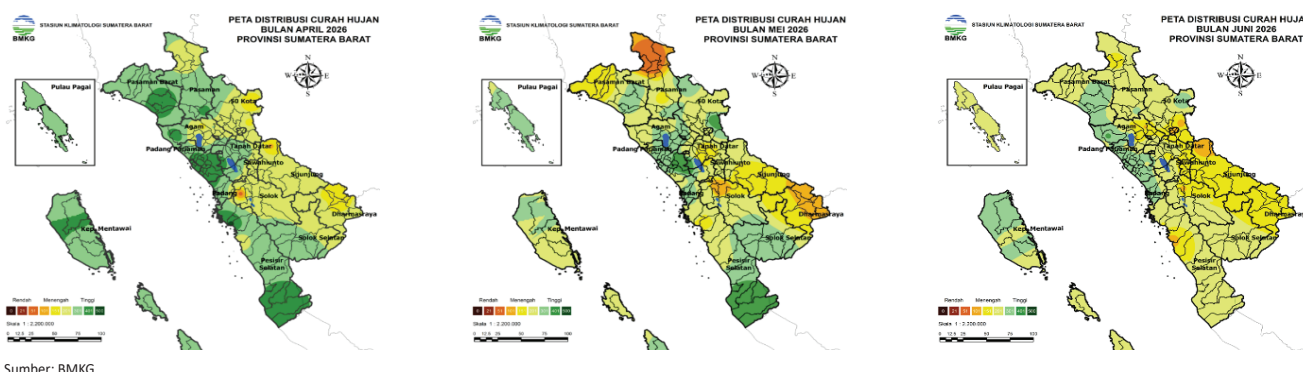
Perbaikan infrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas, serta cuaca yang kondusif menopang akselerasi kinerja Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan II 2026. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,38% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,15% (yoy) (Grafik 1.35).

Kinerja subsektor tanaman pangan membaik. Pada komoditas tanaman pangan, produksi jagung tumbuh tinggi sebesar 16,39% (yoy) (Grafik 1.37), sejalan dengan peningkatan luas panen yang tumbuh sebesar 18,73% (yoy) (Grafik 1.36). Kinerja padi juga menunjukkan perbaikan setelah terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan kerusakan beberapa area persawahan. Meski demikian, luas panen padi masih berkontraksi 1,15% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi 13,73% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan perbaikan tersebut, produksi padi tumbuh tipis sebesar 0,03% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi sebesar 11,59% (yoy) (Grafik 1.39).

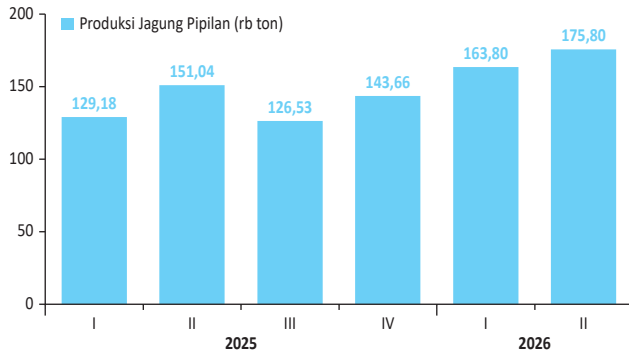


Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.36 Luas Panen Jagung Pipilan Sumatera Barat

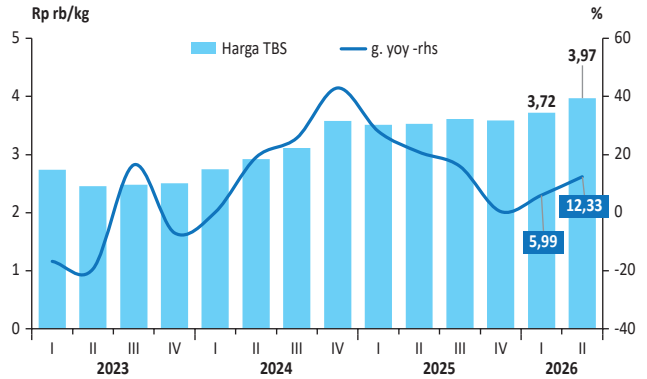


Grafik 1.35 Curah Hujan Sumatera Barat Triwulan II 2026



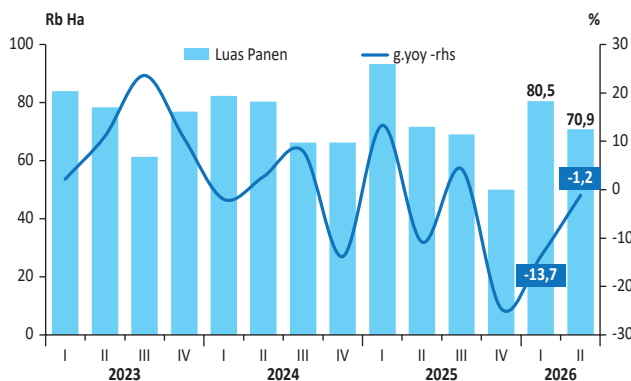
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.37 Produksi Jagung Pipilan Sumatera Barat



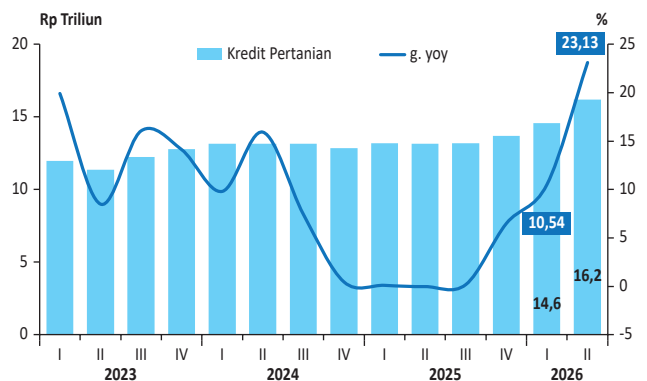
Sumber: GAPKI, diolah

Grafik 1.40 Perkembangan Harga TBS Sumatera Barat



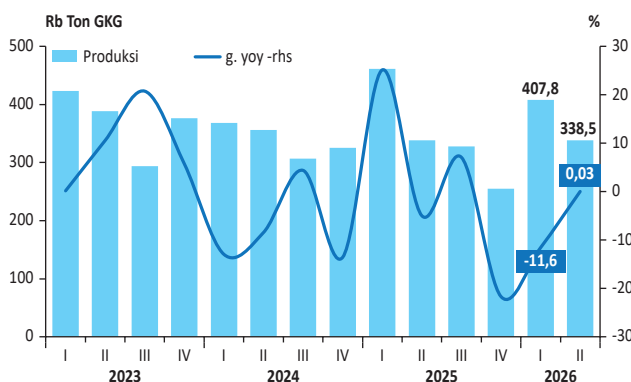
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.38 Luas Panen Padi Sumatera Barat



Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1.41 Perkembangan Kredit Pertanian Sumatera Barat



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.39 Produksi Padi Sumatera Barat

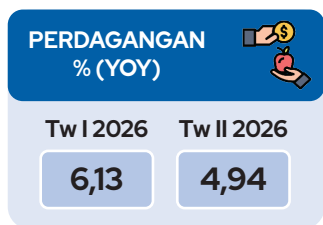
Pada subsektor perkebunan, kinerja menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa pelaku usaha, produksi kelapa sawit

meningkat didukung oleh perbaikan produktivitas hasil *replanting* kebun perusahaan yang menggunakan bibit lebih baik. Dari sisi harga, rata-rata harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit meningkat menjadi Rp3.967/kg dari sebelumnya Rp3.720/kg (Grafik 1.40), sejalan dengan membaiknya harga CPO global. Lebih lanjut, kinerja subsektor peternakan juga meningkat didorong oleh HBKN Iduladha.

Pembiayaan perbankan cukup optimal mendukung peningkatan kinerja sektor pertanian. Kredit sektor pertanian tercatat tumbuh 23,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,54% (yoy) (Grafik 1.41). Peningkatan pembiayaan ini mendukung aktivitas produksi, pasca panen maupun sarana prasarana pertanian.

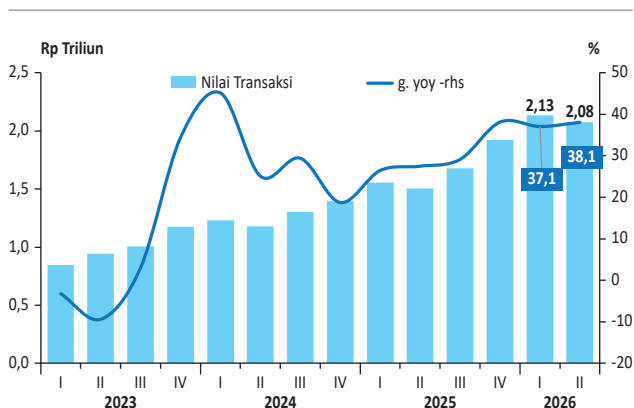


1.3.2. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



Sejalan dengan normalisasi konsumsi rumah tangga, kinerja lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor pada triwulan II 2026 juga termoderasi. Lapangan usaha perdagangan tercatat tumbuh 4,94% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,13% (yoy). Moderasi ini terutama disebabkan oleh faktor musiman, yaitu normalisasi belanja masyarakat pasca Ramadan dan HBKN Idulfitri pada triwulan sebelumnya.

Moderasi kinerja perdagangan dipengaruhi semakin selektifnya masyarakat dalam melakukan belanja sejalan persepsi masyarakat yang menurun. Indeks pembelian barang tahan lama pada Survei Konsumen menunjukkan penurunan pada triwulan II 2026 (Grafik 1.42). Konsumsi masyarakat yang semakin selektif mendorong aktivitas perdagangan ritel tertahan. Penurunan aktivitas perdagangan ritel terkonfirmasi dari penurunan nilai transaksi digital di *marketplace* yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun



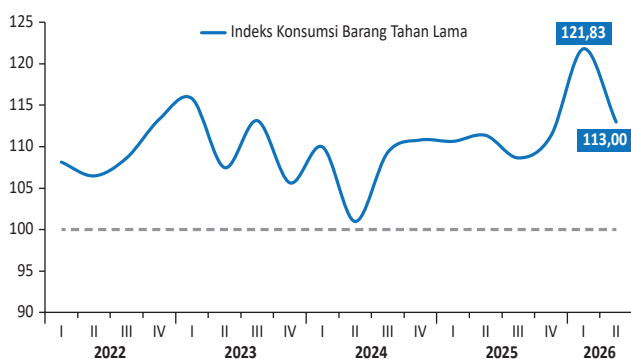
Sumber: salah satu marketplace, diolah

Grafik 1.43 Perkembangan Transaksi Jual Beli Digital

secara pertumbuhan masih relatif baik sebesar 38,08% (yoy).

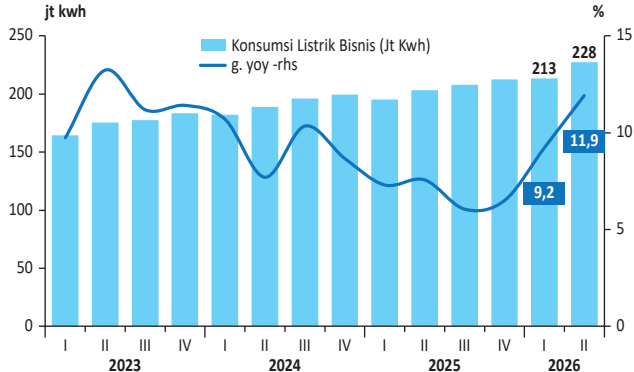
Perlambatan sektor perdagangan mendorong menurunnya pembiayaan sektor perdagangan. Pembiayaan sektor perdagangan tercatat masih berkontraksi 7,05% (yoy) melanjutkan perlambatan sejak 2021 (Grafik 1.46).

Di tengah perlambatan tersebut, permintaan pada kelompok kendaraan bermotor menunjukkan penguatan, meskipun belum cukup untuk mengimbangi normalisasi perdagangan ritel secara keseluruhan. Registrasi kendaraan bermotor baru di Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 53,57% (yoy) dibandingkan 34,02% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik 1.44). Pertumbuhan ini didorong oleh



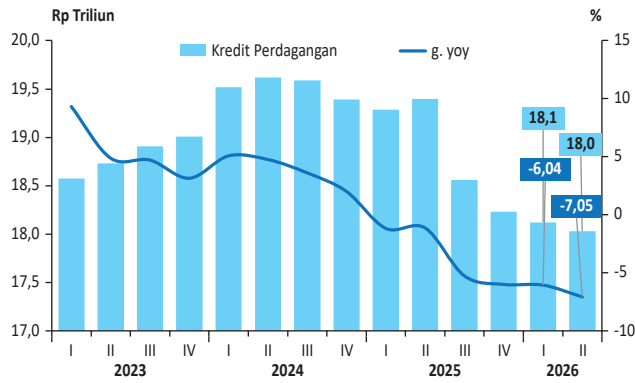
Sumber: Survei Konsumen, diolah

Grafik 1.42 Indeks Konsumsi Barang Tahan Lama



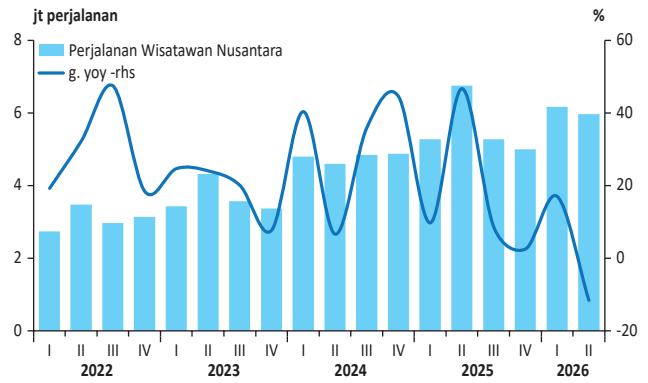
Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.44 Perkembangan Konsumsi Listrik Bisnis



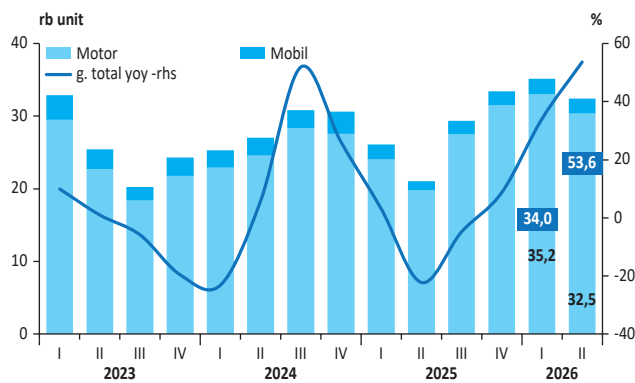
Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1.45 Perkembangan Kredit Perdagangan



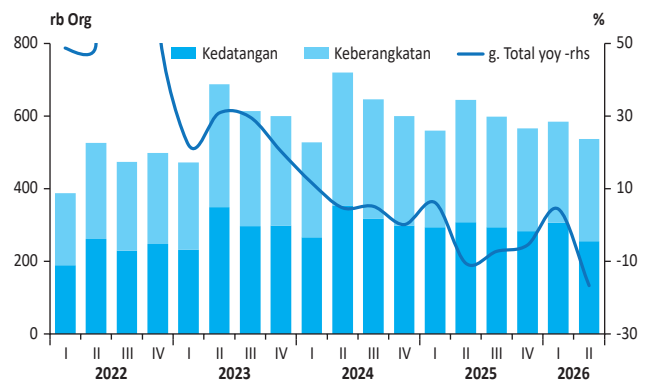
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.47 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Sumatera Barat



Sumber: Bapenda Sumbar, diolah

Grafik 1.46 Penjualan Kendaraan Bermotor Baru Sumatera Barat

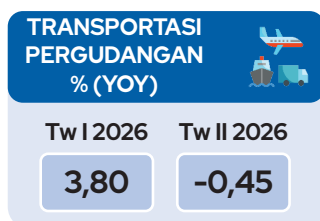


Sumber: Angkasa Pura Indonesia, diolah

Grafik 1.48 Perkembangan Penumpang Bandara Internasional Minangkabau

peningkatan registrasi mobil baru yang tercatat tumbuh 56,13% (yoy).

1.3.3. Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan

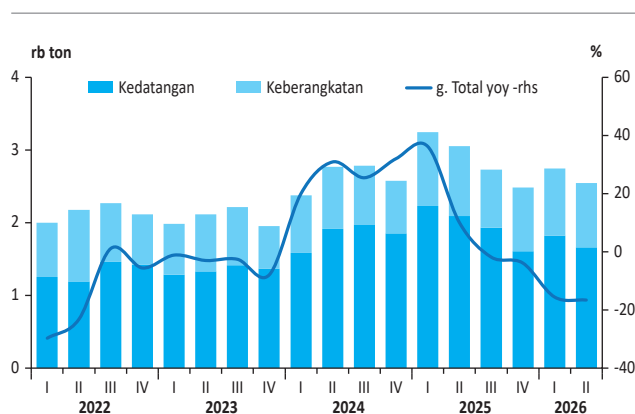


Normalisasi pasca HBKN, peningkatan biaya transportasi imbas kenaikan harga BBM, serta penurunan aktivitas perdagangan memberi dampak

penurunan kinerja lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Pada triwulan II 2026 Lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat berkontraksi sebesar 0,45% (yoy) setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya.

Normalisasi mobilitas masyarakat pasca periode HBKN Idulfitri menahan kinerja sektor transportasi.

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara dengan provinsi tujuan Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat berkontraksi 11,57% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh 17,03% (yoy) (Grafik 1.47). Hal ini sejalan dengan pergeseran periode HBKN Idulfitri yang menyebabkan penurunan mobilitas masyarakat. Penurunan mobilitas juga tercermin dari jumlah penumpang angkutan udara melalui Bandara

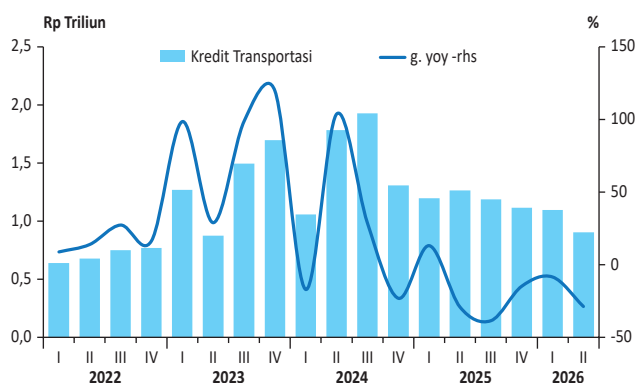


Sumber: Angkasa Pura Indonesia, diolah

Grafik 1.49 Perkembangan Kargo Bandara Internasional Minangkabau

Internasional Minangkabau yang tercatat terkontraksi 16,69% (yoy) setelah tumbuh positif pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.48). Perkembangan tersebut terjadi di tengah relatif tingginya biaya perjalanan udara.

Kinerja angkutan barang juga masih menunjukkan tekanan. Volume kargo yang tercatat melalui Bandara Internasional Minangkabau terkontraksi sebesar 16,48% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya kontraksi 15,44% (yoy) (Grafik 1.49). Hal ini mengindikasikan aktivitas distribusi barang khususnya melalui moda transportasi udara, belum sepenuhnya pulih. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya pergeseran distribusi dari moda udara ke moda transportasi lain yang lebih efisien secara biaya.

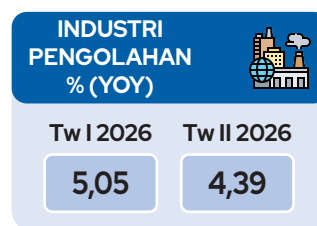


Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1.50 Perkembangan Kredit Transportasi

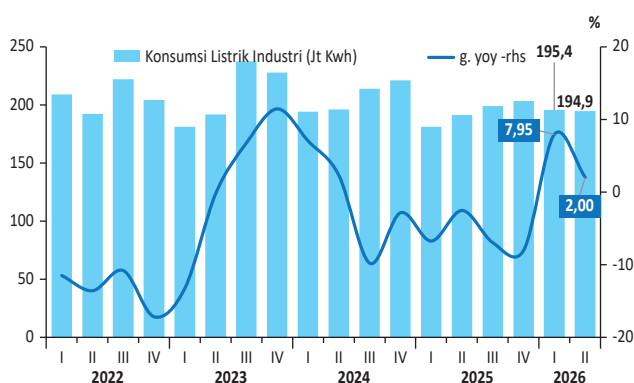
Pembiayaan sektor transportasi juga masih mengalami tekanan. Kredit sektor transportasi terkontraksi sebesar 28,64% (yoy) (Grafik 1.50). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha khususnya pada sektor transportasi masih cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

1.3.4. Lapangan Usaha Industri Pengolahan



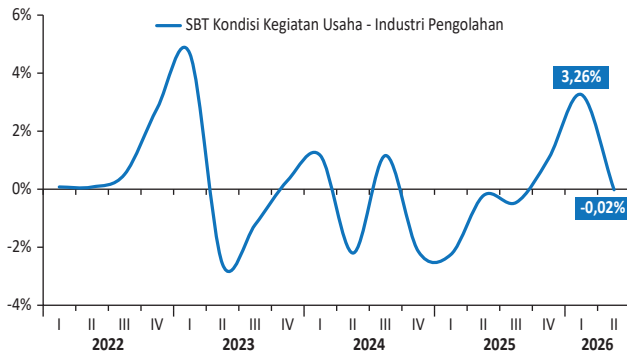
Kenaikan biaya energi dan bahan baku di tengah masih solidnya permintaan menahan kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada triwulan II 2026. Lapangan usaha industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 4,39% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,05% (yoy).

Aktivitas industri pada triwulan II 2026 cenderung tertahan, tercermin dari konsumsi listrik industri yang tumbuh sebesar 2,00% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,95% (yoy) (Grafik



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.51 Konsumsi Listrik Sektor Industri

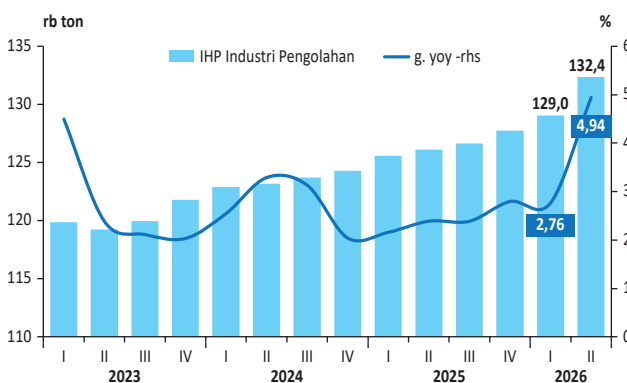


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.52 Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Industri Pengolahan

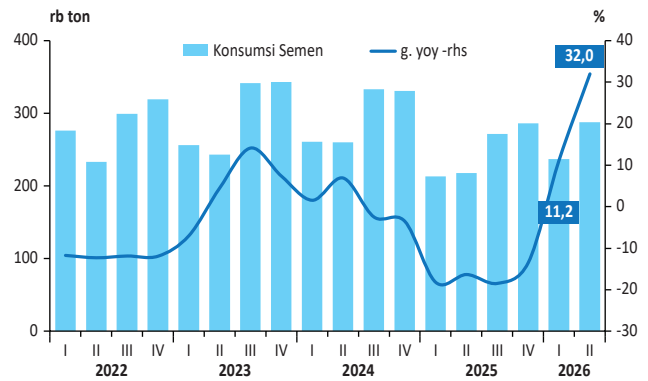
1.51). Hal ini sejalan dengan hasil survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia yang menghasilkan saldo bersih tertimbang (SBT) industri pengolahan lebih rendah pada triwulan II.

Kenaikan harga minyak global dan tekanan depresiasi rupiah mendorong peningkatan biaya produksi yang memicu penurunan aktivitas industri. Tekanan biaya bahan baku dan energi terindikasi meningkat berdasarkan hasil *liaison* Bank Indonesia. Pada saat yang sama, Indeks Harga Produsen industri pengolahan meningkat menjadi 132,4 atau tumbuh 4,94% (yoy) (Grafik 1.53), menunjukkan adanya peningkatan harga pada tingkat produsen. Kenaikan kedua komponen ini menekan margin dan nilai tambah yang dihasilkan oleh industri.



Sumber: BPS, diolah

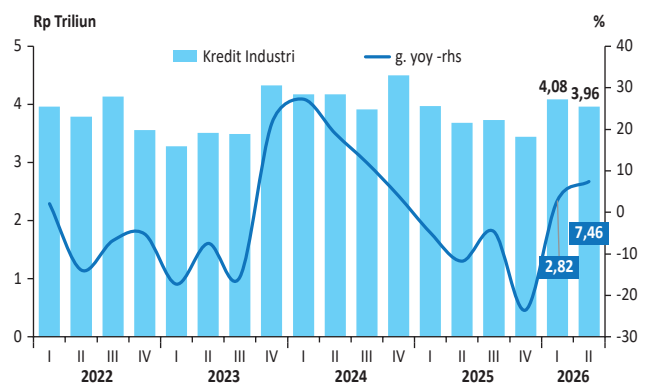
Grafik 1.53 Indeks Harga Produsen Sektor Industri Pengolahan



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.54 Konsumsi Semen Sumatera Barat

Di sisi lain, permintaan akan produk industri pengolahan masih kuat. Hal ini tercermin dari konsumsi semen di Sumatera Barat yang tumbuh meningkat sebesar 32,02% (yoy) dibandingkan 11,25% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.54). Konsumsi semen ini terutama digunakan untuk beberapa aktivitas konstruksi di Sumatera Barat, seperti pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Lebih lanjut, industri makanan dan minuman terindikasi meningkat untuk memenuhi permintaan program prioritas pemerintah dan kebutuhan ekspor. Sejalan dengan itu, permintaan industri pengolahan berbasis kelapa sawit untuk ekspor maupun domestik masih cukup kuat didukung oleh kebijakan mandatori biodiesel B50.



Sumber: LBUT, diolah

Grafik 1.55 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan



Dengan perkembangan di atas, persepsi pelaku industri masih terjaga. Optimisme pelaku usaha di antaranya terindikasi dari kinerja pembiayaan sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 7,46% (yoy), meningkat dibandingkan 2,82% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



Halaman ini sengaja dikosongkan







BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

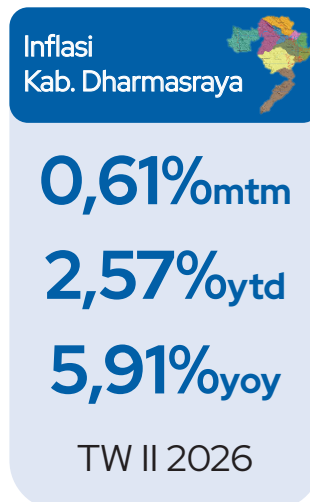
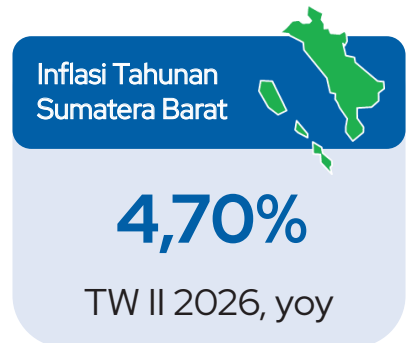
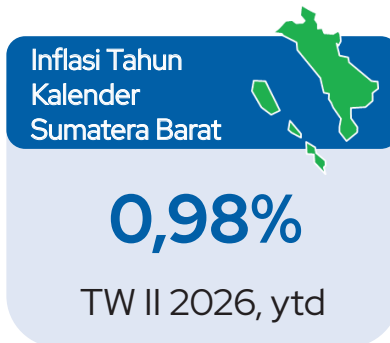
PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH



Akselerasi pelaksanaan program pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif berhasil menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut tercermin dari inflasi kumulatif Januari–Juni 2026 yang masih relatif rendah, yaitu sebesar 0,98% (ytd), meskipun inflasi tahunan meningkat dari 3,37% (yoy) pada Maret 2026 menjadi 4,70% (yoy) pada Juni 2026. Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bensin, minyak goreng, dan emas perhiasan. Selain itu, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga komoditas hortikultura dan energi, termasuk tomat akibat gangguan produksi serta tarif angkutan udara. Namun, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring melimpahnya pasokan unggas nasional, serta pemenuhan pasokan dari sentra produksi di Sumatera Barat dan tindak lanjut kesepakatan GPIPS.

Memasuki awal triwulan III 2026, tekanan inflasi di Sumatera Barat mulai mereda, tercermin dari inflasi kumulatif yang hingga Juli 2026 tercatat sebesar 1,05% (ytd) dan inflasi tahunan yang menurun menjadi 4,12% (yoy). Penurunan inflasi didorong oleh meningkatnya produksi dan pasokan bawang merah serta cabai merah, normalisasi tarif angkutan udara pasca libur sekolah, dan koreksi harga emas global. Di sisi lain, tekanan inflasi masih bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras, bensin, cabai rawit, dan komponen pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Ke depan, risiko inflasi tetap perlu dicermati, terutama yang berasal dari volatilitas harga pangan strategis, kenaikan harga energi global, depresiasi nilai tukar rupiah, serta potensi gangguan produksi akibat cuaca, hama, dan bencana alam. Meski demikian, berlanjutnya masa panen, penguatan distribusi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta sinergi TPID melalui pelaksanaan GPM dan peningkatan produktivitas pertanian diperkirakan akan menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali pada triwulan III 2026.







2.1. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II 2026

Tekanan inflasi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 meningkat di tengah meningkatnya tekanan harga pangan dan energi. Secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 tercatat 4,70% (yoy), meningkat dibandingkan posisi Maret 2026 sebesar 3,37% (yoy) (Grafik 2.1). Peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bensin, minyak goreng, dan emas perhiasan. Tekanan inflasi lebih tinggi dipengaruhi pula oleh efek perhitungan statistik (*base effect*) imbas rendahnya inflasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara fundamental, kenaikan tekanan inflasi pangan didorong penurunan produksi komoditas dampak serangan hama seiring masih tingginya curah hujan di daerah sentra di tengah peningkatan biaya produksi dan logistik seiring kenaikan harga energi dan logistik.

Mengantisipasi peningkatan inflasi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumbar merespons dengan berbagai langkah pengendalian inflasi melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), penguatan produksi pangan, optimalisasi distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM).

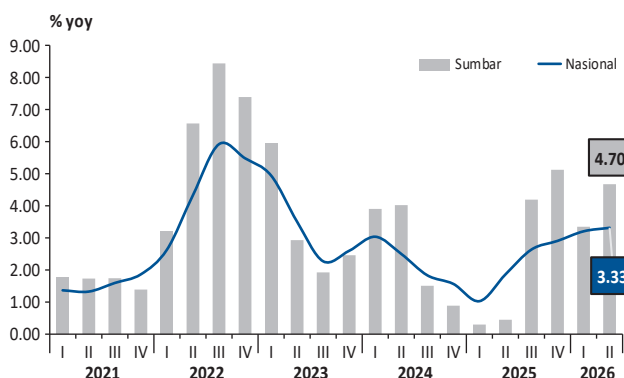
Secara bulanan, peningkatan tekanan inflasi terjadi sejak April 2026 dan mencapai puncaknya pada Mei 2026 seiring meningkatnya harga cabai merah akibat gangguan produksi yang dipengaruhi tingginya curah hujan di berbagai sentra hortikultura. Sejalan dengan itu, tekanan inflasi dari kelompok transportasi juga mengalami peningkatan seiring kenaikan harga energi global yang mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi serta tarif angkutan udara.

Tekanan inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga daging ayam ras dan telur ayam ras seiring melimpahnya pasokan unggas baik secara regional maupun nasional. Hal ini didukung pula oleh berbagai intervensi stabilisasi harga yang dilakukan TPID melalui

operasi pasar, fasilitasi distribusi pangan, dan penguatan pasokan dari sentra produksi dalam maupun luar daerah.

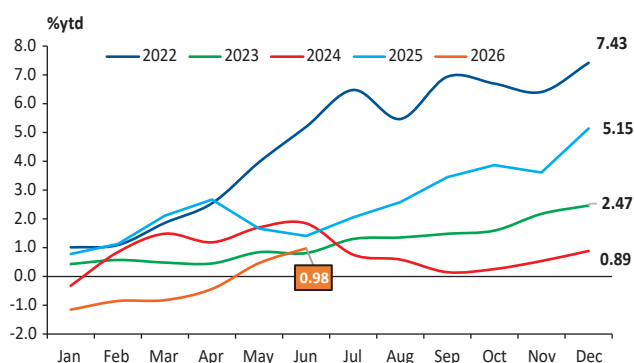
Meski mengalami peningkatan tekanan inflasi, secara akumulatif realisasi inflasi sampai dengan Juni masih relatif rendah. Inflasi kumulatif Sumatera Barat hingga triwulan II 2026 tercatat 0,98% (ytd), terendah dalam tiga tahun terakhir (Grafik 2.2). Rendahnya inflasi kumulatif tersebut ditopang oleh membaiknya pasokan dan produktivitas komoditas hortikultura dampak berbagai program pengendalian inflasi pangan di daerah.

Secara tahunan, Inflasi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah, emas perhiasan, beras, angkutan udara, dan bensin (Tabel 2.1). Cabai merah menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar dengan inflasi



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan (%yoy) Sumatera Barat dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahun Kalender (%ytd) Sumatera Barat



Tabel 2.1. Komoditas Penyumbang Inflasi/Deflasi Sumatera Barat triwulan II 2026 (% yoy)

Inflasi	Deflasi
CABAI MERAH	KENTANG
EMAS PERHIASAN	KELAPA
BERAS	TELUR AYAM RAS
ANGKUTAN UDARA	POPOK BAYI SEKALI PAKAI/ DIAPERS
BENSIN	SANTAN SEGAR
MINYAK GORENG	SUSU BUBUK
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	SABUN CAIR/CUCI PIRING
BAWANG MERAH	PEMBALUT WANITA
IKAN CAKALANG/ IKAN SISIK	SABUN MANDI CAIR
IKAN NILA	TELUR PUYUH

Sumber: BPS, diolah

mencapai 51,25% (yoy) pada Juni 2026 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,73%, seiring penurunan produksi dampak faktor cuaca dan serangan hama dan penyakit di sejumlah sentra hortikultura. Selain itu, peningkatan harga emas global secara tahunan, mendorong terjadinya peningkatan harga emas perhiasan. Pada posisi Juni 2026, emas perhiasan mengalami inflasi 36,76% (yoy) dengan andil 0,50%. Sementara itu, harga beras mengalami inflasi 5,28% (yoy) dengan andil 0,26%, dipengaruhi oleh menurunnya produksi beras akibat dampak bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 yang menyebabkan berkurangnya lahan sawah produktif dan terganggunya infrastruktur pengairan.

Pada kelompok transportasi penyesuaian harga BBM non-subsidi imbas kenaikan harga energi global menyebabkan terjadinya inflasi komoditas bensin sebesar 3,80% (yoy) dengan andil 0,17%. Kenaikan harga energi global juga menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara mengalami inflasi 33,32% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,18%, didorong oleh kenaikan tarif penerbangan pasca berakhirnya program diskon tiket pesawat pada periode HBKN, peningkatan harga avtur, serta meningkatnya permintaan perjalanan pada masa libur sekolah. Komoditas lain yang turut memberikan tekanan inflasi adalah minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), bawang merah, ikan cakalang, dan ikan nila yang dipengaruhi oleh faktor pasokan, biaya distribusi, dan permintaan masyarakat.

Inflasi tahunan lebih tinggi tertahan penurunan harga beberapa komoditas pangan dan kebutuhan rumah tangga. Kentang mencatat deflasi -9,19% (yoy) dengan andil -0,04%, diikuti kelapa sebesar -12,05% (yoy) dengan andil -0,02%, serta telur ayam ras yang mengalami deflasi -2,12% (yoy) dengan andil -0,02%. Penurunan harga komoditas tersebut didukung oleh membaiknya pasokan domestik dan kondisi produksi yang relatif baik pada sejumlah sentra pertanian serta melimpahnya pasokan unggas secara nasional. Selain itu, santan segar mengalami deflasi -2,01% (yoy) dan susu bubuk sebesar -1,53% (yoy) yang turut menahan tekanan inflasi Sumatera Barat pada triwulan II 2026.

2.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan Sumatera Barat triwulan II 2026 terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok transportasi. Ketiga kelompok tersebut menjadi kontributor utama peningkatan inflasi tahunan Sumatera Barat yang mencapai 4,70% (yoy) pada triwulan II 2026.

Pada triwulan II 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi sebesar 7,76% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 2,54% (yoy) (Grafik 2.3



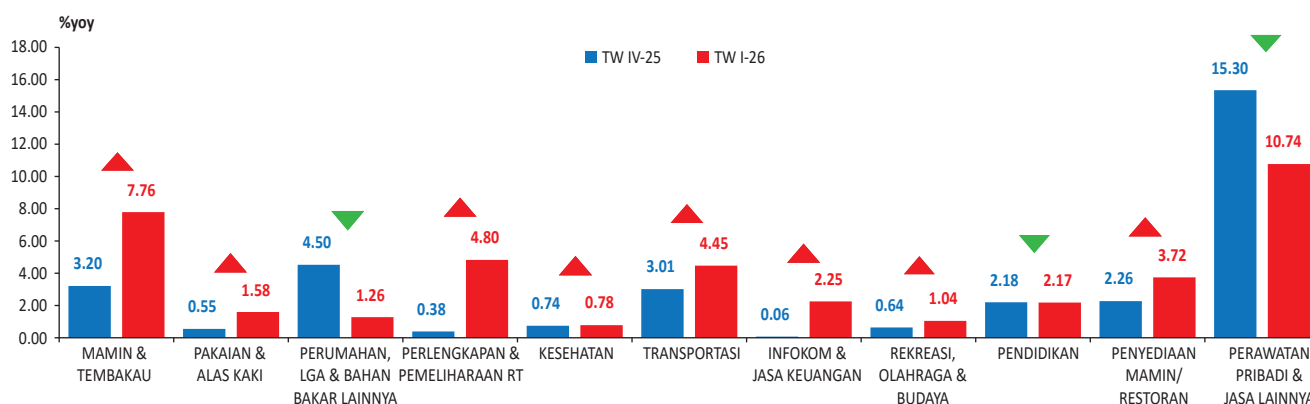
dan Grafik 2.4), menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Barat. Peningkatan inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah yang mencatat inflasi sebesar 51,25% (yoy) dengan andil 0,73%, serta beras yang mengalami inflasi sebesar 5,28% (yoy) dengan andil 0,26%. Selain itu, kenaikan harga minyak goreng sebesar 10,81% (yoy) juga turut memberikan tekanan terhadap kelompok ini. Tingginya inflasi cabai merah dipengaruhi oleh gangguan produksi akibat curah hujan yang tinggi di sejumlah sentra hortikultura, sedangkan kenaikan harga beras dipengaruhi oleh menurunnya produksi akibat dampak bencana hidrometeorologi serta gangguan infrastruktur pengairan pada awal tahun 2026. Tekanan inflasi kelompok ini tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti kentang yang mengalami deflasi-9,19% (yoy), kelapa-12,05% (yoy), dan telur ayam ras-2,12% (yoy) seiring membaiknya pasokan domestik.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar kedua pada triwulan II 2026. Pada Juni 2026, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 10,74% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,55%. Inflasi kelompok ini terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan yang mencapai 36,76% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,50%. Tingginya harga emas sejalan dengan penguatan harga emas global dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap instrumen lindung

nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. Meskipun harga emas perhiasan sempat mengalami koreksi pada beberapa periode, secara tahunan komoditas ini masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Sumatera Barat sepanjang triwulan II 2026.

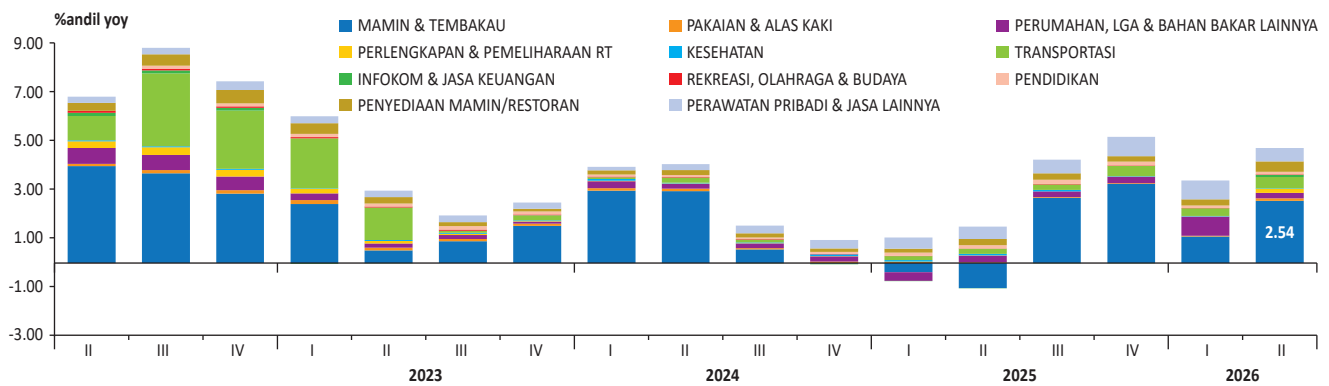
Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi berikutnya dengan inflasi sebesar 4,45% (yoy) dan andil inflasi sebesar 0,47%. Inflasi kelompok ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin sebesar 3,80% (yoy) dengan andil 0,17%, serta meningkatnya tarif angkutan udara yang memberikan andil inflasi sebesar 0,17%. Tekanan inflasi pada kelompok transportasi terjadi seiring penyesuaian harga BBM non-subsidi, meningkatnya harga energi global, serta kenaikan tarif angkutan udara pasca berakhirnya program diskon tiket pesawat dan meningkatnya permintaan perjalanan pada periode libur sekolah. Selain itu, kenaikan biaya operasional dan distribusi juga turut mendorong peningkatan harga jasa transportasi selama triwulan II 2026.

Kelompok lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan adalah kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,80% (yoy), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,72% (yoy), serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,58% (yoy). Sementara itu, kelompok pendidikan mencatat inflasi sebesar 2,17%



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.3 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (% yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.4 Distribusi Andil Inflasi per Kelompok Pengeluaran (% yoy)

(yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,26% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang dipengaruhi mulai berkurangnya dampak *low base effect* tarif listrik. Secara keseluruhan, distribusi andil inflasi pada triwulan II 2026 menunjukkan bahwa tekanan inflasi Sumatera Barat masih didominasi oleh kelompok pangan dan komoditas yang sensitif terhadap gangguan pasokan maupun perkembangan harga global.

2.3. INFLASI SPASIAL

Pada triwulan II 2026, seluruh kabupaten/kota cakupan IHK di Provinsi Sumatera Barat kembali mencatatkan inflasi tahunan. Sebagian besar daerah mengalami peningkatan tekanan harga dibandingkan dengan triwulan I 2026. Kenaikan inflasi terutama didorong oleh meningkatnya harga cabai merah, beras, bensin, dan emas perhiasan, yang disertai dengan tekanan biaya distribusi serta energi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh faktor musiman dan gangguan produksi hortikultura. Meskipun demikian, berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tetap mampu menjaga stabilitas harga secara umum (Grafik 2.5).

Pada triwulan II 2026, Kota Padang mencatat inflasi terendah di Sumatera Barat sebesar 4,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,30% (yoy). Inflasi Kota Padang terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya akibat kenaikan harga cabai merah dan beras. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi salah satu penyumbang inflasi utama seiring tingginya harga emas perhiasan. Tekanan inflasi juga berasal dari kelompok transportasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara. Namun demikian, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan seperti telur ayam ras dan kentang seiring membaiknya pasokan di tingkat regional.

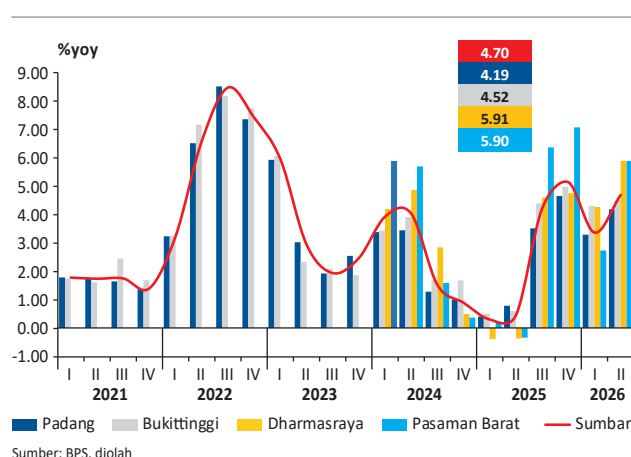
Kabupaten Pasaman Barat mencatat inflasi sebesar 5,90% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,74% (yoy) dan menjadi salah satu daerah dengan inflasi tertinggi di Sumatera Barat. Tingginya inflasi di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, kenaikan harga bensin akibat penyesuaian BBM non-subsidi, serta meningkatnya harga beras. Selain itu, tekanan inflasi juga berasal dari kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Meskipun demikian, inflasi Pasaman Barat tertahan oleh masih rendahnya



harga beberapa komoditas hortikultura dan komoditas protein hewani.

Kabupaten Dharmasraya mencatat inflasi tertinggi di Sumatera Barat sebesar 5,91% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,28% (yoy). Inflasi Dharmasraya terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah, bensin, beras, dan tomat. Selain itu, tingginya inflasi juga dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang masih mencatat tekanan tinggi akibat kenaikan harga emas perhiasan. Kelompok transportasi turut memberikan andil yang cukup besar seiring meningkatnya harga BBM dan biaya perjalanan. Di tengah perkembangan tersebut, tekanan inflasi Dharmasraya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya karena kontribusi kenaikan harga pangan dan energi yang lebih besar.

Sementara itu, Kota Bukittinggi mencatat inflasi sebesar 4,52% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,32% (yoy). Inflasi Bukittinggi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya kenaikan harga cabai merah dan beras. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih menjadi salah satu kontributor utama inflasi akibat tingginya harga emas perhiasan. Tekanan inflasi juga berasal dari kelompok transportasi, terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara dan harga bensin.



Grafik 2.5 Perkembangan Inflasi Spasial Sumatera Barat (% yoy)

Sebagai salah satu pusat perdagangan dan pariwisata di Sumatera Barat, peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat turut mendorong tekanan harga di Kota Bukittinggi selama triwulan II 2026.

2.4. TRACKING INFLASI TRIWULAN III 2026

Hingga Juli 2026, inflasi Sumatera Barat pada awal triwulan III tetap terjaga dan menunjukkan tren perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya. Pada Juli 2026, Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang sebesar 0,50% (mtm) (Grafik 2.6 dan Grafik 2.7). Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat menurun menjadi 4,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 4,70% (yoy). Sementara itu, secara kumulatif inflasi Sumatera Barat hingga Juli 2026 masih relatif rendah sebesar 1,05% (ytd). Perkembangan ini menunjukkan mulai meredanya tekanan harga pangan hortikultura seiring membaiknya kondisi produksi dan distribusi di berbagai sentra utama Sumatera Barat.

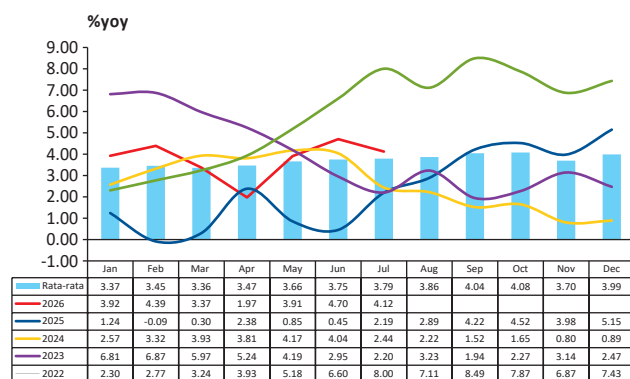
Pada Juli 2026, tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras, bensin, jengkol, cabai rawit, serta jasa pemeliharaan kendaraan. Kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh penyesuaian harga di tingkat peternak setelah periode harga yang relatif rendah pada bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, inflasi bensin masih dipengaruhi oleh dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi yang terjadi pada Juni 2026. Sementara itu, kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari Sumatera Utara akibat gangguan produksi yang disebabkan oleh tingginya curah hujan dan serangan hama. Di sisi lain, kelompok pendidikan juga mulai memberikan tekanan inflasi menjelang tahun ajaran baru melalui penyesuaian biaya sekolah dan bimbingan belajar.

Di sisi lain, tekanan inflasi Juli 2026 tertahan oleh penurunan harga komoditas hortikultura utama, khususnya bawang merah dan cabai merah, seiring



meningkatnya produksi di sentra utama Sumatera Barat seperti Kabupaten Solok dan Tanah Datar serta masuknya pasokan dari daerah pemasok lainnya seperti Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Simalungun. Selain itu, koreksi harga emas perhiasan sejalan dengan penurunan harga emas global turut menahan inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Normalisasi tarif angkutan udara pasca berakhirnya periode libur sekolah juga berkontribusi mengurangi tekanan inflasi dari kelompok transportasi. Dengan perkembangan tersebut, tekanan inflasi pada awal triwulan III 2026 relatif terkendali dan didukung oleh berlanjutnya efektivitas program pengendalian inflasi TPID melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan produktivitas pertanian.

Secara spasial, tekanan inflasi pada Juli 2026 masih relatif tinggi di seluruh daerah sampel inflasi di Sumatera Barat, meskipun menunjukkan tren yang lebih terkendali dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, Kabupaten Dharmasraya mencatat



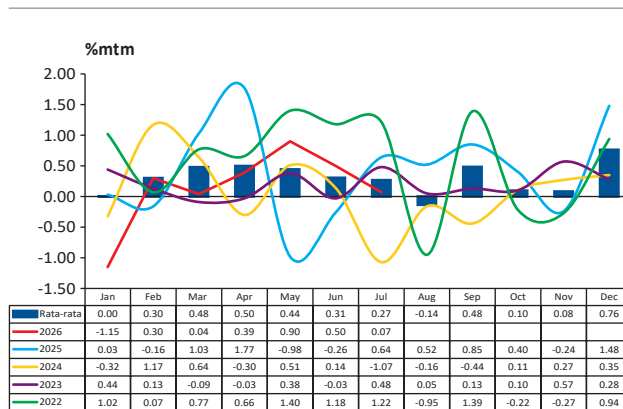
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.6 Historis Inflasi Tahunan Sumatera Barat

Tabel 2.2. Realisasi Inflasi Sumatera Barat dan Kab/Kota Sampel Inflasi pada Juli 2026

	Sumatera Barat	Padang	Bukittinggi	Dharmasraya	Pasaman Barat
%mtm	0,07	0,09	0,28	0,02	-0,04
%ytd	1,05	1,14	1,17	2,59	-0,08
%yoy	4,12	3,82	4,15	4,98	4,68

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.7 Historis Inflasi Bulanan Sumatera Barat

inflasi tertinggi sebesar 4,98% (yoy), diikuti Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,68% (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 4,15% (yoy), dan Kota Padang sebesar 3,82% (yoy). Tingginya inflasi di Kabupaten Dharmasraya terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, bensin, beras, dan tomat. Selain itu, kenaikan harga emas perhiasan juga masih memberikan tekanan pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi Kabupaten Pasaman Barat terutama didorong oleh kenaikan harga cabai merah serta penyesuaian harga energi yang berdampak pada biaya transportasi dan distribusi. Sementara itu, inflasi Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh kenaikan harga daging ayam ras, bensin, serta komponen pendidikan menjelang tahun ajaran baru. Di Kota Padang, inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga bensin, cabai merah, dan sejumlah komoditas jasa, meskipun tekanan harga relatif lebih terbatas dibandingkan daerah lainnya. Di sisi lain, membaiknya pasokan bawang merah dan cabai merah berhasil menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi di seluruh wilayah sampel.



Mencermati perkembangan terkini, inflasi Sumatera Barat pada triwulan III 2026 diperkirakan tetap terkendali. Tekanan inflasi dari sisi permintaan diperkirakan relatif moderat seiring normalisasi konsumsi masyarakat pasca periode HBKN dan libur sekolah. Dari sisi inflasi kelompok transportasi, tekanan inflasi diperkirakan mereda seiring penurunan tarif angkutan udara pasca berakhirnya periode puncak perjalanan serta penurunan *fuel surcharge* terhadap tarif batas atas. Di sisi pasokan, tekanan inflasi relatif tertahan oleh meningkatnya produksi bawang merah dan cabai merah di sentra utama Sumatera Barat seperti Kabupaten Solok dan Tanah Datar serta masuknya pasokan dari daerah pemasok lainnya. Selain itu, berlanjutnya masa panen padi dan komoditas hortikultura di sejumlah wilayah diperkirakan mampu menjaga kecukupan pasokan pangan strategis.

Meskipun demikian, **risiko inflasi tetap perlu dicermati** terutama yang bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras. Selain itu, kenaikan harga energi global, depresiasi nilai tukar rupiah, peningkatan biaya produksi dan distribusi, serta potensi gangguan produksi akibat cuaca ekstrem, serangan hama, dan bencana alam masih berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Dengan mempertimbangkan faktor pendorong dan penahan tersebut serta berlanjutnya sinergi pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, dan peningkatan produktivitas pertanian, inflasi Sumatera Barat pada triwulan III maupun keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy).

2.5. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Memasuki triwulan III 2026, inflasi Sumatera Barat diperkirakan tetap terkendali didukung oleh membaiknya

pasokan pangan hortikultura, berlanjutnya masa panen di sejumlah sentra produksi, serta efektivitas berbagai program pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan pada semester I 2026. Meskipun demikian, risiko inflasi masih perlu diwaspadai terutama yang bersumber dari volatilitas harga pangan strategis, kenaikan harga energi global, depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi, serta risiko gangguan produksi akibat cuaca ekstrem dan serangan organisme pengganggu tanaman. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penguatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan inflasi Sumatera Barat berada dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2026.

TPID Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dalam melaksanakan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta upaya lainnya yang berlandaskan pada kerangka pengendalian inflasi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan terus diperkuat sehingga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran tahun 2026. Adapun langkah pengendalian inflasi yang telah dilaksanakan TPID Provinsi Sumatera Barat pada triwulan II 2026, antara lain:

1) **Penyelenggaraan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar**

Pada triwulan II 2026, TPID Provinsi Sumatera Barat bersama TPID kabupaten/kota terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan, khususnya menjelang HBKN Iduladha 1447 H. Kegiatan dilaksanakan di berbagai wilayah dengan dukungan BULOG, TTIC, Dinas Pangan, kelompok tani, serta pelaku usaha pangan. Secara kumulatif hingga Juni 2026 telah terlaksana 402 kali kegiatan pasar murah di Sumatera Barat yang berkontribusi menjaga



stabilitas harga dan pasokan pangan strategis. Volume penjualan GPM hingga triwulan II tahun 2026 sebesar 267.937 kg yang terdiri dari beras, cabai merah, bawang merah, minyak goreng, gula, dan telur ayam.

2) **HLM TPID Provinsi Sumatera Barat**

HLM TPID Provinsi Sumatera Barat triwulan II dilaksanakan pada 12 Mei 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. Pertemuan membahas perkembangan harga terkini, strategi pengendalian inflasi menjelang Iduladha 1447 H, penguatan neraca pangan, stabilisasi harga, kelancaran distribusi, serta peluncuran aplikasi KIAT Sumbar sebagai instrumen penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah.

3) **Rapat Koordinasi Teknis dan *Capacity Building***

TPID Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi teknis dan *capacity building* dalam rangka memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Kegiatan tersebut antara lain *capacity building* skema kemitraan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) bersama Rumah Tani Nusantara dan PT Pos Indonesia, *capacity building* pemanfaatan aplikasi KIAT Sumbar, *capacity building* & studi banding ke TPID Yogyakarta dan Surakarta, serta berbagai forum koordinasi untuk pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan penguatan pelaporan TPID.

4) **Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD)**

Pada triwulan II 2026 dilakukan penguatan implementasi KAD melalui beberapa kerja sama strategis, antara lain penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman pada 13 April 2026 serta penandatanganan MoU dan PKS KAD antara Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok

pada 17 April 2026. Selain itu, dilakukan fasilitasi transaksi bawang merah antara Kelompok Tani Muaro Danau Diatas Kabupaten Solok dengan Rumah Tani Nusantara sebanyak 8,7 ton sebagai implementasi kemitraan antardaerah.

5) **HLM dan Diseminasi Laporan Pengendalian Inflasi (LPP) di Kabupaten/Kota**

Sepanjang triwulan II 2026, TPID kabupaten/kota secara rutin menyelenggarakan HLM dan rapat koordinasi pengendalian inflasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang diiringi dengan diseminasi perkembangan inflasi serta evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

6) **Fasilitasi Pelatihan Sekolah Lapang DAUN dan Penguatan Kapasitas Petani**

Sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan, KPwBI Sumatera Barat bersama pemangku kepentingan terkait melaksanakan Sekolah Lapang DAUN Tahap II di Kabupaten Pasaman pada tanggal 14-15 April 2026 yang diikuti oleh kelompok tani dan penyuluh pertanian. Kegiatan difokuskan pada peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi hasil panen, perluasan akses pemasaran, serta penguatan kemitraan dengan *agregator* dan *offtaker* guna mendukung stabilitas pasokan pangan daerah.

7) **Dukungan Sarana dan Prasarana kepada Petani**

Pada triwulan II 2026 dilakukan penyaluran berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Bantuan meliputi alat pengolahan lahan, alat pasca panen, sarana angkut hasil pertanian, dan peralatan pendukung lainnya untuk komoditas padi, cabai merah, dan bawang



merah. Hingga Juni 2026, bantuan telah disalurkan kepada 17 kelompok tani guna mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

8) **Penguatan Komunikasi Efektif dan Pengendalian Ekspektasi Inflasi**

TPID dan KPwBI Sumatera Barat terus memperkuat komunikasi publik melalui siaran pers, diseminasi perkembangan inflasi, sosialisasi, edukasi, serta kampanye pengendalian inflasi kepada masyarakat. Komunikasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi harga pangan, menjaga ekspektasi inflasi, mendorong perilaku konsumsi yang bijak, serta mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah. Hingga Juni 2026, kegiatan komunikasi pengendalian ekspektasi inflasi telah dilaksanakan sebanyak 15 kali dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

9) **Penguatan Neraca Pangan melalui Aplikasi KIAT Sumbar**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi daerah, TPID Sumatera Barat mengimplementasikan aplikasi KIAT Sumbar (Kendali Inflasi Aman dan Terjaga di Sumbar) sebagai sarana pemantauan harga, ketersediaan pasokan pangan, distribusi antarwilayah, serta *early warning system* (EWS) terhadap potensi gangguan pasokan dan risiko cuaca. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran.



Halaman ini sengaja dikosongkan







BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 3

PEMBIAYAAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, DAN PEMBIAYAAN UMKM



Stabilitas sektor keuangan di wilayah Sumbar terjaga. Intermediasi perbankan meningkat meski belum optimal diikuti dengan peningkatan kapasitas pembiayaan dan risiko kredit yang terjaga.

Kredit/pembiayaan di Sumatera Barat pada triwulan II 2026 meningkat. Penyaluran kredit Sumatera Barat tercatat Rp83,16 triliun atau tumbuh 6,27% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 yang sebesar 3,62% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit didukung kapasitas pembiayaan yang membaik melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK pada triwulan II 2026 tumbuh 13,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 yang sebesar 9,29% (yoy). Sejalan dengan itu, kualitas kredit tetap terjaga di bawah ambang batas aman. Rasio Non-Performing Loan (NPL) pada triwulan II 2026 tercatat 2,59%, sedikit meningkat dibandingkan posisi triwulan I 2026 yang sebesar 2,50%.

Membaiknya pertumbuhan kredit ditopang penyaluran kredit kepada sektor korporasi. Kredit korporasi tumbuh sebesar 7,27% (yoy) pada triwulan II 2026, membaik signifikan dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 2,35% (yoy). Akselerasi pertumbuhan kredit/pembiayaan bagi korporasi terutama didorong oleh penguatan kredit sektor Pertanian dan Industri Pengolahan. Sebaliknya, berlanjutnya kontraksi penyaluran kredit pada sektor Perdagangan & Akmamin menahan pertumbuhan kredit. Dari sisi kualitas kredit/pembiayaan, rasio NPL sektor korporasi relatif terjaga pada level 3,64%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,58%.

Belum cukup kuatnya aktivitas konsumsi mendorong stagnasi pertumbuhan kredit kepada rumah tangga. Kredit/pembiayaan kepada sektor rumah tangga tumbuh stagnan pada level 5% meski relatif menguat pada level 5,12% (yoy), sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,08% (yoy). Stagnasi pertumbuhan kredit Rumah Tangga dipengaruhi stagnasi pertumbuhan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan berlanjutnya kontraksi Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Di tengah perkembangan penyaluran kredit kepada sektor rumah tangga tersebut, kualitas kredit sektor rumah tangga tetap berada pada level sangat rendah dengan NPL 1,36%, sedikit meningkat dibandingkan posisi triwulan I 2026 yang sebesar 1,29%.

Meski masih terjaga pada porsi di atas 30% dari total penyaluran kredit/pembiayaan perbankan (36,32%), pertumbuhan kredit UMKM masih terkontraksi tipis. Pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar -1,41% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi -1,37% (yoy). Penyaluran kredit UMKM didorong oleh berbalik tumbuh positifnya segmen Usaha Mikro serta terjaganya pertumbuhan pada sektor Pertanian dan Industri Pengolahan, meskipun laju kredit UMKM secara keseluruhan masih tertahan oleh kontraksi pada sektor Perdagangan & Akmamin. Sejalan dengan ini, kualitas penyaluran kredit kepada UMKM justru menunjukkan perbaikan dengan rasio NPL yang membaik menjadi 4,64% pada triwulan II 2026 dari triwulan I 2026 yang sebesar 4,68%.





INDIKATOR TOTAL PERBANKAN

Total Kredit
Sumatera Barat



6,27%

Tw II 2026, yoy

Total NPL
Sumatera Barat



2,59%

Tw II 2026, yoy

Total DPK
Sumatera Barat



13,00%

Tw II 2026, yoy



INDIKATOR RUMAH TANGGA

Kredit Rumah Tangga
Sumatera Barat

5,12%

Tw II 2026, yoy

NPL Rumah Tangga
Sumatera Barat



1,36%

Tw II 2026, yoy

DPK Rumah Tangga
Sumatera Barat



6,25%

Tw II 2026, yoy



INDIKATOR KORPORASI/SWASTA

Kredit Korporasi
Sumatera Barat



7,27%

Tw II 2026, yoy

NPL Korporasi
Sumatera Barat



3,64%

Tw II 2026, yoy

DPK Korporasi
Sumatera Barat



16,64%

Tw II 2026, yoy



INDIKATOR UMKM

Kredit UMKM
Sumatera Barat



-1,41%

Tw II 2026, yoy

NPL UMKM
Sumatera Barat



4,64%

Tw II 2026, yoy

Keterangan:

HIJAU membaik dibandingkan triwulan I 2026

MERAH memburuk dibandingkan triwulan I 2026



3.1. KONDISI UMUM

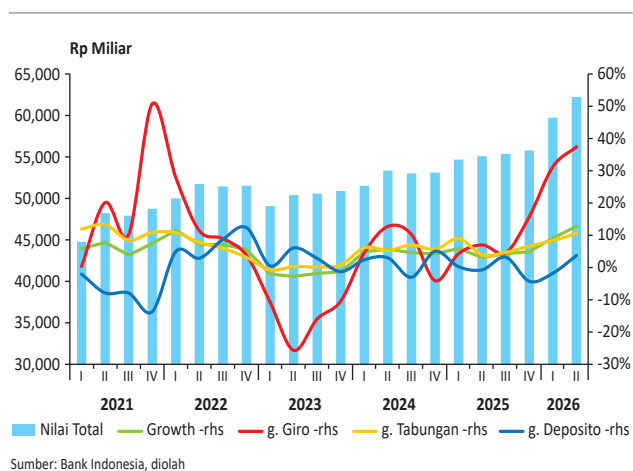
Intermediasi perbankan Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tumbuh namun belum optimal.

Perbaikan kinerja intermediasi terutama ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan pada segmen korporasi khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Sejalan dengan itu, perbaikan profitabilitas dan penjualan korporasi, realisasi belanja pemerintah dalam rangka penyaluran gaji ke-13, belanja sosial, serta terjaganya penghasilan masyarakat khususnya bagi pekerja di sektor pertanian dan perkebunan mendorong peningkatan penghimpunan DPK, khususnya untuk kelompok giro dan tabungan.

Kinerja sektor korporasi cenderung membaik meski tidak merata di mayoritas sektor. Hal ini mendorong peningkatan kinerja kredit/pembiayaan kredit/pembiayaan sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor bangunan dan jasa-jasa. Perbaikan lebih lanjut tertahan oleh masih terkontraksinya kredit/pembiayaan sektor perdagangan dan akomodasi makanan minuman.

Demikian juga dengan sektor rumah tangga. Perbaikan kinerja rumah tangga yang tidak merata menyebabkan permintaan kredit/pembiayaan oleh rumah tangga masih terbatas meskipun tumbuh. Komponen utama kredit pemilikan rumah (KPR) tumbuh stagnan pada level yang relatif rendah sementara pertumbuhan kredit kendaraan bermotor (KKB) meneruskan kontraksi pada triwulan II.

pemerintah dalam rangka gaji ke-13 dan belanja sosial. Total DPK pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp62,39 triliun, tumbuh 13,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 9,29% (yoy) (Grafik 3.1). Akselerasi pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan pertumbuhan seluruh jenis simpanan, terutama giro. Simpanan giro tumbuh 37,72% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2026 yang sebesar 31,57% (yoy) terutama ditopang peningkatan giro perusahaan. Jenis simpanan tabungan yang memiliki pangsa terbesar, yakni 58,17% dari total DPK, juga tumbuh lebih tinggi dari 8,53% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,86% (yoy) pada triwulan II 2026. Selaras dengan itu, jenis simpanan deposito mencatatkan pertumbuhan positif 3,90% (yoy), setelah dalam dua triwulan sebelumnya terkontraksi.

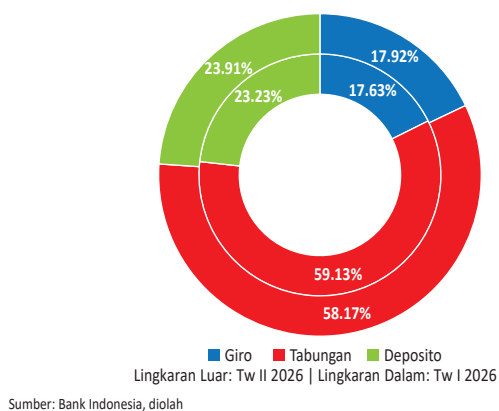


Grafik 3.1 Dana Pihak Ketiga (DPK)

3.2. ASESMEN KINERJA PERBANKAN SUMATERA BARAT

3.2.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kapasitas pembiayaan perbankan di Sumatera Barat membaik didukung berlanjutnya peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) terutama didorong oleh membaiknya penjualan dan profitabilitas korporasi dan penyaluran dana



Grafik 3.2 Komposisi DPK



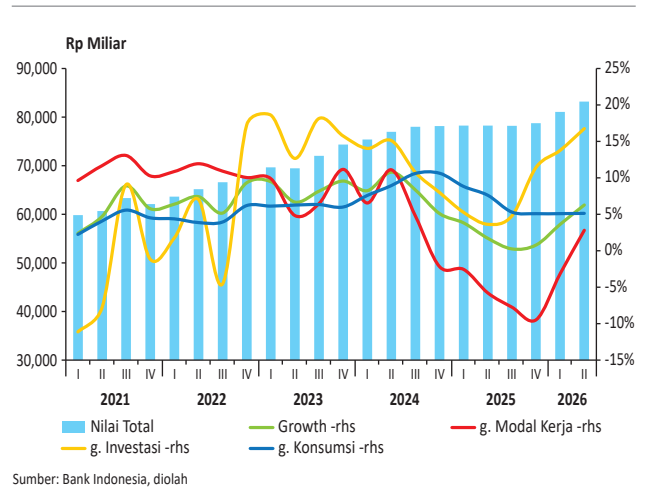
3.2.2. Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Sejalan dengan peningkatan kapasitas pembiayaan, kinerja intermediasi perbankan di Sumatera Barat pada triwulan II 2026 membaik meski belum cukup optimal terutama ditopang penyaluran kredit kepada sektor korporasi. Total penyaluran kredit tercatat Rp83,16 triliun, tumbuh 6,27% (yoy) setelah pada triwulan I 2026 tumbuh 3,62% (yoy). Peningkatan kredit terutama didorong berlanjutnya akselerasi pertumbuhan kredit investasi seiring masih cukup kuatnya kinerja investasi di Sumatera Barat baik dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek rekonstruksi bencana, pembangunan PSN, maupun peningkatan kapasitas usaha swasta khususnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Kredit investasi melanjutkan tren pertumbuhan dua digit sebesar 16,74% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13,76% (yoy).

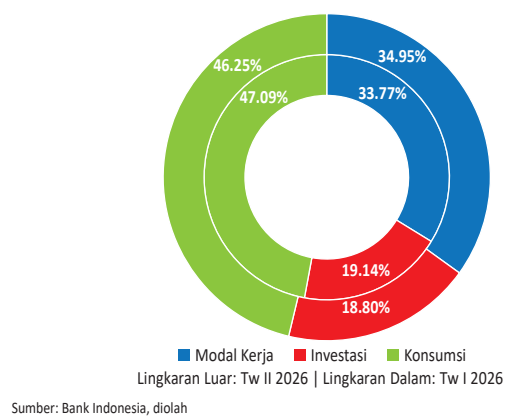
Sejalan dengan perkembangan tersebut, penyaluran kredit modal kerja tumbuh positif namun belum optimal. Penyaluran kredit modal kerja tercatat tumbuh 2,79% (yoy), membaik setelah triwulan sebelumnya masih terkontraksi -3,15% (yoy). Masih belum cukup kuatnya penyaluran kredit modal kerja ini sejalan dengan kinerja sektor perdagangan yang belum cukup kuat pada triwulan II.

Penyaluran kredit konsumsi masih stagnan selaras dengan normalisasi kegiatan konsumsi masyarakat serta kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi. Kredit konsumsi yang memiliki pangsa terbesar, yakni 46,25%, tumbuh 5,12% (yoy), relatif stagnan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 5,08% (yoy).

Membaiknya kapasitas pembiayaan di tengah pertumbuhan kredit yang belum cukup optimal sedikit memperbaiki likuiditas perbankan di Sumatera Barat. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada triwulan II 2026 menurun menjadi 133,3% dari 135,4% pada triwulan sebelumnya. Meskipun demikian, dengan level LDR yang masih berada di atas 100% mengindikasikan bahwa penyaluran kredit di Sumatera Barat ditopang pendanaan perbankan dari luar wilayah Sumatera Barat.

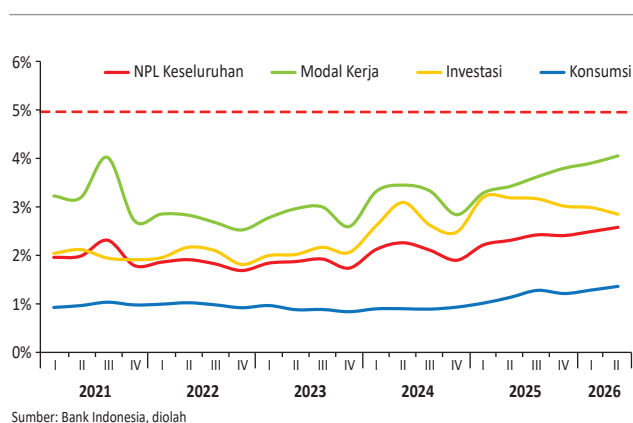


Grafik 3.3 Pertumbuhan Kredit



Grafik 3.4 Komposisi Kredit

Membaiknya intermediasi perbankan didukung oleh kualitas kredit/pembiayaan perbankan yang terjaga. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tercatat di bawah *threshold* 5%, sebesar 2,59%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya 2,50% (Grafik 3.5). Peningkatan rasio NPL terutama terjadi pada jenis kredit modal kerja dan konsumsi sejalan dengan melambatnya aktivitas sektor perdagangan dan tertahannya konsumsi masyarakat. Tercatat rasio NPL kredit modal kerja meningkat dari 3,91% pada triwulan sebelumnya menjadi 4,06%. Demikian pula untuk jenis penggunaan konsumsi. Meski masih relatif rendah, rasio NPL kredit konsumsi meningkat dari 1,29% menjadi 1,36%. Tren peningkatan rasio NPL terjadi pada hampir semua tujuan konsumsi dengan akselerasi tertinggi untuk tujuan Kepemilikan



Grafik 3.5 Rasio NPL Berdasarkan Penggunaan

Kendaraan Bermotor (KKB). Sebaliknya, rasio NPL kredit investasi melanjutkan tren penurunan dari 2,99% menjadi 2,85%, ditopang tetap kuatnya kinerja investasi pada triwulan II 2026. Secara keseluruhan, kualitas kredit perbankan masih relatif terjaga.

3.3. ASESMEN SPASIAL

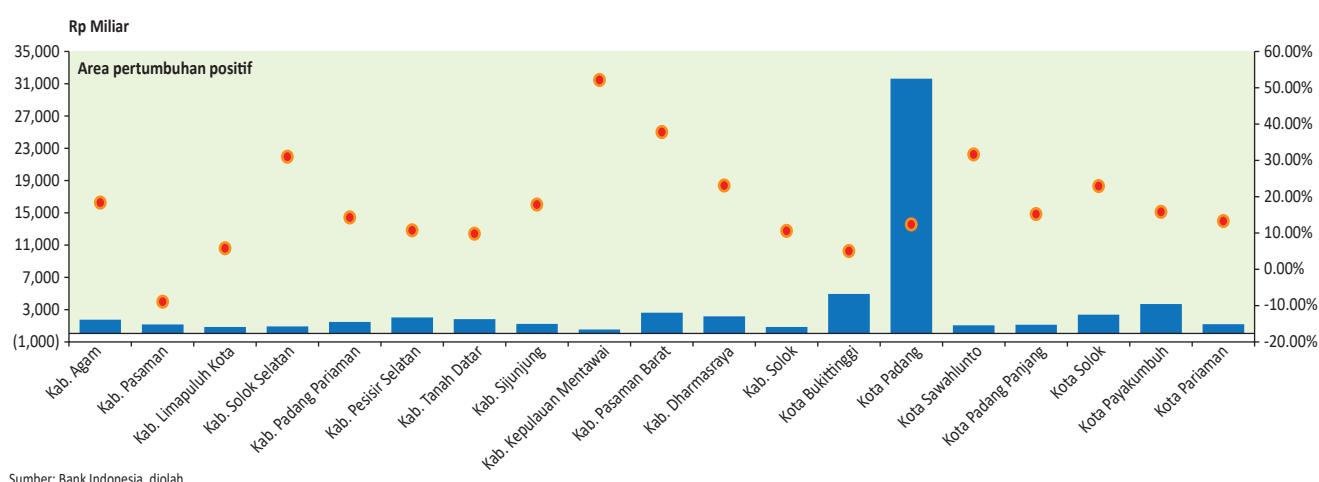
3.3.1. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

Peningkatan pertumbuhan DPK terjaga di mayoritas wilayah. Sebanyak 18 dari 19 kabupaten/kota mencatatkan pertumbuhan tahunan yang positif, dengan Kota Padang tetap menjadi kontributor utama yang memegang pangsa 50,72% dari total DPK Sumatera

Barat. Nominal DPK Kota Padang pada triwulan II 2026 mencapai Rp31,62 triliun, dengan tingkat pertumbuhan yang terakselerasi menjadi 12,22% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,74% (yoy). Di sisi lain, akselerasi pertumbuhan DPK yang sangat signifikan terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai 52,07% (yoy) dan Kabupaten Pasaman Barat 37,70% (yoy), diikuti Kota Sawahlunto 31,53% (yoy) serta Kabupaten Solok Selatan yang tumbuh 30,93% (yoy). Sementara itu, Kabupaten Pasaman menjadi satu-satunya daerah yang mencatatkan penurunan DPK dengan pertumbuhan sebesar -9,08% (yoy) (Grafik 3.6). Pertumbuhan ini, selain ditopang oleh membaiknya penghasilan rumah tangga dan korporasi terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan dan konstruksi juga didukung oleh peningkatan belanja pemerintah pada triwulan II dalam rangka belanja penyaluran gaji ke-13, bantuan sosial, belanja modal, serta belanja modal.

3.3.2. Penyaluran Kredit dan Pembiayaan

Kurang optimalnya penyaluran kredit terjadi di sebagian besar wilayah. Di tengah akselerasi pertumbuhan kredit yang relatif tinggi di Kota Padang (pangsa 31% total kredit di Sumatera Barat) dan beberapa Kota/Kabupaten lainnya, mayoritas wilayah mencatatkan pertumbuhan kredit di bawah dua digit

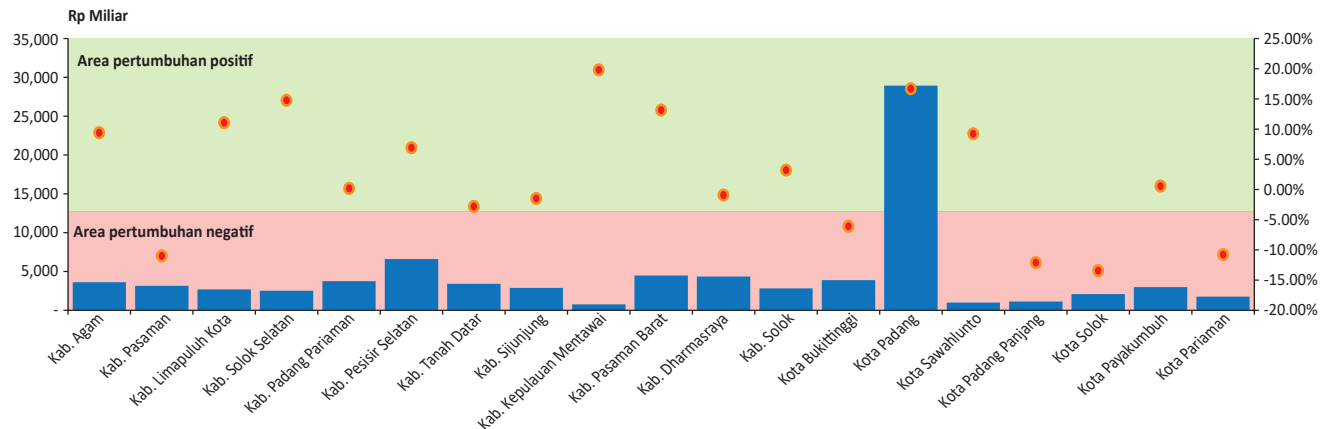


Grafik 3.6 Nilai dan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Menurut Wilayah



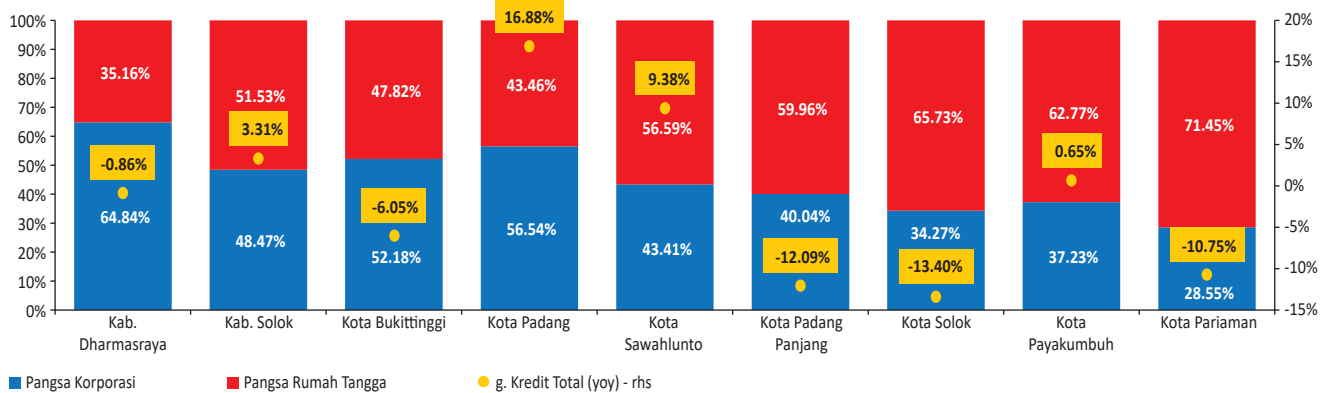
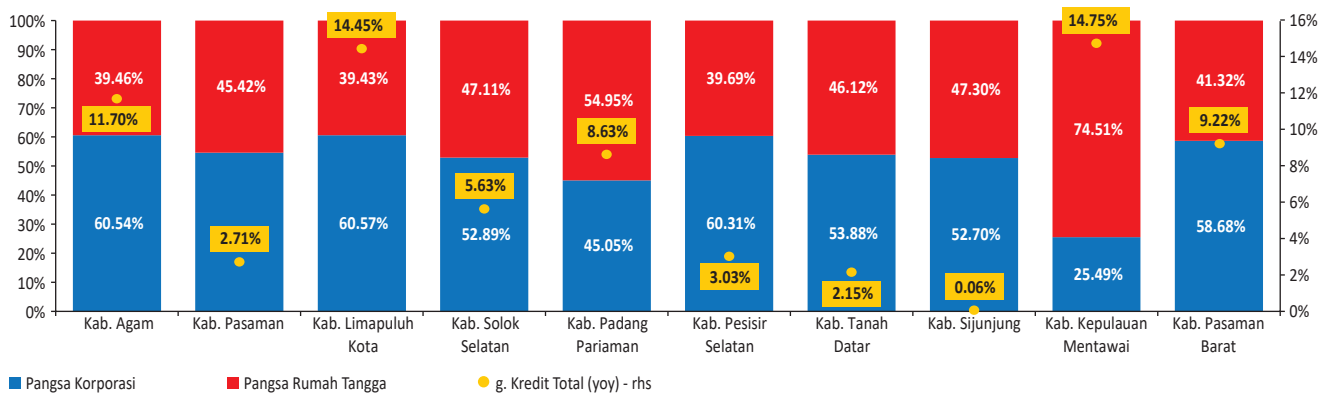
bahkan tumbuh terkontraksi. Di Kota Padang kredit mampu tumbuh sebesar 16,45% (yoy) (Grafik 3.7). Wilayah lainnya yang mencatatkan pertumbuhan kredit relatif tinggi adalah Kabupaten Mentawai (20,04%, yoy), Kabupaten Solok Selatan (14,96%, yoy), dan Kabupaten

Pasaman Barat (13,31%, yoy). Sebaliknya delapan wilayah Kota/Kabupaten lainnya mengalami pertumbuhan kredit yang terkontraksi dengan kontraksi terdalam terjadi di Kota Solok (-13,40%, yoy), Kota Padang Panjang -12,09%, yoy), dan Kabupaten Pasaman (-10,96%, yoy).



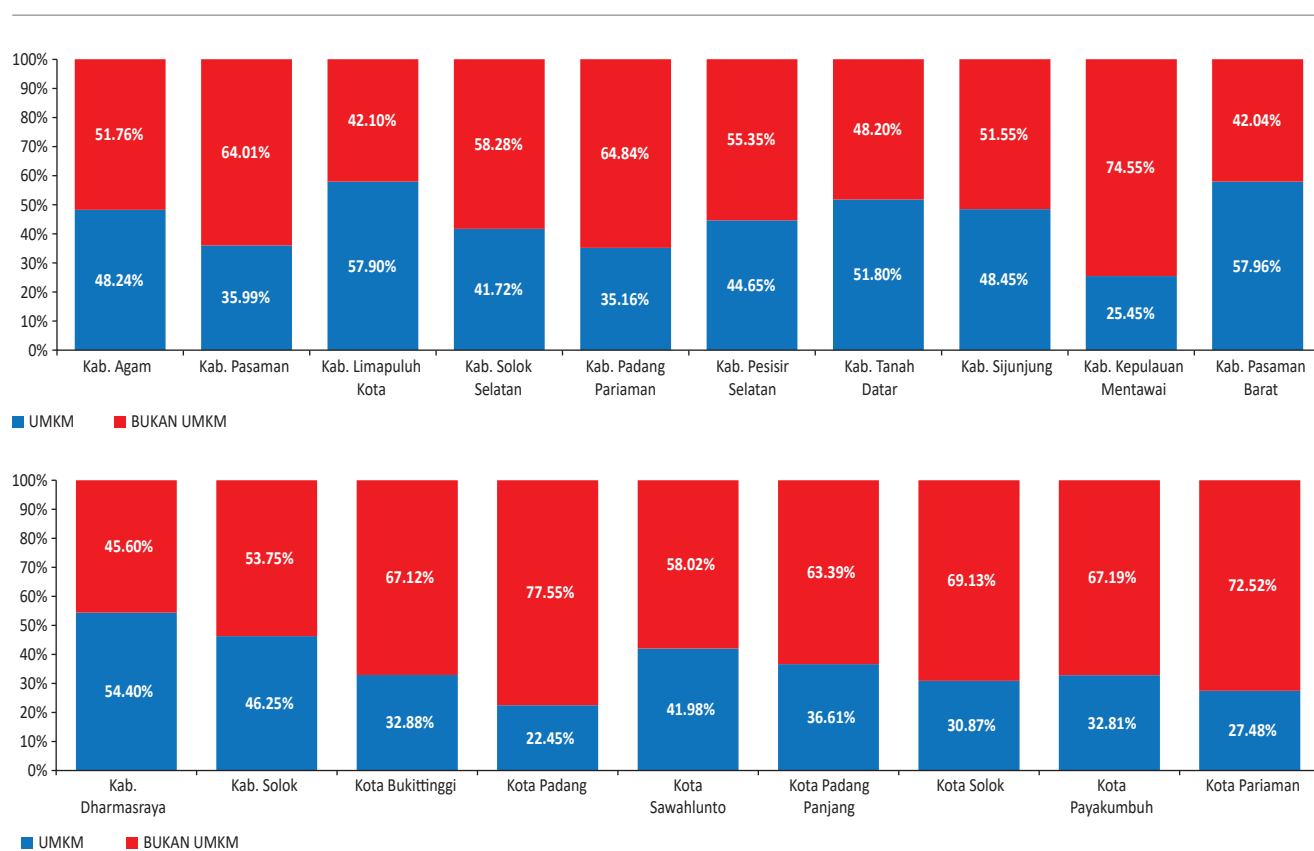
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.7 Nilai dan Pertumbuhan Kredit Menurut Wilayah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.8 Pangsa Kredit Korporasi dan Rumah Tangga berdasarkan Wilayah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

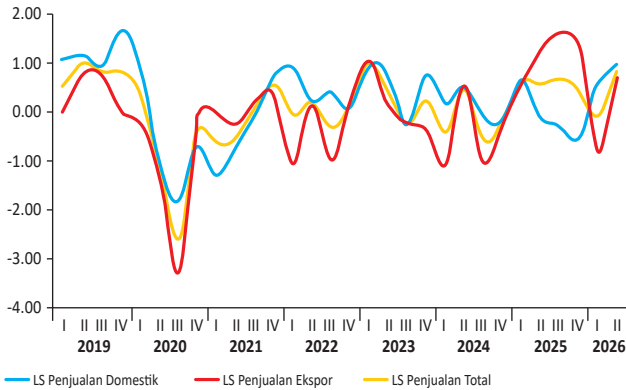
Grafik 3.9 Pangsa Kredit UMKM dan Non UMKM berdasarkan Wilayah

Ditinjau dari skala usahanya, struktur penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Barat pada Juni 2026 mayoritas masih didominasi oleh segmen Bukan UMKM yang memegang pangsa utama di 14 dari 19 kabupaten/kota. Konsentrasi pembiayaan pada segmen Bukan UMKM ini tercatat paling tinggi di Kota Pariaman dengan pangsa mencapai 71,45%, disusul oleh Kota Solok (65,73%) dan Kota Payakumbuh (62,77%), sementara Kota Padang mencatatkan pangsa Bukan UMKM sebesar 56,54%. Di sisi lain, penyaluran kredit yang struktur portofolionya lebih ditopang oleh segmen UMKM terjadi di lima wilayah, dengan pangsa pembiayaan tertinggi berturut-turut dicatatkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai (74,51%), Kabupaten Padang Pariaman (54,95%), Kabupaten Solok (51,53%), Kabupaten Solok Selatan (47,11%), dan Kabupaten Tanah Datar (46,12%).

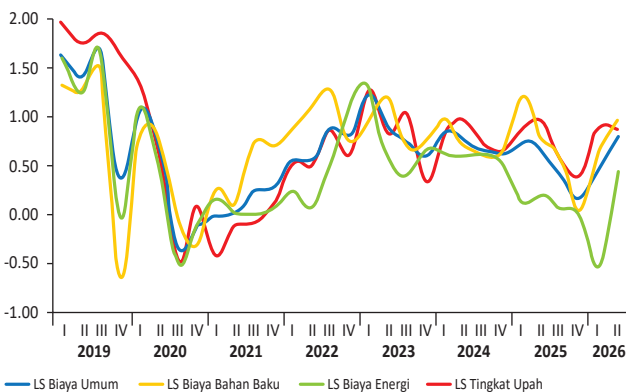
3.4. ASESMEN SEKTOR KORPORASI

3.4.1. Sumber Kerentanan

Membaiknya kinerja korporasi terjadi seiring dengan masih kuatnya penjualan ekspor (Luar Negeri dan antar wilayah) terutama pada sektor pertanian dan perkebunan serta produk turunannya. Di sisi lain, kinerja lebih tinggi dihadapkan tantangan ketidakpastian global, kenaikan harga energi, dan peningkatan biaya *input* akibat depresiasi rupiah. Dengan kondisi tersebut, setelah pada triwulan sebelumnya korporasi masih cenderung menahan harga jual dan memilih mengurangi margin keuntungan, hasil survei Bank Indonesia triwulan II menunjukkan bahwa korporasi telah mulai mentransmisikan kenaikan harga *input* terhadap harga jual (*pass through*) yang



Grafik 3.10 Likert Scale Penjualan



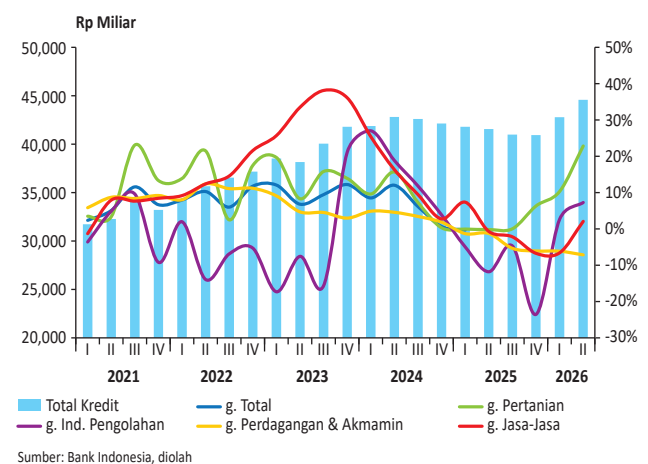
Grafik 3.11 Likert Scale Biaya

mendorong perbaikan profitabilitas korporasi. Sejalan dengan itu, persepsi korporasi relatif optimistis terhadap perekonomian ke depan meski cenderung melambat terutama dipengaruhi tingginya ketidakpastian global.

3.4.2. Eksposur Perbankan dari Sektor Korporasi

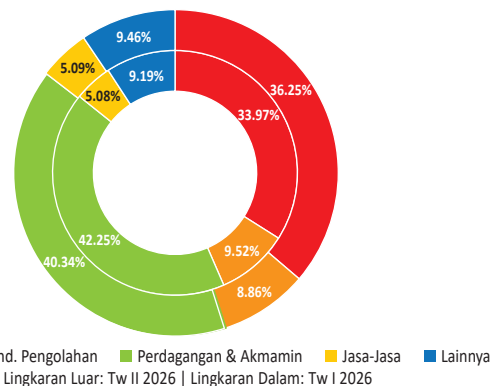
Masih cukup kuatnya permintaan mendorong penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor korporasi di Sumatera Barat tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan kredit korporasi tercatat sebesar 7,27% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 2,35% (yoy) (Grafik 3.12). Dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan terutama didorong oleh akselerasi kredit kepada sektor Pertanian yang tumbuh

sebesar 23,13% (yoy), meningkat tajam dari triwulan sebelumnya 10,54% (yoy). Sementara pertumbuhan penyaluran kredit pada sektor lainnya mengalami perbaikan meskipun belum optimal. Kredit pada sektor industri pengolahan tercatat 7,46% (yoy), naik dari triwulan I 2026 yang sebesar 2,82% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit kepada sektor Jasa-Jasa berbalik tumbuh positif sebesar 2,27% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya berkontraksi -6,44% (yoy). Di sisi lain, sektor dominan yang menyerap 40% kredit perbankan, yakni sektor Perdagangan, Akomodasi Makanan dan Minuman mengalami kontraksi pertumbuhan -7,05% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi -6,04% (yoy) sejalan dengan belum cukup kuatnya konsumsi (Grafik 3.13).



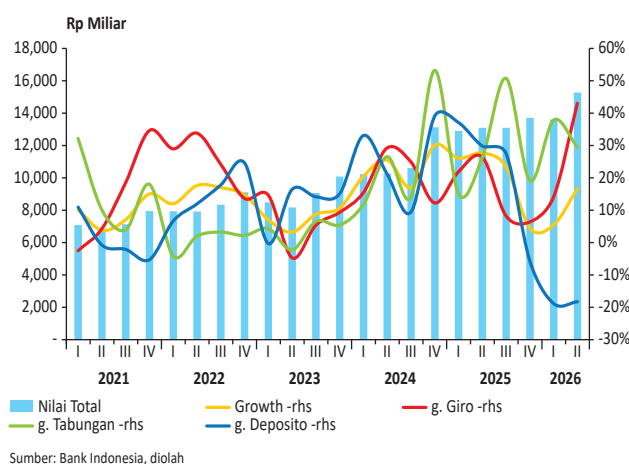
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.12 Kredit Korporasi

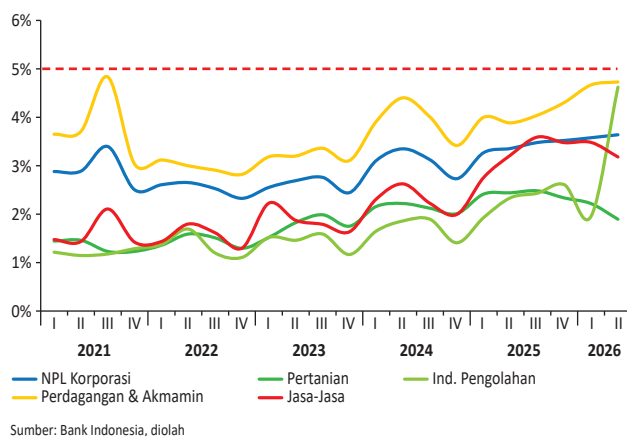


Sumber: Bank Indonesia, diolah

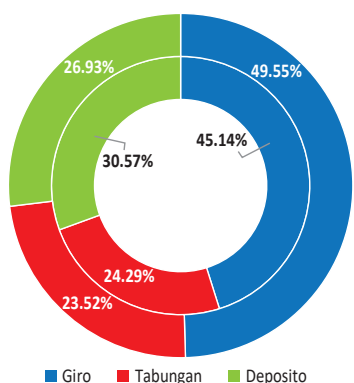
Grafik 3.13 Komposisi Kredit Korporasi



Grafik 3.14 DPK Korporasi



Grafik 3.16 NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.15 Komposisi DPK Korporasi

Sejalan dengan membaiknya penjualan dan profitabilitas sektor korporasi, penghimpunan dana dari sektor korporasi meningkat. Total DPK korporasi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp15,29 triliun atau tumbuh 16,64% (yoy), melonjak tajam dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh sebesar 5,46% (yoy) (Grafik 3.14). Berdasarkan jenisnya dan sesuai kebutuhan penempatan dana oleh korporasi untuk mendukung transaksi, pendorong utama akselerasi DPK korporasi berasal dari jenis simpanan Giro yang tumbuh tinggi 43,12% (yoy), meningkat jauh dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,19% (yoy), dengan pangsa DPK 49,55%. Sementara untuk Jenis simpanan Tabungan juga mencatatkan pertumbuhan tinggi

sebesar 29,54% (yoy) dengan pangsa 23,52%, meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 37,92% (yoy). Di sisi lain, penempatan korporasi untuk jenis simpanan Deposito dengan pangsa 26,93% masih mengalami kontraksi sebesar -18,29% (yoy), relatif stabil dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar -18,86% (yoy) (Grafik 3.15).

Meski secara umum terjadi peningkatan aktivitas korporasi, kualitas penyaluran kredit kepada sektor korporasi sedikit menurun, meski terjaga pada level di bawah 5%. Rasio Non-Performing Loan (NPL) sektor korporasi pada triwulan II 2026 tercatat 3,64%, meningkat dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,58%. Peningkatan terutama terjadi pada sektor industri pengolahan serta akomodasi makanan dan minuman. Berdasarkan jenis penggunaannya, kenaikan NPL bersumber dari kredit Modal Kerja yang naik menjadi 4,06% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 3,91%. Sebaliknya, kualitas kredit Investasi berlanjut membaik yang tercermin dari penurunan rasio NPL menjadi 2,85% dari triwulan I 2026 yang sebesar 2,99%.

NPL sektor Industri Pengolahan meningkat menjadi 4,62% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,96%. Sementara sektor Perdagangan dan Akmamin sedikit naik menjadi 4,73% dari triwulan I 2026 yang sebesar 4,67%. Di sisi lain, seiring kinerja positif LU Pertanian, kualitas kredit sektor Pertanian terus mencatatkan



perbaikan signifikan dengan penurunan rasio NPL menjadi 1,90% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,22%. Rasio NPL sektor Jasa-Jasa juga terpantau membaik menjadi 3,18% dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,48%.

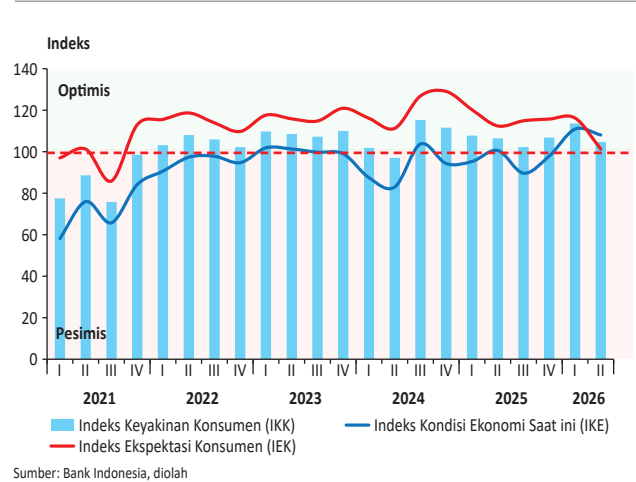
3.5. ASESMEN SEKTOR RUMAH TANGGA

3.5.1. Kondisi Rumah Tangga

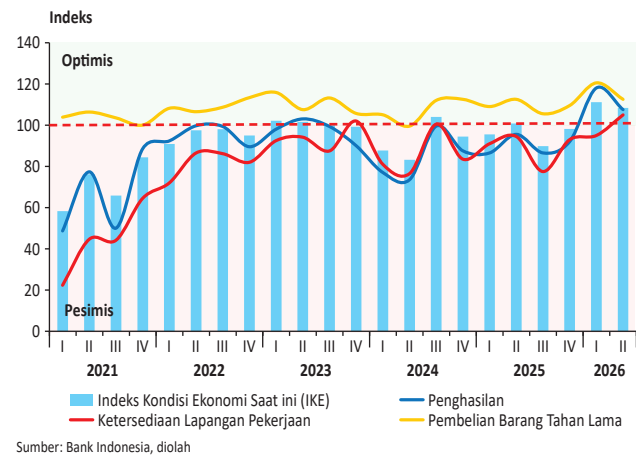
Perkembangan penghasilan dan konsumsi masyarakat melambat seiring dengan pertumbuhan sektoral yang kurang merata. Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat pada sebagian besar sektor cenderung melambat di tengah kenaikan penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dampak meningkatnya kinerja sektor pertanian. Lebih lanjut, meningkatnya realisasi penyaluran belanja pemerintah dalam rangka gaji ke-13, bantuan sosial, serta belanja sosial lainnya menahan perlambatan konsumsi.

Perbaikan penghasilan pada kelompok masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan terindikasi dari perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP). NTP Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tercatat meningkat, dari 129,3 menjadi 132,5. Meski demikian secara keseluruhan, Indeks Penghasilan Konsumen (IPK) menurun dari 118 menjadi 107,50.

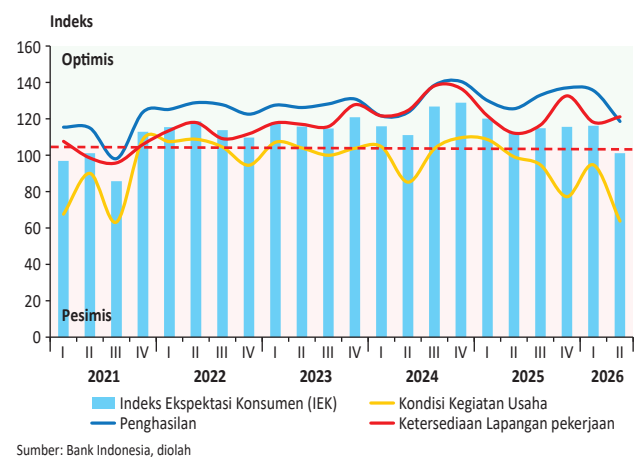
Melambatnya konsumsi terkonfirmasi Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan II 2026 yang menurun menjadi 104,92 dari sebelumnya 113,83 meski masih berada di area optimistik (Grafik 3.17). Penurunan terutama didorong oleh penurunan ekspektasi. Penurunan ekspektasi terutama terjadi pada menurunnya ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), tercatat turun 15 poin dari 116,50 menjadi 101,50 sementara komponen Indeks Kegiatan Ekonomi (IKE) menurun dari 111,17 menjadi 108,33 atau turun 2,83.



Grafik 3.17 Indeks Keyakinan Konsumen



Grafik 3.18 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



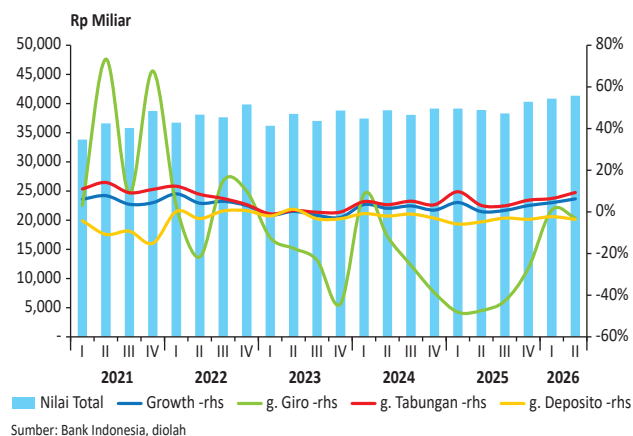
Grafik 3.19 Indeks Ekspektasi Konsumen



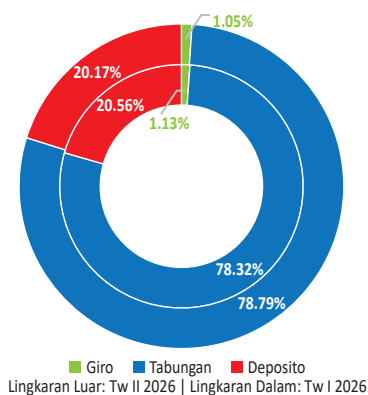
3.5.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Sejalan dengan tingginya belanja pemerintah terutama dalam rangka realisasi gaji ke-13 dan belanja sosial, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh meningkat pada triwulan II 2026.

Total DPK sektor rumah tangga pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp41,28 triliun atau tumbuh sebesar 6,25% (yoy), terakselerasi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2026 yang sebesar 4,40% (yoy) (Grafik 3.20). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang utama oleh simpanan jenis Tabungan yang memiliki pangsa dominan sebesar 78,79% dengan pertumbuhan mencapai 9,25% (yoy), meningkat signifikan dari capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 6,38% (yoy).



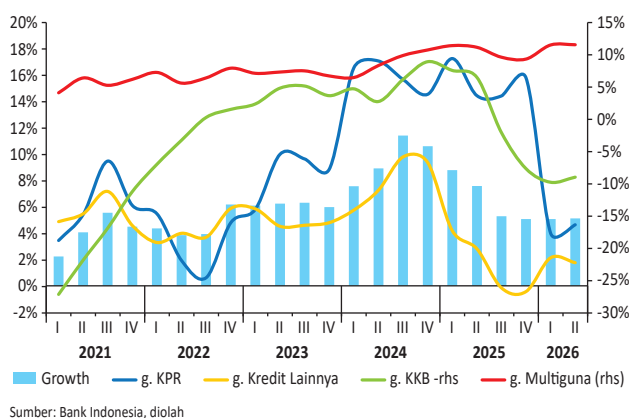
Grafik 3.20 DPK Rumah Tangga



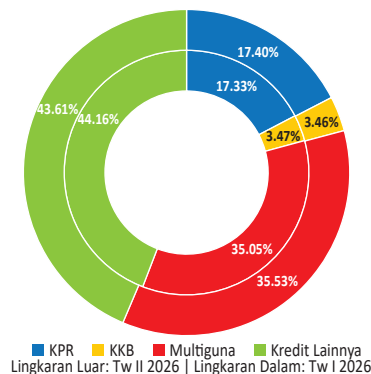
Grafik 3.21 Komposisi DPK RT

Di sisi lain, jenis simpanan Deposito dengan pangsa 20,17% melanjutkan kontraksi. Tercatat Deposito terkontraksi lebih dalam -3,63% (yoy) dibandingkan kontraksi triwulan I 2026 yang sebesar -2,34% (yoy). Sementara itu, Pada jenis simpanan Giro tercatat turun -2,91% (yoy) dengan pangsa 1,05%, dari sebelumnya yang tumbuh 0,85% (yoy) (Grafik 3.21).

Rumah Tangga cenderung selektif dan lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi termasuk konsumsi yang bersumber dari pendanaan perbankan. Pada triwulan II 2026, pertumbuhan kredit rumah tangga tercatat sebesar 5,12% (yoy), relatif stabil dibandingkan capaian triwulan I 2026 yang sebesar 5,08% (yoy) (Grafik 3.22). Stagnasi pertumbuhan kredit konsumsi didorong stagnasi pertumbuhan laju pertumbuhan



Grafik 3.22 Kredit Sektor Rumah Tangga



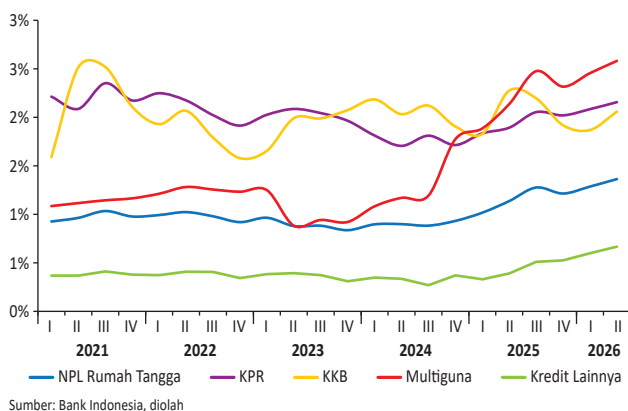
Grafik 3.23 Komposisi Kredit RT



Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Meski meningkat, KPR masih tumbuh rendah di bawah 5% (yoy) yakni 4,64% (yoy) terutama untuk segmen kepemilikan rumah skala menengah. Demikian pula dengan penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang terus mengalami kontraksi -9,00% (yoy) melanjutkan kontraksi triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan relatif tinggi terjadi pada segmen kredit multiguna. Kredit multiguna yang memiliki pangsa sebesar 35,53% dari total kredit rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 11,57% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,53% (yoy). (Grafik 3.23).

Kualitas penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor rumah tangga terus meningkat meski masih relatif rendah. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sektor rumah tangga tercatat sebesar 1,36%, meningkat dibandingkan posisi triwulan I 2026 yang sebesar 1,29% (Grafik 3.24). Rasio NPL tertinggi terjadi pada kredit multiguna yang tercatat 2,58%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,46%. Sejalan dengan itu, rasio NPL KPR juga meningkat menjadi 2,16% dari triwulan I 2026 yang sebesar 2,08%. Rasio NPL Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) meningkat menjadi 2,06% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,87%, serta jenis kredit rumah tangga lainnya yang tercatat sebesar 0,67% dari

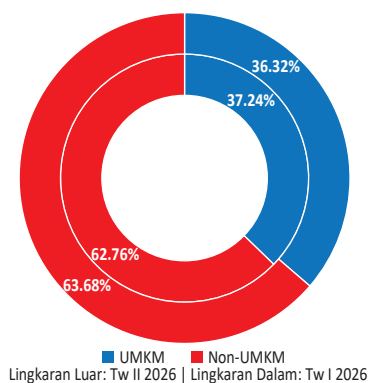


Grafik 3.24 NPL Rumah Tangga

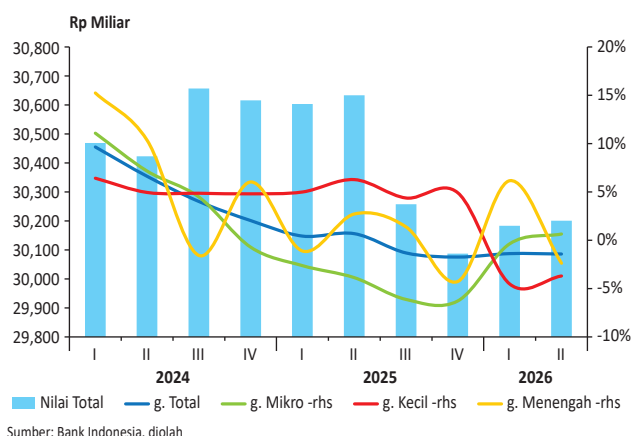
sebelumnya yang sebesar 0,60%. Secara keseluruhan, tingkat risiko kredit sektor rumah tangga di Sumatera Barat tercatat rendah dan berada jauh di bawah ambang batas aman 5,00%.

3.6. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN KEPADA UMKM

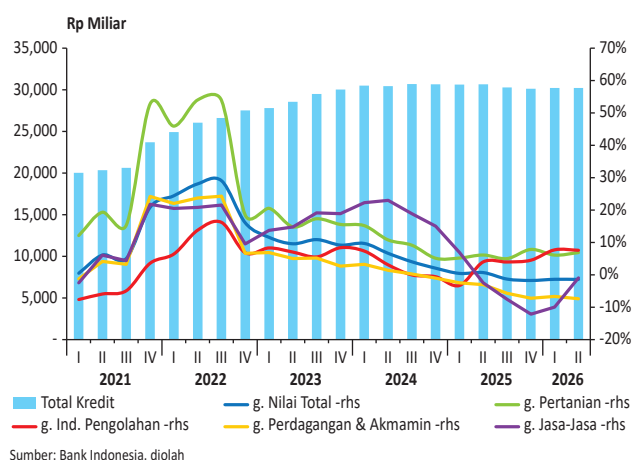
Penurunan alokasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat yang disertai dengan fokus perbankan untuk memperbaiki kualitas kredit UMKM serta permintaan kredit UMKM yang terbatas sejalan dengan perlambatan ekonomi mendorong kontraksi penyaluran kredit/pembiayaan kepada UMKM di Sumatera Barat berlanjut pada triwulan II 2026. Total kredit UMKM tercatat sebesar Rp30,20 triliun atau terkontraksi sebesar -1,41% (yoy), relatif dalam dibandingkan triwulan I 2026 yang terkontraksi sebesar -1,37% (yoy). Kontraksi penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh kehati-hatian bank yang cenderung lebih selektif dalam penyaluran kredit baru serta berfokus pada perbaikan kualitas portofolio kredit UMKM. Berlanjutnya kontraksi tersebut menyebabkan porsi penyaluran kredit yang dialokasikan kepada sektor UMKM menurun menjadi 36,32% pada triwulan II 2026 dari triwulan sebelumnya yang sebesar 37,24% (Grafik 3.25).



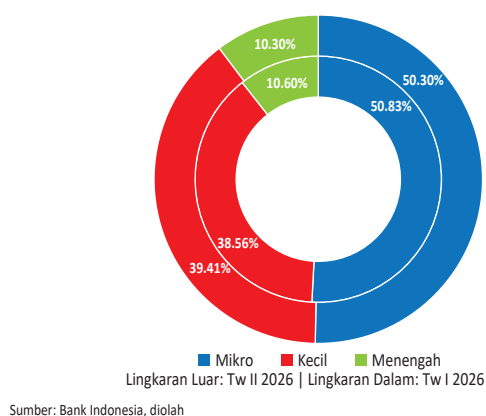
Grafik 3.25 Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



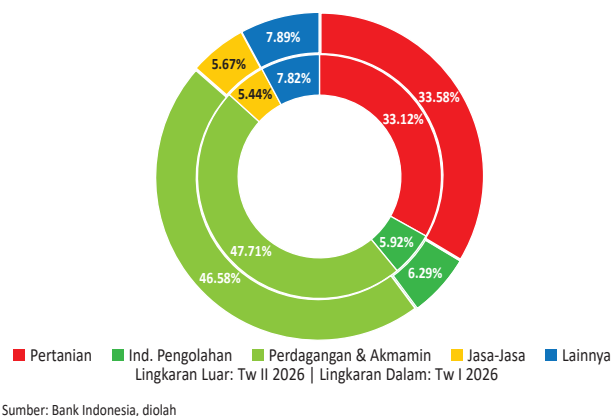
Grafik 3.26 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha



Grafik 3.28 Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha



Grafik 3.27 Komposisi Kredit Berdasarkan Skala Usaha



Grafik 3.29 Komposisi Kredit UMKM Berdasarkan Lapangan Usaha

Terus melambatnya kontraksi penyaluran kredit terutama bersumber dari segmen usaha kecil dan segmen menengah. Kontraksi Usaha Kecil berlanjut -3,70% (yoy), meski membaik dibandingkan triwulan I 2026 yang berkontraksi -4,52% (yoy). Selain itu, penyaluran kredit segmen usaha menengah berbalik berkontraksi sebesar -2,37% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya sempat tumbuh positif 6,18% (yoy). Kontraksi lebih dalam tertahan oleh membaiknya penyaluran kredit/pembiayaan segmen usaha mikro yang berbalik tumbuh positif sebesar 0,66% (yoy) dari sebelumnya yang berkontraksi -0,36% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.26).

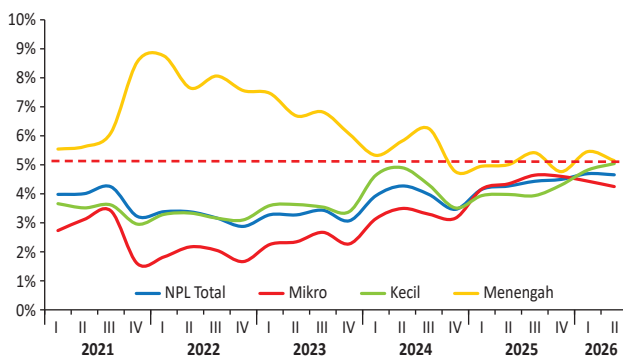
Kontraksi pertumbuhan kredit/pembiayaan UMKM terutama didorong oleh masih terkontraksinya Sektor Perdagangan & Ak.Mamin. Kredit pada lapangan usaha perdagangan dan akomodasi makan minum (akmamin) dengan kontribusi terbesar yakni 46,58% dari total kredit UMKM (Grafik 3.28), mencatatkan kontraksi sebesar -7,42% (yoy), sedikit memperdalam kontraksi dari triwulan I 2026 yang sebesar -6,71% (yoy). Sebaliknya, penyaluran kredit UMKM bagi Sektor Pertanian terakselerasi dari 6,09% (yoy) menjadi 6,86% (yoy) (Grafik 3.29). Laju penyaluran kredit/pembiayaan UMKM juga ditopang oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh stabil sebesar 7,56% (yoy). Sementara itu, kontraksi pada lapangan usaha jasa-jasa membaik signifikan dari -9,94% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi -0,95% (yoy) pada triwulan II 2026.



Upaya perbankan untuk fokus memperbaiki kualitas kredit UMKM mendukung perbaikan rasio NPL UMKM meski masih rentan melewati *threshold* 5%.

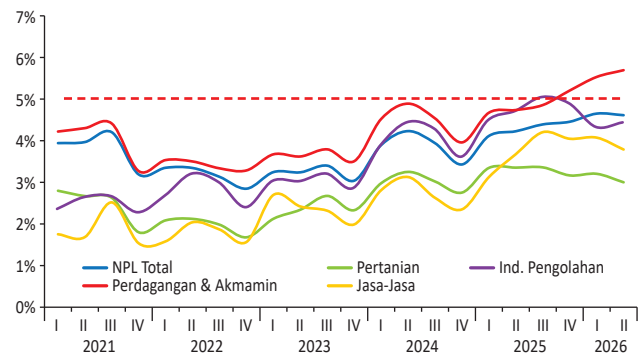
Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) kredit/pembiayaan UMKM triwulan II 2026 membaik ke level 4,64%, sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang berada di angka 4,68%. Perbaikan kualitas kredit terjadi pada segmen usaha mikro dan menengah, sementara segmen usaha kecil mengalami kenaikan rasio NPL. Rasio NPL segmen Usaha Mikro tercatat menurun menjadi 4,23% dari triwulan I 2026 yang sebesar 4,42%. Demikian halnya pada segmen Usaha Menengah yang membaik menjadi 5,12% dari sebelumnya 5,43%. Sebaliknya, rasio NPL pada segmen Usaha Kecil meningkat menjadi 5,02% dari sebelumnya 4,80% (Grafik 3.30).

Secara sektoral, perbaikan kualitas kredit terutama didorong oleh Sektor Pertanian dengan rasio NPL yang membaik menjadi 3,02% dari posisi kuartal lalu sebesar 3,22% sejalan dengan meningkatnya kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Sebaliknya, peningkatan rasio NPL terjadi pada Sektor Perdagangan dan Akmamin yang naik menjadi 5,72% dari triwulan I 2026 yang sebesar 5,56%, serta Sektor Industri Pengolahan yang sedikit meningkat menjadi 4,46% dari sebelumnya 4,35% sejalan dengan perlambatan sektor-sektor tersebut (Grafik 3.31).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.30 NPL Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.31 NPL Berdasarkan Lapangan Usaha

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas kredit UMKM Sumatera Barat.

Peningkatan akses keuangan dilakukan dengan melakukan intermediasi antara pelaku UMKM dan perbankan untuk mengatasi informasi yang tidak seimbang antara UMKM dan perbankan. Upaya-upaya tersebut termasuk melakukan pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang dapat digunakan untuk mempermudah pencatatan laporan keuangan guna mendukung peningkatan akses pembiayaan dari perbankan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga memiliki *database* profil UMKM (BISAID) yang berisi informasi UMKM tersebut dan dapat digunakan oleh lembaga keuangan bank dan bukan bank dalam melakukan fungsi intermediasi dan melakukan pembiayaan. Selain itu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembinaan, pendampingan, sampai dengan *business matching*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM sehingga dapat bersaing di pasar global.



Boks 2

SUMATERA BARAT CREATIVE ECONOMY FESTIVAL 2026

Mengakselerasi Daya Saing Ekonomi Kreatif Sumatera Barat

Pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka peluang perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan keterhubungan antar sektor dalam perekonomian daerah.

Ekonomi kreatif Sumatera Barat memiliki karakteristik yang kuat pada pemanfaatan kekayaan budaya dan sumber daya lokal, antara lain melalui produk wastra dan fesyen, kriya, kuliner, kopi, serta berbagai produk kreatif lainnya. Potensi tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapasitas usaha, penguatan kualitas dan *branding* produk, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar agar produk kreatif daerah mampu bertransformasi dari produk berbasis lokal menjadi produk yang memiliki daya saing lebih luas. Sejalan dengan hal tersebut, penguatan ekosistem menjadi penting untuk memastikan pelaku usaha tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki akses terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan jejaring usaha.

Dalam konteks Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat melalui *framework* **DAUN (Dari nAgari Untuk Negeri)** terus mendorong peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM melalui pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan kapasitas produksi, pengembangan model bisnis, digitalisasi dan pemanfaatan QRIS, fasilitasi pembiayaan, hingga perluasan akses pasar dan ekspor. Penguatan tersebut kemudian diorkestrasi melalui penyelenggaraan **Sumatera Barat Creative Economy Festival (SCF) 2026** sebagai *platform* yang mempertemukan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dengan pemerintah daerah, perbankan, *buyer*, akademisi, komunitas, serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut sejalan

dengan arah SRP 2026 yang menekankan optimalisasi *outcome*, sinergi, efisiensi sumber daya, dan penguatan dampak program.

Sumatera Barat *Creative Economy Festival* (SCF) 2026 diselenggarakan pada 28–30 Agustus 2026 di *Grand Ballroom* Pangeran Beach Hotel, Kota Padang, dengan mengusung tema “*Creative Culture for Digital and Sustainable Future: Mendorong Daya Saing Ekonomi Kreatif Sumatera Barat Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital*”. SCF 2026 merupakan salah satu *Strategic Regional Program* (SRP) KPwBI Sumatera Barat yang dirancang untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM dengan digitalisasi, perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, serta penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

SCF 2026 dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu **SCF Fair, SCF Competition, dan SCF Forum**. SCF *Fair* menampilkan produk unggulan ekonomi kreatif Sumatera Barat melalui zona tematik yang mencakup wastra dan fesyen, gastronomi, kopi dan teh, *green creative*, produk unggulan, serta edukasi Bank Indonesia. Melalui kurasi produk dan interaksi langsung dengan konsumen, kegiatan ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan promosi dan penjualan, tetapi juga memperkuat *branding*, kualitas produk, serta kesiapan UMKM memasuki pasar yang lebih luas.

SCF *Forum* menjadi ruang dialog dan penguatan kapasitas yang mempertemukan pelaku UMKM dengan perbankan, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha. Berbagai topik strategis diangkat, antara lain UMKM *go export*, digitalisasi dan perlindungan data, ekonomi hijau dan sirkuler, ekonomi dan keuangan syariah, literasi keuangan, serta kesehatan. Sementara



itu, SCF *Competition* menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus mengembangkan kreativitas melalui berbagai kompetisi yang melibatkan UMKM, perbankan, komunitas, organisasi wanita, dan masyarakat.

Selain tiga pilar tersebut, SCF 2026 juga memperkuat **linkage UMKM dengan pasar dan sumber pembiayaan** melalui *business matching* ekspor dan pembiayaan, promosi serta penjualan produk UMKM, dan keterlibatan *buyer* serta dunia usaha. Pendekatan ini menempatkan SCF tidak hanya sebagai ruang ekshibisi, tetapi sebagai **platform penguatan ekosistem ekonomi kreatif** yang menghubungkan pelaku usaha dengan peluang pasar, pembiayaan, dan jejaring bisnis.

Pelaksanaan SCF 2026 juga terintegrasi dengan **Pekan QRIS Nasional (PQN) 2026**, yang memperkuat dimensi digitalisasi dalam ekosistem ekonomi kreatif. Integrasi tersebut dilakukan melalui edukasi dan *onboarding merchant* serta pengguna QRIS, aktivasi transaksi digital, *QRIS Experience*, serta *showcasing* implementasi QRIS TAP. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya ditempatkan sebagai materi edukasi, tetapi diimplementasikan secara langsung dalam aktivitas transaksi selama penyelenggaraan festival.

Pelaksanaan SCF 2026 menghasilkan sejumlah capaian dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif Sumatera Barat. Dari sisi akses pasar, kegiatan *business matching* berhasil mempertemukan sebanyak lebih dari 30 UMKM dengan 5 *buyer*/mitra usaha, dengan potensi transaksi sebesar lebih dari Rp690 juta, termasuk melalui peninjauan kurasi produk dan peluang kemitraan retail bersama Sarinah. Dari sisi pembiayaan, *business matching* dengan lembaga keuangan menghasilkan komitmen pembiayaan sebesar lebih dari Rp101 miliar.

Dari sisi perluasan pasar global, SCF 2026 turut memfasilitasi UMKM dalam realisasi ekspor dengan nilai lebih dari Rp2.1 miliar menuju Amerika Serikat, Jepang, dan Perancis. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berhenti pada peningkatan kapasitas produksi dan promosi, tetapi mulai diarahkan pada penguatan *market linkage* dan integrasi UMKM ke rantai perdagangan yang lebih luas.

Sementara itu, dari sisi transaksi dan aktivitas ekonomi, SCF *Fair* melibatkan lebih dari 80 UMKM binaan dan mitra dan mencatat total transaksi penjualan *offline* sebesar lebih dari Rp2.14 miliar dengan jumlah pengunjung mencapai lebih dari 8.000 orang.

Dari sisi peningkatan kapasitas dan partisipasi publik, SCF 2026 menghadirkan 13 sesi forum/*talkshow*/*workshop* dengan jumlah peserta 1.444 orang, serta 4 kategori kompetisi yang diikuti oleh 350 peserta. Berbagai aktivitas tersebut memperluas ruang interaksi antara pelaku ekonomi kreatif, konsumen, komunitas, perbankan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan SCF 2026 memperkuat peran ekonomi kreatif sebagai salah satu alternatif sumber pertumbuhan ekonomi daerah melalui integrasi kreativitas, digitalisasi, perluasan akses pasar, pembiayaan, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan tersebut, SCF tidak hanya menjadi ajang promosi produk lokal, tetapi menjadi arena akselerasi dan konsolidasi berbagai program pengembangan UMKM berbasis nagari untuk mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk Sumatera Barat.





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN RUPIAH



Velositas sistem pembayaran tetap kuat. Meski demikian, akselerasi dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran belum cukup kuat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Aktivitas transaksi retail melalui uang elektronik maupun transaksi tunai cenderung melambat di tengah penguatan transaksi wholesale dan akselerasi transaksi digital.

Transaksi wholesale meningkat menopang berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), rekonstruksi infrastruktur bencana, dan peningkatan belanja pemerintah pada triwulan II. Sebaliknya normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan transaksi retail baik tunai maupun non tunai sejalan dengan perlambatan konsumsi rumah tangga.

Berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan meningkatkan kecepatan peredaran uang (velocity of money), Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Perluasan digitalisasi di antaranya melalui perluasan adopsi digital, Pekan QRIS Nasional (PQN), QRIS Goes to School and Campus, Pasar SIAP QRIS (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai QRIS), dan kegiatan lainnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi yang masif bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun nonbank, serta dukungan pemerintah daerah, turut memperkuat penetrasi adopsi QRIS. Upaya ini juga diperluas melalui kampanye QRIS Jelajah Indonesia dan implementasi QRIS lintas batas, yang memperluas layanan hingga ke luar negeri.

Sementara itu, berkenaan dengan upaya menjaga ketersediaan uang layak edar dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat pelaksanaan Clean Money Policy melalui kegiatan kas keliling dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) hingga ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), pemusnahan uang tidak layak edar, serta kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Selain itu, berbagai langkah edukatif dan preventif untuk meminimalisir peredaran uang palsu juga dilakukan secara berkesinambungan, termasuk melalui aktivasi Tim Buru Sergap Uang Palsu (TIMBUL) dan kerja sama erat dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).





4.1. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

Transaksi *wholesale* menjadi penopang utama pertumbuhan transaksi sistem pembayaran non-tunai di Sumatera Barat triwulan II 2026. Peningkatan aktivitas transaksi ini sejalan dengan progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur, aktivitas investasi bangunan, dan ekspansi belanja pemerintah yang masih cukup kuat. Sebaliknya, di tengah akselerasi transaksi digital, aktivitas sistem pembayaran retail baik yang bersumber dari *good fund* maupun *deferred payment* cenderung mengalami perlambatan seiring belum cukup kuatnya konsumsi pada triwulan II 2026.

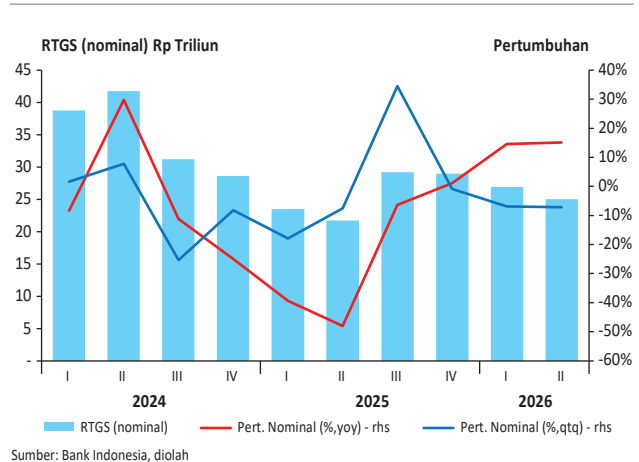
4.1.1. Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Transaksi RTGS tumbuh stabil ditopang pertumbuhan sektor-sektor utama di Sumatera Barat serta masih cukup kuatnya dorongan belanja pemerintah seiring progres penyelesaian PSN, rehabilitasi bencana, dan belanja pemerintah dalam rangka pembayaran gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri; belanja dalam rangka MBG, sekolah rakyat, KDMP; serta Bantuan Sosial Reguler maupun Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana. Nilai transaksi RTGS triwulan II 2026 tercatat Rp25,01 triliun atau tumbuh 15,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya 14,59% (yoy) (Grafik 4.1). Dari sisi volume, transaksi RTGS tercatat sebanyak 11,82 ribu transaksi, meningkat 4,67% (yoy) dan 5,08% (qtq) (Grafik 4.2).

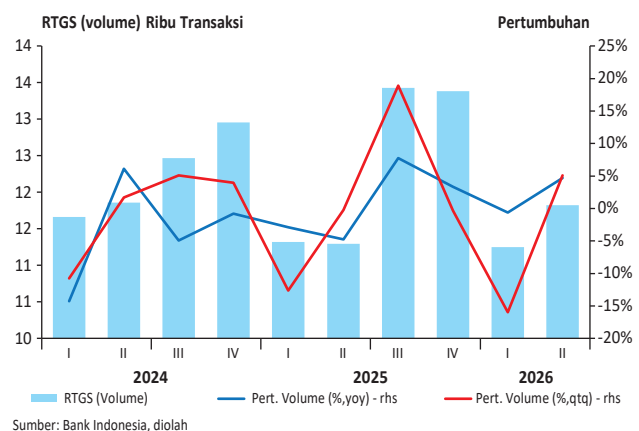
Tabel 4.1. Perkembangan Transaksi Non Tunai Sumatera Barat

Pembayaran Non-Tunai	Nilai Transaksi (Rp Triliun)		Volume Transaksi		Rata-Rata Nilai / Volume	
	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2026	Tw II 2026	Tw I 2026	Tw II 2026
BI-RTGS	26,93	25,01	11.250	11.822	2.393.777.777,78	2.115.124.344,44
SKNBI	1,14	1,24	17.754	18.405	63.995.418,47	67.293.977,56
BI-FAST	50,10	52,42	21.239.854	22.910.344	2.358.902,92	2.287.966,38
KARTU ATM/DEBIT	32,87	32,19	24.884.178	24.208.760	1.321.027,50	1.329.690,70
KARTU KREDIT	0,32	0,36	338.825	381.298	935.119,20	952.708,33
QRIS	2,79	3,25	24.874.957	37.707.238	112.005,97	86.308,16
UANG ELEKTRONIK	1,60	1,61	16.547.629	26.966.618	96.909,79	59.724,44

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Grafik 4.1 Perkembangan Nominal BI-RTGS di Sumatera Barat



Grafik 4.2 Perkembangan Volume BI-RTGS di Sumatera Barat

Pertumbuhan transaksi RTGS didukung oleh berlanjutnya transaksi pembayaran skala besar terutama oleh korporasi dan pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan kinerja investasi tumbuh kuat sebesar 7,03% (yoy) serta belanja pemerintah pada triwulan II yang tumbuh 9,84% (yoy).



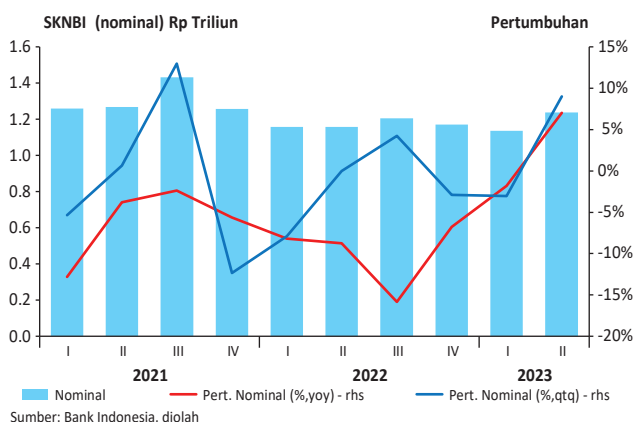
4.1.2. Transaksi Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Transaksi melalui SKNBI menunjukkan perbaikan dari sisi nominal, meskipun secara volume masih terkontraksi. Nilai transaksi SKNBI pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,24 triliun, tumbuh 7,03% (yoy) setelah mengalami kontraksi sejak paruh kedua tahun 2021 (Grafik 4.3). Seiring dengan itu, volume transaksi terus mengalami kontraksi meski mengecil. Secara volume, tercatat volume transaksi sebanyak 18,41 ribu transaksi atau menurun -4,68% (yoy) (Grafik 4.4). Secara fundamental, penurunan volume transaksi SKNBI terutama dipengaruhi proses substitusi dampak semakin berkembangnya instrumen pembayaran berbasis

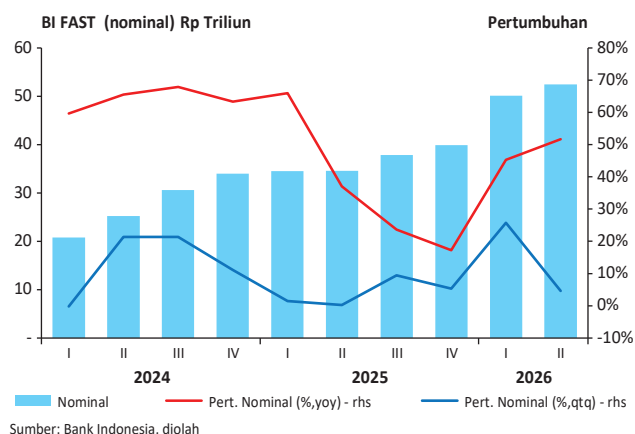
elektronik, khususnya BI-FAST, yang menawarkan layanan transfer dana secara *real-time* dengan biaya yang lebih rendah.

4.1.3. Transaksi Melalui Bank Indonesia – Fast Payment (BI – FAST)

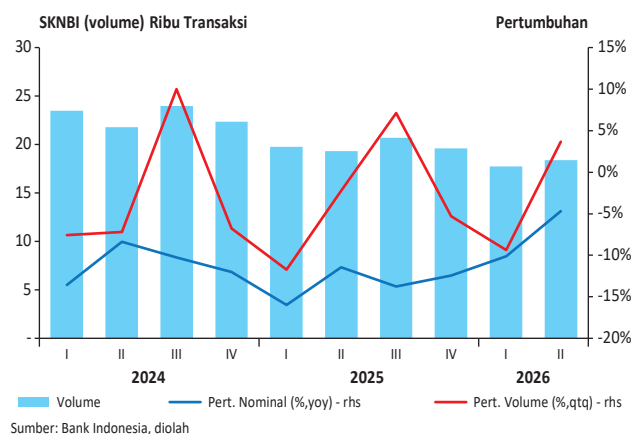
Pertumbuhan transaksi BI-FAST berlanjut ditopang pertumbuhan beberapa sektor utama yang tetap tumbuh di antaranya akomodasi makan dan minum, perdagangan, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Nilai transaksi BI-FAST pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp52,42 triliun, tumbuh 51,66% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I yang sebesar



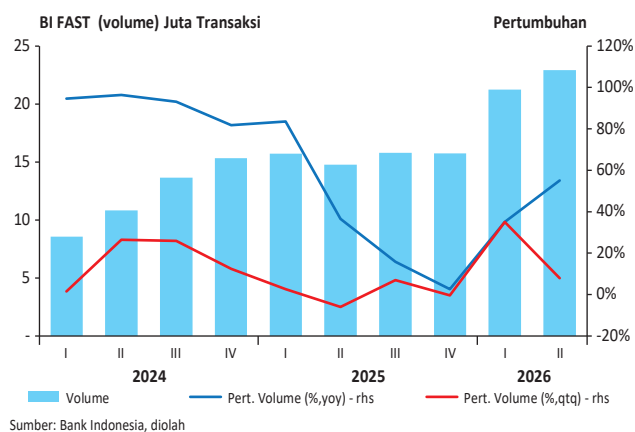
Grafik 4.3 Perkembangan Nominal SKNBI di Sumatera Barat



Grafik 4.5 Perkembangan Nominal BI FAST di Sumatera Barat



Grafik 4.4 Perkembangan Volume SKNBI di Sumatera Barat



Grafik 4.6 Perkembangan Volume BI FAST di Sumatera Barat



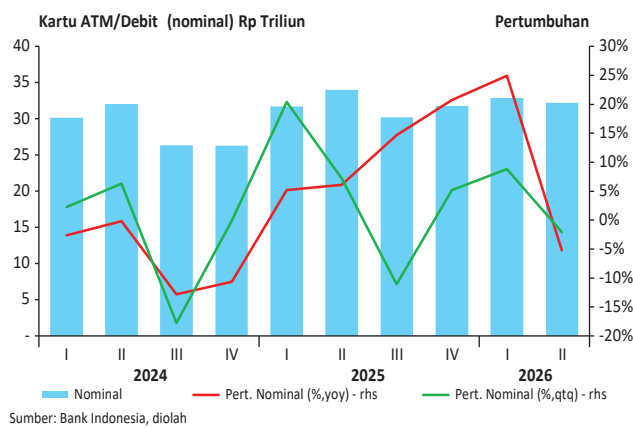
45,27% (yoy) (Grafik 4.5). Peningkatan juga terjadi pada sisi volume. Volume transaksi BI-FAST tercatat sebanyak 22,91 juta transaksi, meningkat 55,01% (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan volume triwulan I yang sebesar 35,07% (yoy) (Grafik 4.6).

4.1.4. Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik

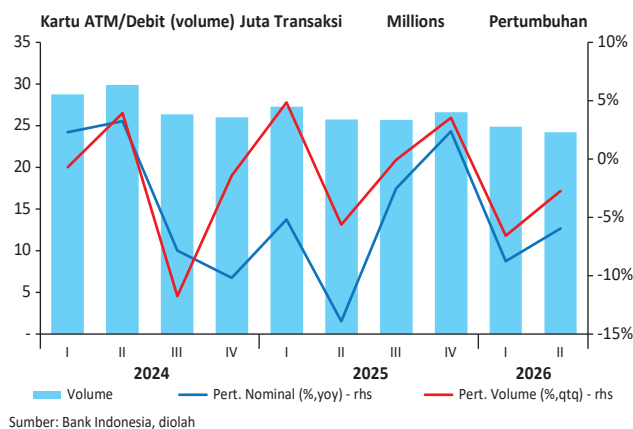
Normalisasi konsumsi masyarakat mendorong perlambatan transaksi menggunakan APMK dan Uang Elektronik. Nilai transaksi kartu ATM/debit pada triwulan II 2026 tercatat Rp32,19 triliun, menurun

-5,22% (yoy) setelah sebelumnya tumbuh 24,93% (yoy) (Grafik 4.7). Demikian juga dari sisi volume. Volume transaksi tercatat sebanyak 24,21 juta transaksi atau menurun -5,94% (yoy), melanjutkan penurunan dari sebelumnya yang berkontraksi -8,75% (yoy) (Grafik 4.8). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi siklus konsumsi masyarakat dan perdagangan khususnya eceran pasca pelaksanaan HBKN Ramadan dan Idul Fitri pada triwulan I 2026. Hal ini sejalan pula dengan perlambatan Konsumsi Rumah Tangga menjadi 2,52% (yoy) dari sebelumnya 3,11% (yoy).

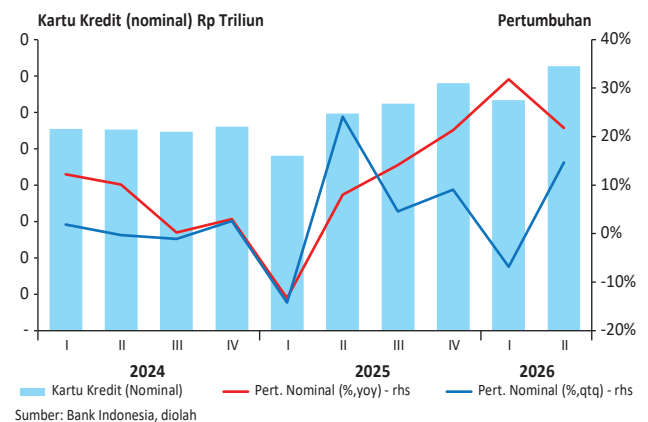
Perlambatan juga terjadi pada transaksi melalui pembayaran tertunda (*deferred payment*) menggunakan kartu kredit, mengkonfirmasi perlambatan konsumsi triwulan II 2026. Nilai transaksi kartu kredit pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp0,36 triliun, tumbuh 21,77% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya 31,78% (yoy) (Grafik 4.9). Demikian pula dengan nominal rata-rata per transaksi. Tercatat pada triwulan II 2026, rata-rata transaksi kartu kredit tercatat Rp 950 ribu mengalami penurunan -10,07% (yoy). Meski demikian, secara volume, transaksi menggunakan kartu kredit meningkat 35,40% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 32,95% (yoy) atau meningkat menjadi sekitar 381,30 ribu transaksi (Grafik 4.10).



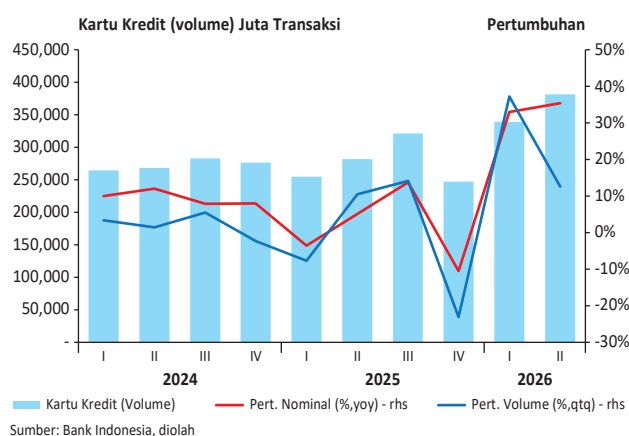
Grafik 4.7 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu ATM/Debit



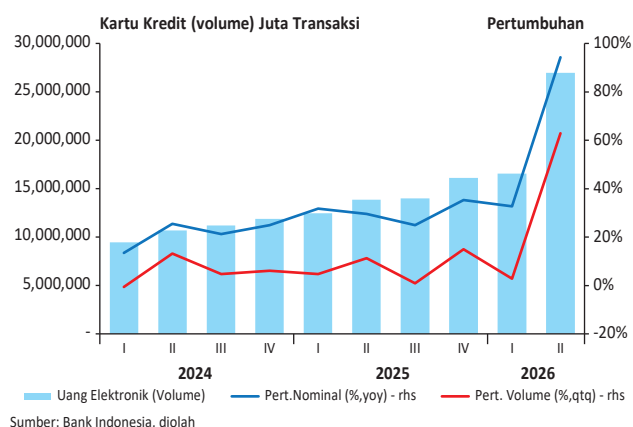
Grafik 4.8 Perkembangan Volume Transaksi Kartu ATM/Debit



Grafik 4.9 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit di Sumatera Barat



Grafik 4.10 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit di Sumatera Barat



Grafik 4.12 Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik di Sumatera Barat

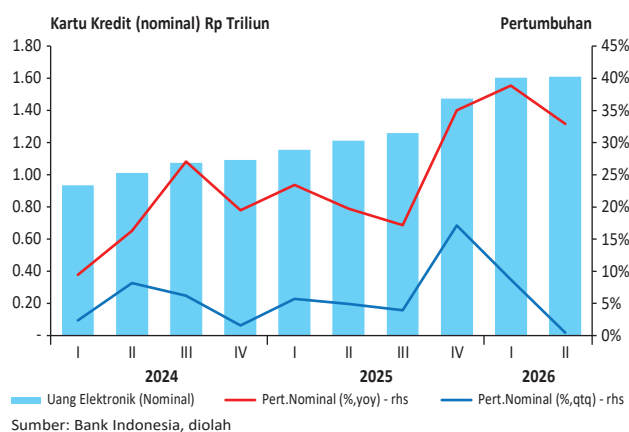
Perlambatan pertumbuhan terjadi pula pada transaksi uang elektronik. Meskipun secara volume transaksi terjadi peningkatan, namun secara nominal pertumbuhan transaksi uang elektronik mengalami penurunan. Transaksi uang elektronik tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dari 38,88% (yoy) pada triwulan I menjadi 32,91% (yoy) pada triwulan II (Grafik 4.11). Secara nominal, pada triwulan II 2026, tercatat transaksi uang elektronik sebesar Rp1,61 triliun pada triwulan II 2026, melambat dibandingkan triwulan I yang sebesar Rp1,60 triliun. Meski demikian, dari sisi volume, transaksi mencapai 26,97 juta transaksi, tumbuh 94,34% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan I yang tumbuh 32,78% (yoy) (Grafik 4.12). Peningkatan pertumbuhan

volume yang lebih tinggi dibandingkan nominal mengindikasikan perlunya dukungan optimalisasi penggunaan uang elektronik di tengah perluasan pengguna uang elektronik.

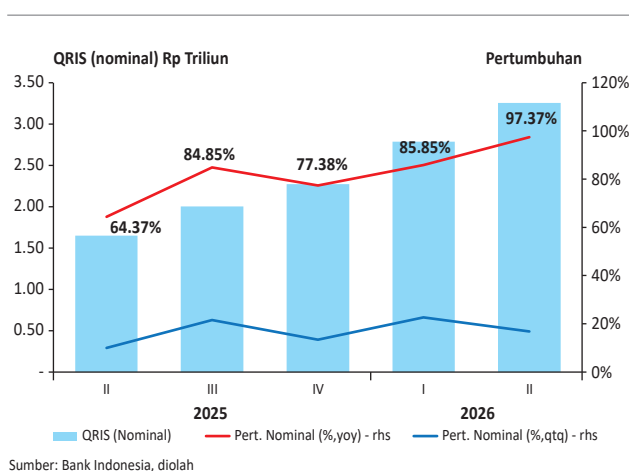
Ke depan, dalam rangka mendukung peningkatan penggunaan instrumen pembayaran non-tunai, Bank Indonesia terus melakukan berbagai upaya penguatan ekosistem sistem pembayaran, antara lain melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, kampanye literasi keuangan digital kepada masyarakat, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan perbankan. Selain itu, implementasi program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga terus didorong guna meningkatkan penggunaan kanal pembayaran non-tunai pada transaksi publik, sehingga memperkuat inklusi keuangan dan mendukung akselerasi ekosistem pembayaran digital ritel.

4.1.5. Transaksi Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS)

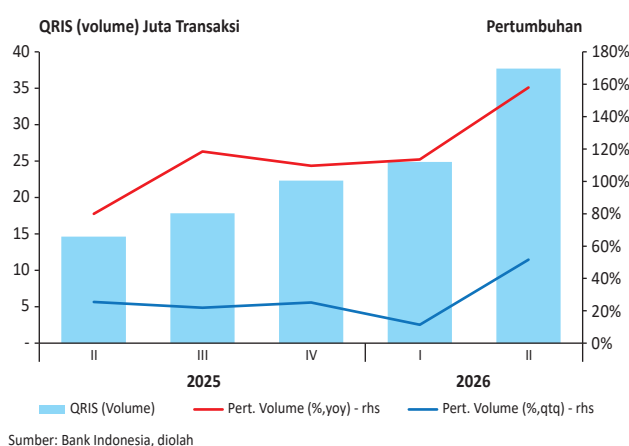
Akseptasi masyarakat terhadap penggunaan kanal QRIS terus meningkat, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Nilai transaksi QRIS triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp3,25 triliun, tumbuh 97,37% (yoy) melanjutkan pertumbuhan sejak akhir tahun lalu. (Grafik 4.13). Dari sisi volume, transaksi QRIS mencapai 37,71 juta



Grafik 4.11 Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik di Sumatera Barat



Grafik 4.13 Perkembangan Nominal Transaksi QRIS di Sumatera Barat



Grafik 4.14 Perkembangan Volume Transaksi QRIS di Sumatera Barat

transaksi, meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, yakni 158,00% (yoy) akselerasi pertumbuhan sejak akhir tahun lalu (Grafik 4.14).

Peningkatan nilai dan volume transaksi didukung perluasan adopsi QRIS baik dari sisi *merchant* maupun pengguna. Jumlah *merchant* QRIS mencapai 768.962 *merchant* atau 101,91% dari target 754.317 *merchant*. Penambahan pada Juni 2026 tercatat sebanyak 20.911 *merchant*, merupakan penambahan bulanan tertinggi selama semester I 2026. Dari sisi pengguna, jumlah pengguna QRIS mencapai 1.075.178 pengguna atau 109,74% dari target 979.780 pengguna. Secara kumulatif selama semester I 2026, volume

transaksi QRIS mencapai 62,582 juta transaksi atau 79,26% dari target 78,963 juta transaksi, dengan nominal transaksi sebesar Rp6,04 triliun.

Perluasan adopsi digital terus didorong. Berbagai program terus diupayakan untuk mendorong adopsi digital, antara lain melalui Pekan QRIS Nasional (PQN), QRIS Jelajah Indonesia (QJI), Pasar SIAP QRIS, dan kegiatan lainnya. Selain itu, kegiatan sosialisasi bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun non bank serta dukungan pemerintah daerah turut memperkuat penetrasi QRIS. Upaya tersebut juga diperluas melalui kampanye QRIS Jelajah Indonesia dan implementasi QRIS lintas batas.

4.2. PERKEMBANGAN TRANSAKSI SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

Aktivitas transaksi retail melalui transaksi tunai mengkonfirmasi perlambatan konsumsi dan perdagangan retail. Seiring dengan siklus transaksi uang kartal pasca momen HBKN Ramadan dan Idul Fitri, pertumbuhan aliran uang kartal masuk (*inflow*) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat mengalami penurunan. Sebaliknya pertumbuhan penarikan uang kartal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (*outflow*) relatif stabil mengindikasikan masih tingginya penggunaan uang tunai di tengah upaya elektronifikasi dan digitalisasi alat pembayaran.

Inflow pada triwulan II 2026 mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kunjungan penduduk dari wilayah luar Sumbar yang melakukan aktivitas transaksi retail di wilayah Sumbar pasca pelaksanaan momen *pulang basamo* dalam rangka HBKN Ramadan dan Idul Fitri. Pada triwulan II 2026, jumlah *inflow* tercatat Rp4,00 triliun, menurun -11,83% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 20,77% (yoy). Penurunan arus masuk ke wilayah Sumbar ini di antaranya terkonfirmasi dari penurunan arus masuk penumpang pesawat udara melalui Bandara Internasional Minangkabau yang mengalami penurunan -17,14% (yoy) setelah pada triwulan I tumbuh sekitar 4% (yoy).

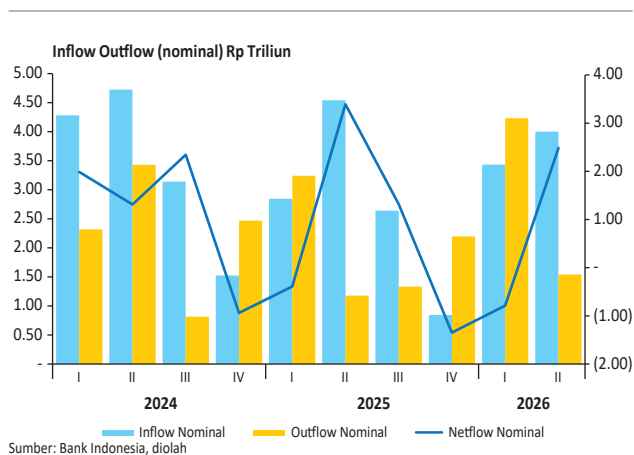


Sebaliknya, jumlah *outflow* triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp1,54 triliun, tumbuh 31,11% (yoy) relatif stabil dibandingkan sebelumnya yang tumbuh 30,45% (yoy). Tingginya pertumbuhan *outflow* ini di antaranya dipengaruhi oleh masih tingginya penggunaan uang kartal oleh masyarakat Sumbar.

Meski demikian, secara neto, pada triwulan II 2026, transaksi uang kartal di Sumatera Barat tercatat mengalami *net-inflow* sebesar Rp2,46 triliun setelah pada dua triwulan sebelumnya mencatat *net-outflow*. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh arus balik uang kartal pasca peningkatan *outflow* di masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri.

Berkenaan dengan upaya menjaga ketersediaan uang layak edar dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai kebutuhan masyarakat, Bank Indonesia terus memperkuat pelaksanaan *Clean Money Policy* melalui kegiatan kas keliling dan *Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) hingga ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil)*, pemusnahan uang tidak layak edar, serta

kampanye Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah. Selain itu, berbagai langkah edukatif dan preventif untuk meminimalisir peredaran uang palsu juga dilakukan secara berkesinambungan, termasuk melalui aktivasi Tim Buru Sergap Uang Palsu (TIMBUL) dan kerja sama erat dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).



Grafik 4.15 Perkembangan Aliran Uang Kas Masuk (*Inflow*) dan Keluar (*Outflow*) Sumatera Barat



Boks 2

QRIS JELAJAH KULINER INDONESIA 2026 MENDORONG AKSEPTASI DIGITAL MELALUI KEKUATAN KULINER SUMATERA BARAT

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan keuangan digital di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif sejalan dengan semakin luasnya penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga Juni 2026, jumlah *merchant* QRIS di Sumatera Barat tercatat sebanyak **753.719 merchant**, sementara jumlah pengguna mencapai **1.075.178 pengguna**. Dari sisi transaksi, sepanjang semester I 2026 tercatat **62,58 juta transaksi** dengan nominal mencapai sekitar **Rp6,04 triliun**. Volume transaksi tersebut telah mencapai **79,26% dari target tahun 2026 sebesar 78,96 juta transaksi**.

Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa tantangan perluasan QRIS tidak lagi hanya terletak pada penambahan *merchant* dan pengguna, tetapi juga pada bagaimana mendorong penggunaan QRIS secara lebih aktif dalam transaksi sehari-hari. Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan pengalaman bertransaksi secara langsung kepada masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan **QRIS Jelajah Indonesia (QJI) 2026** sebagai bagian dari *flagship event* Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). QJI 2026 mengangkat kuliner sebagai fokus kegiatan melalui format kompetisi berjenjang dari tingkat daerah hingga kawasan. Secara nasional, program ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran, memperluas penggunaan pembayaran digital, serta meningkatkan literasi masyarakat dengan memanfaatkan sektor UMKM dan pariwisata sebagai salah satu *entry point*.



2. Jelajah Tiga Kota: Menghubungkan Digitalisasi dengan Kuliner Daerah

Bagi Sumatera Barat, pemilihan kuliner sebagai tema QJI memiliki relevansi yang kuat. Kekayaan kuliner Minangkabau tidak hanya menjadi bagian dari identitas daerah, tetapi juga berkaitan erat dengan aktivitas UMKM dan pariwisata.

QJI Kuliner Sumatera Barat 2026 dilaksanakan pada 13–17 Juli 2026 dengan melibatkan 10 tim finalis yang menjelajahi tiga kota, yaitu Padang, Bukittinggi, dan Payakumbuh. Para peserta menyelesaikan berbagai misi yang menggabungkan penggunaan QRIS, eksplorasi kuliner, interaksi dengan *merchant* dan masyarakat, serta pembuatan konten melalui media sosial. Pelaksanaan di tiga kota juga dikonfirmasi oleh publikasi eksternal mengenai QJI Sumatera Barat 2026.

Salah satu karakter utama QJI adalah penggunaan pendekatan berbasis pengalaman. Pendekatan tersebut



memberikan ruang bagi peserta untuk memahami implementasi sistem pembayaran dalam kondisi riil. Pada saat yang sama, *merchant* memperoleh tambahan aktivitas transaksi dan eksposur terhadap produk kulinernya.

Selama lima hari pelaksanaan, rangkaian QJI Sumatera Barat mencatat sekitar 10.000 transaksi QRIS. Capaian ini menunjukkan tingginya intensitas transaksi selama pelaksanaan misi dan memberikan gambaran bahwa aktivasi yang dikaitkan dengan pengalaman langsung dapat menjadi salah satu pendekatan dalam mendorong penggunaan QRIS.

Pengalaman pelaksanaan QJI menunjukkan bahwa sektor kuliner memiliki karakter yang cukup kuat sebagai pintu masuk perluasan penggunaan pembayaran digital. Transaksi kuliner relatif dekat dengan keseharian masyarakat, memiliki frekuensi transaksi yang tinggi, serta mempertemukan konsumen dan *merchant* secara langsung. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk membentuk pengalaman dan kebiasaan bertransaksi menggunakan QRIS.



Gambar 1: Lokasi dan durasi kegiatan QJI 2026



Boks 3

UANG PUN BERMANFAAT DEMI BIRUNYA LANGITKU INOVASI HIJAU DARI BANK INDONESIA SUMATERA BARAT

Siapa sangka, tumpukan limbah uang kertas yang tak lagi sah bisa jadi kartu As kita untuk menjemput langit yang lebih bersih dan bumi yang lebih sehat? Inilah simfoni kolaborasi yang keren nan beken antara Bank Indonesia Sumatera Barat dan PT Semen Padang, yang “menyulap” Limbah Racikan Uang Kertas (LRUK) menjadi Bahan Bakar Alternatif sebuah napas segar bagi industri.

Dari Limbah Menumpuk Menjadi Sumber Daya Emas

Pada 29 April 2025, ditandatangani sebuah janji hijau (Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan LRUK) antara BI Sumatera Barat dengan PT Semen Padang. Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tapi komitmen tulus untuk mendukung Energi Baru Terbarukan dan memutar roda ekonomi sirkuler di mana tak ada limbah uang kertas yang benar-benar terbuang.

Bayangkan, sudah sebanyak 82,3 Ton LRUK yang telah dikirimkan, yang dulunya mungkin hanya akan diam di tumpukan sampah, kini menghasilkan energi sebanyak 328.337.000 Kcal. Energi “hasil daur ulang” ini setara dengan menggantikan 78,19 Ton bahan bakar fosil batu bara. Hasilnya? Kita bisa tersenyum lebar karena menghemat biaya operasional Batubara hingga Rp 78.190.000,-.

Menciptakan “Oase Hijau” dengan Tangan Kita Sendiri

Pemanfaatan LRUK ini bukan hanya tentang angka-angka fantastis di pabrik, tapi bisikan sayang kita untuk Ibu Bumi:

- Membebaskan TPA dari Beban Berat: Dengan membakar limbah uang kertas di kiln (tanur semen), volume sampah yang berakhir di Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) berkurang. Ini ibarat memperpanjang usia TPA dan meringankan dompet pengelolaan sampah.

- Mengunci “Hantu Metana”: Sampah yang membusuk adalah pabrik mini penghasil gas metana CH₄, si “gas jahat” yang dampaknya ke pemanasan global lebih kuat dari CO₂. Proses di pabrik semen memastikan LRUK terbakar sempurna, sehingga hantu metana ini tak sempat gentayangan, sebuah tameng kuat melawan pemanasan global.
- Meredam “Napas Panas” CO₂: Mengganti batu bara dengan LRUK adalah langkah elegan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Hadiah terindahya? Kita berhasil menarik rem pada emisi CO₂ hingga 187.644 Kg, sebuah kontribusi tulus demi udara yang kita hirup.

Menggenggam Tujuan Global dengan Aksi Lokal

Inisiatif ini membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan menegaskan posisi Bank Indonesia Sumatera Barat sebagai pelopor dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs):

- Energi Bersih (SDG 7): BI Menyediakan alternatif yang andal selain energi kotor.
- Bumi kita Nyaman (SDG 11 & 12): BI Mengurangi sampah dan menciptakan komunitas yang bertanggung jawab melalui sirkuler ekonomi.
- Aksi Nyata pada Iklim (SDG 13): Membantu mendinginkan suhu bumi dengan mereduksi emisi CO₂.



- Sinergi dan Kolaborasi Kuat (SDG 17): Menjalin ikatan kerja sama yang solid antara Bank Indonesia Sumatera Barat dan *Stakeholder* demi birunya Langitku.

Melalui program ini, Bank Indonesia Sumatera Barat membuktikan kepada kita bahwa bahkan limbah uang kertas yang sudah pensiun “masa baktinya” pun bisa menjadi pahlawan tak terduga bagi bumi dan birunya Langit kita. Inovasi ini bukan sekadar program, tapi warisan harapan untuk generasi mendatang.



Halaman ini sengaja dikosongkan







BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 5

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH



Dinamika lapangan usaha berdampak pada dinamika ketenagakerjaan dan kesejahteraan.

Perlambatan ekonomi triwulan II berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya pengangguran terutama di wilayah perkotaan. Perkembangan ini dipengaruhi penurunan kinerja sektor-sektor utama seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan. Akan tetapi, perkembangan ini terkompensasi oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan di wilayah perdesaan dampak dari membaiknya kinerja sektor pertanian dan perkebunan. Meski demikian perlu dicermati terjadinya pergeseran dari penggunaan pekerja terdidik menjadi pekerja unskilled.

Meski secara keseluruhan terjadi penurunan pada kondisi ketenagakerjaan di Sumbar pada triwulan II, namun hal ini belum berdampak pada penurunan kesejahteraan. Hal ini terutama dipengaruhi oleh cukup kuatnya peningkatan kinerja pada sektor pertanian dan perkebunan yang berimbas pada membaiknya penghasilan pekerja pada sektor tersebut. Cukup kuatnya kinerja sektor perkebunan juga mendukung penurunan kemiskinan dan mendukung penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat khususnya di wilayah perdesaan.





INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

Jumlah Angkatan Kerja
Sumatera Barat (orang)



3,20 Juta

Mei 2026

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
Sumatera Barat



70,64%

Mei 2026

Tingkat Pengangguran
Terbuka
Sumatera Barat



5,53%

Mei 2026



INDIKATOR KESEJAHTERAAN

Persentase Penduduk
Miskin Sumatera Barat



5,27%

Maret 2026

Indeks Kedalaman
Kemiskinan Sumatera
Barat



0,75

Maret 2026

Indeks Keparahan
Kemiskinan
Sumatera Barat



0,18

Maret 2026

**Tabel 5.1.** Indikator Ketenagakerjaan Daerah (ribu orang)

Kegiatan Utama	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Mei
Penduduk Usia Kerja	4.047	4.078	4.223	4.139	4.287,7	4.345,0	4.381,2	4.415,1	4.451,2	4.483,0	4.518,8	4.436,9
Angkatan Kerja	2.768,7	2.761,0	2.871,8	2.868,0	3.000,0	3.024,4	3.086,3	3.103,0	3.157,9	3.198,2	3.242,6	3.204,9
Bekerja	2.584,1	2.581,0	2.694,6	2.688,0	2.823,0	2.844,9	2.907,5	2.924,8	2.978,2	3.018,6	3.063,9	3.027,7
Pengangguran	185,0	180,0	177,0	180,0	177,0	179,5	178,8	178,3	179,7	179,6	178,7	177,1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,41	67,72	68,00	69,30	69,96	69,61	70,44	70,28	70,95	71,34	71,76	70,64
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,67	6,52	6,17	6,28	5,90	5,94	5,79	5,75	5,69	5,62	5,51	5,53
TPT Perkotaan (%)	9,81	8,65	8,27	9,54	8,00	7,32	7,55	6,67	7,34	6,53	6,83	6,83
TPT Perdesaan (%)	3,80	4,50	4,23	3,26	4,01	4,60	3,98	4,74	3,85	4,51	3,83	3,83

Sumber: BPS, diolah

5.1. KETENAGAKERJAAN DAERAH

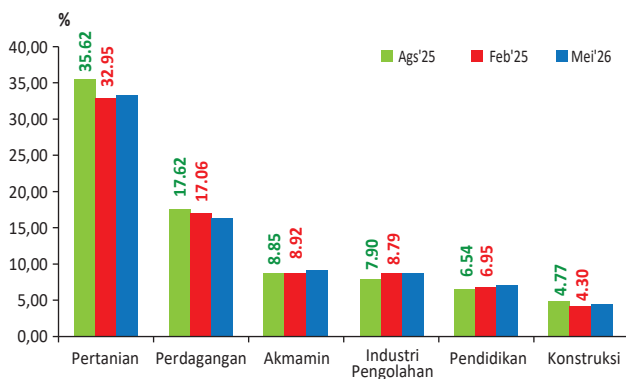
Perlambatan ekonomi pada triwulan II berdampak pada penurunan kondisi ketenagakerjaan. Penduduk usia kerja mencapai 4,54 juta orang. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja menurun 3775 ribu jiwa, sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun dari 71,76% pada Februari 2026 menjadi 70,64% pada Mei 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga meningkat dari 5,51% menjadi 5,53%.

Dari sisi lapangan usaha, **penurunan penyerapan lapangan kerja terjadi pada sektor-sektor utama** kecuali LU Pertanian dan Perkebunan, LU Konstruksi serta LU Akomodasi Makanan dan Minuman. Penurunan terbesar terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Transportasi yang mengalami penurunan berturut-turut -0,43% poin dan 0,40% poin sejalan dengan normalisasi aktivitas konsumsi pada triwulan II. Sementara LU Industri Pengolahan menurun -0,01% poin. Sebaliknya membaiknya kinerja LU Pertanian dan Perkebunan serta LU Akomodasi Makanan dan Minuman imbas pelaksanaan MBG mendukung peningkatan penyerapan pada kedua sektor tersebut berturut-turut 0,51% poin dan 0,26% poin.

Meski terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja, tenaga kerja informal di Sumatera Barat menurun pada Mei 2026. Pangsa pekerja formal yang terdiri dari buruh/

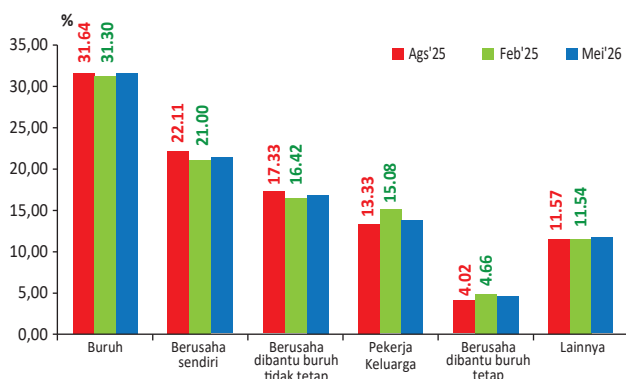
karyawan/pegawai, pekerja yang berusaha dibantu buruh tetap, serta kategori formal lainnya tercatat sebesar 36,20%, lebih tinggi dibandingkan posisi Februari yang sebesar 35,96%. Sebaliknya, pangsa pekerja informal menurun dibandingkan posisi Februari 2026 yang sebesar 64,04% menjadi 63,80% pada posisi Mei 2026.

Membaiknya penyerapan tenaga kerja formal belum diimbangi dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja hingga terutama didorong oleh meningkatnya pertumbuhan jenis pekerjaan *unskilled* yang terindikasi dari peningkatan pekerja dengan tingkat pendidikan rendah. Sebaliknya, penduduk bekerja berpendidikan tinggi terus menurun. Tercatat persentase pekerja dengan pendidikan D4 dan Sarjana (S1,S2,S3) menurun dari 13,47% menjadi 12,72%. Demikian pula persentase pekerja dengan pendidikan Diploma menurun dari 3,64% menjadi 3,28%. Sementara itu, persentase pekerja dengan pendidikan SD ke bawah meningkat menjadi 31,32% dari 31,07%. Demikian pula dengan pekerja dengan pendidikan SMP yang meningkat menjadi 17,79% dari sebelumnya 17,27%. Lebih lanjut, pekerja dengan pendidikan menengah pada katagori pekerja dengan pendidikan SMA menurun dari 24,09% menjadi 22,46%. Akan tetapi penurunan pekerja dengan pendidikan SMA terkompensasi oleh peningkatan tenaga kerja lulusan SMK yang meningkat dari 10,46% pada Februari menjadi 12,43% pada Mei 2026.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.1 Pangsa Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.2 Pangsa Pekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

5.2. KESEJAHTERAAN DAERAH

Garis kemiskinan¹ Sumatera Barat meningkat 10,78% (yoy) pada Maret 2026, menjadi sebesar Rp808.511 per kapita per bulan (Grafik 5.3) terutama dipengaruhi peningkatan garis kemiskinan makanan yang mengalami kenaikan 11,48%, sementara non makanan meningkat 8,60% (yoy). Komoditas yang memberikan andil besar terhadap garis kemiskinan di Sumatera Barat di antaranya beras, rokok kretek filter, cabai merah, telur ayam ras, dan ikan tongkol. Sementara itu, andil pengeluaran non

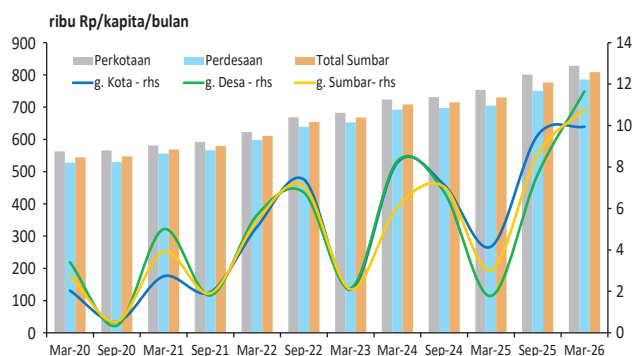
1. Representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Garis kemiskinan juga merupakan indikator untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam golongan miskin atau tidak miskin melalui rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan.

makanan sebesar Rp191.222 per kapita per bulan, yang utamanya dibelanjakan untuk komoditas perumahan, bensin, pendidikan, listrik, dan perlengkapan mandi.

Berkembangnya kinerja dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, mendukung membaiknya kesejahteraan terutama penduduk di perdesaan.

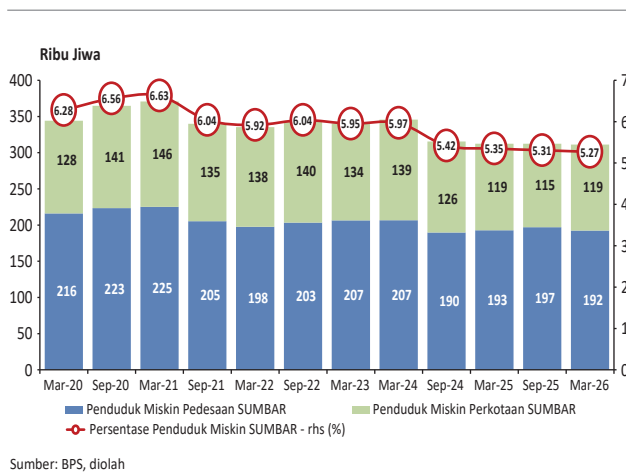
Sebaliknya, penurunan kinerja sektor perdagangan serta industri pengolahan yang disertai penurunan penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut berkontribusi pada meningkatnya persentase penduduk miskin di perkotaan. Pada Maret 2026 penduduk miskin turun menjadi 311,140 ribu orang atau sebesar 5,27% dari total penduduk lebih rendah dari posisi September yang sebesar 5,31%. Turunnya jumlah penduduk miskin terutama terjadi di perdesaan yang turun dari 7,03% menjadi 6,88%. Sebaliknya penduduk miskin di daerah perkotaan sebanyak 192,46 ribu orang atau 3,82% penduduk meningkat dari sebelumnya 3,75% (Grafik 5.4).

Tingkat kemiskinan antarwilayah bervariasi masih cukup lebar, yaitu pada kisaran 2,72% hingga 13,22% dari total penduduk masing-masing daerah. Wilayah perkotaan umumnya mencatat angka kemiskinan yang relatif lebih rendah (Grafik 5.5), seperti Kota Solok, Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman yang masing-masing sebesar 2,91%; 3,63%; 3,78%; dan 3,83% (yoy). Sebaliknya, angka tertinggi terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 13,22% pada tahun 2025,

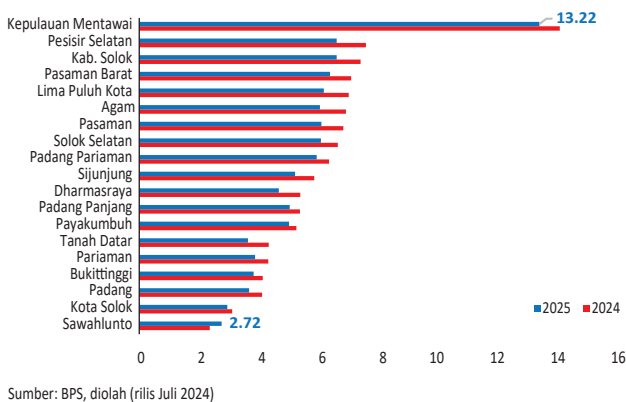


Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.3 Garis Kemiskinan di Sumatera Barat



Grafik 5.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat



Grafik 5.5 Persentase Penduduk Miskin per Kabupaten/kota

menurun dari 13,89% pada 2024. Persentase tersebut jauh melampaui tingkat kemiskinan kabupaten/kota lain maupun rata-rata provinsi.

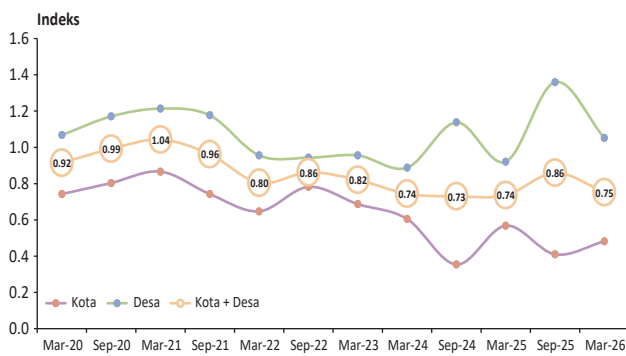
Kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan pada Maret 2026. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahatan Kemiskinan (P2). Secara agregat (perkotaan dan perdesaan), P1 turun dari 0,860 pada September 2025 menjadi 0,752 pada Maret 2026, yang menunjukkan berkurangnya rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, P2 juga menurun dari 0,220 menjadi 0,176, mengindikasikan berkurangnya keparahan kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Membbaiknya kesejahteraan di perdesaan diikuti dengan menurunnya kesenjangan.

Di wilayah perdesaan, P1 turun dari 1,360 pada September 2025 menjadi 1,052 pada Maret 2026. Sebaliknya, kesenjangan di wilayah perkotaan meningkat tercermin dari P1 di wilayah perkotaan meningkat dari 0,410 pada September 2025 menjadi 0,482 pada Maret 2026. Pola yang serupa terlihat pada P2. Di perdesaan, P2 turun dari 0,380 pada September 2025 menjadi 0,264 Maret 2026, sementara di perkotaan justru meningkat dari 0,070 pada September 2025 menjadi 0,097 pada Maret 2026. Dengan demikian, perbaikan keparahan kemiskinan secara agregat terutama didorong oleh membaiknya kondisi di wilayah perdesaan, sedangkan wilayah perkotaan masih menghadapi tekanan kemiskinan yang tercermin dari meningkatnya kedalaman dan keparahan kemiskinan.

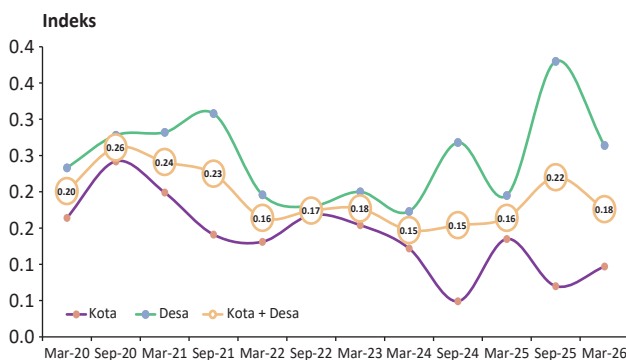
Sebagai respons atas perkembangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan perdesaan, perbaikan kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi momentum untuk semakin memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis nagari, pengembangan usaha produktif, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar perbaikan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Arah tersebut sejalan dengan pengembangan pendekatan graduasi kemiskinan dan perluasan Nagari/Desa sebagai ruang kolaborasi untuk mendorong ekonomi kreatif, inovasi, dan pemanfaatan teknologi di tingkat nagari.

Di wilayah perkotaan, penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan dapat terus diarahkan pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat melalui perluasan akses terhadap peluang usaha dan pekerjaan produktif, penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga, serta optimalisasi perlindungan sosial yang tepat sasaran. Arah tersebut sejalan dengan pendekatan graduasi kemiskinan yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong masyarakat miskin



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.7 Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)

menuju kemandirian ekonomi. Penguatan intervensi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan di tengah dinamika kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran perkotaan yang masih perlu mendapat perhatian.

5.3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN RASIO GINI

Kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2025. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kembali meningkat menjadi 77,27,

lebih tinggi dibandingkan 76,43 pada tahun 2024. Dengan peningkatan tersebut, Sumatera Barat masih mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan IPM tertinggi kedua di Pulau Sumatera, hanya berada di bawah Kepulauan Riau yang mencatat indeks sebesar 80,53. Selain itu, capaian IPM Sumatera Barat juga melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 75,90 pada tahun 2025 (Grafik 5.8).

Secara spasial, kesenjangan capaian IPM antarwilayah kabupaten/kota masih terlihat cukup jelas. Kota Padang tetap menjadi wilayah dengan IPM tertinggi, yaitu 84,93 dengan kategori sangat tinggi, diikuti Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Hampir seluruh kota di Sumatera Barat berada dalam kategori sangat tinggi, kecuali Kota Sawahlunto yang masih tergolong tinggi dengan indeks 77,05.

Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menempati posisi terendah dengan indeks 67,62, berada dalam kategori sedang (Grafik 5.9). Sebagian besar kabupaten lainnya berada dalam kategori tinggi meskipun dengan variasi kinerja yang cukup beragam.

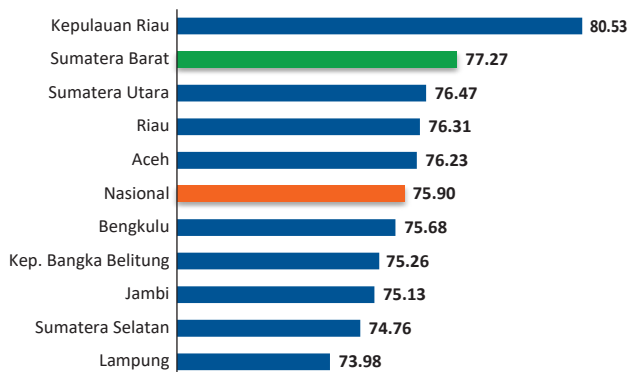
Peningkatan IPM Sumatera Barat pada tahun 2025 didorong oleh membaiknya seluruh dimensi pembentuknya. Salah satu pendorong utama adalah meningkatnya pengeluaran riil per kapita. Pada 2025, pengeluaran per kapita tercatat Rp12,04 juta per tahun, naik 2,76% dibandingkan Rp11,72 juta pada 2024 (Grafik 5.10). Kenaikan ini menunjukkan perbaikan daya beli masyarakat seiring kondisi ekonomi daerah yang semakin stabil.

Dari sisi pendidikan, capaian juga menunjukkan perkembangan positif. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,44 tahun (2024) menjadi 9,77 tahun pada 2025, mengindikasikan semakin luasnya akses pendidikan formal dan meningkatnya keberlanjutan pendidikan masyarakat.



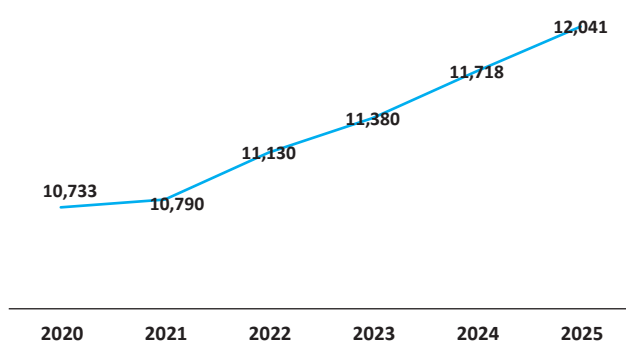
Dari perspektif ketimpangan, kesenjangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat meningkat masih berada pada tingkat ketimpangan yang relatif rendah. Pada Maret 2026, *Gini ratio* tercatat sebesar 0,285, naik dari 0,280 pada September 2025, namun tetap berada jauh di bawah tingkat nasional yang mencapai 0,368. Secara spasial, peningkatan ketimpangan terutama terjadi di perkotaan, dengan *Gini ratio* meningkat terbatas dari 0,301 menjadi 0,304. Sebaliknya, *Gini ratio* perdesaan terkoreksi dari 0,236 menjadi 0,231, menunjukkan perbaikan pemerataan pengeluaran di wilayah perdesaan. Hal ini mengindikasikan terjadinya urbanisasi di wilayah Sumbar.

Dari sisi distribusi pengeluaran, porsi pengeluaran kelompok 40% penduduk dengan pengeluaran terendah meningkat dari 23,89% pada September 2025 menjadi 23,97% pada Maret 2026. Secara kewilayahan, proporsi tersebut mencapai 23,10% di perkotaan dan 26,36% di perdesaan. Berdasarkan ukuran Bank Dunia, kondisi tersebut masih berada dalam kategori ketimpangan rendah. Dengan demikian, kenaikan marginal *Gini ratio* belum mengubah karakteristik umum ketimpangan Sumatera Barat yang masih relatif rendah. Penguatan porsi pengeluaran kelompok 40% terbawah serta koreksi *Gini ratio* di perdesaan menjadi faktor yang menahan pelebaran ketimpangan secara lebih luas.



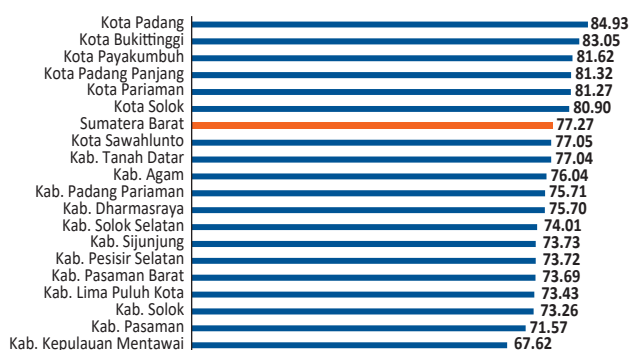
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Sumatera Tahun 2025



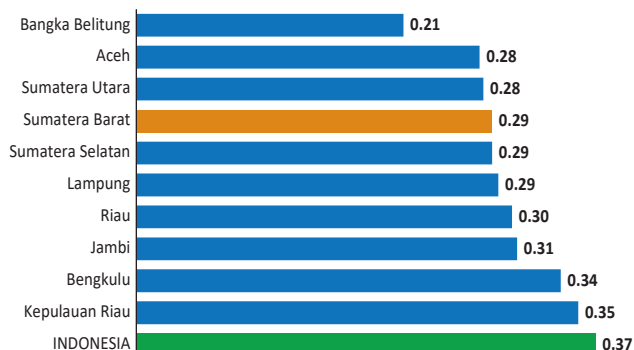
Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.10 Pengeluaran per kapita Sumatera Barat per tahun (Rp ribu)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.9 IPM Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2025



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.11 Gini Ratio Provinsi di Sumatera September 2025



5.4. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI SUMATERA BARAT

Seiring dengan membaiknya kinerja sektor pertanian, daya beli petani menguat pada triwulan II 2026. NTP Sumatera Barat meningkat dari 124,91 pada triwulan I 2026 menjadi 129,26 pada triwulan II 2026, atau naik 4,35 poin (3,48%). Penguatan tersebut juga menempatkan NTP pada level yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 126,61 maupun periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 125,63. Dengan NTP yang tetap berada di atas 100, perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga yang diterima petani lebih besar dibandingkan peningkatan harga yang dibayar petani untuk kebutuhan konsumsi dan produksi, sehingga daya tukar petani pada triwulan II 2026 kembali menguat.

- Tanaman pangan (NTPP) relatif tertahan, dari 106,20 menjadi 105,99. Penurunan tipis tersebut menunjukkan daya tukar petani tanaman pangan relatif stabil, dengan pelemahan yang terbatas. Meskipun terkoreksi secara marginal, NTPP tetap berada di atas 100 sehingga kondisi daya tukar petani tanaman pangan masih relatif terjaga.

- Hortikultura (NTPH) kembali mengalami penguatan, dari 145,62 menjadi 151,55, atau meningkat 5,93 poin. Kenaikan tersebut menunjukkan membaiknya daya tukar petani hortikultura setelah mengalami koreksi pada triwulan sebelumnya. Level NTPH pada triwulan II 2026 juga lebih tinggi dibandingkan 149,64 pada triwulan II 2025, menunjukkan penguatan baik secara triwulanan maupun tahunan.
- Tanaman perkebunan rakyat (NTPR) menjadi salah satu penopang utama penguatan NTP Sumatera Barat. NTPR meningkat dari 145,17 menjadi 156,72, atau naik 11,55 poin. Kenaikan tersebut mengembalikan NTPR ke level yang lebih tinggi setelah mengalami koreksi pada triwulan sebelumnya. Dengan level NTPR yang relatif tinggi, subsektor perkebunan rakyat menjadi salah satu kontributor penting terhadap penguatan daya tukar petani pada triwulan II 2026.
- Peternakan mengalami koreksi dari 109,00 menjadi 105,85. Pelemahan ini menunjukkan moderasi daya tukar petani peternakan setelah mengalami penguatan pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, NTP peternakan masih berada di atas 100 sehingga daya tukar petani pada subsektor tersebut tetap relatif terjaga.

Tabel 5.2. Perkembangan NTP Provinsi di Sumatera

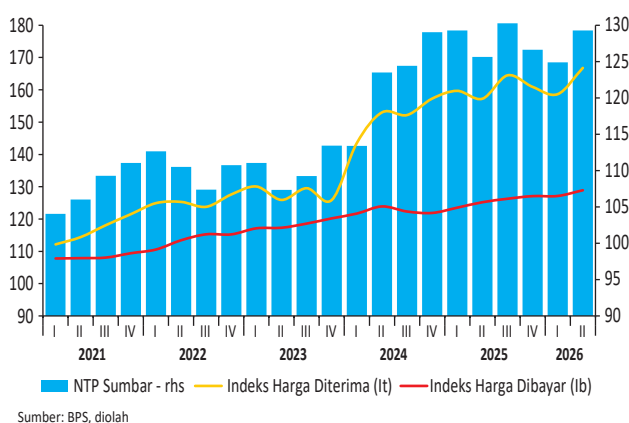
Provinsi	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Aceh	116,68	115,73	121,52	122,24	121,55	122,08	125,84	124,36	124,83	124,84
Sumatera Utara	130,80	132,70	136,50	144,71	145,25	139,84	143,43	148,25	154,07	159,50
Sumatera Barat	113,40	123,50	124,43	129,03	129,28	125,63	130,26	126,61	124,91	129,26
Riau	159,49	166,73	175,17	190,01	193,57	186,81	189,35	190,72	192,76	202,43
Jambi	145,67	151,48	157,75	167,70	174,46	167,75	170,58	173,02	176,06	186,43
Sumatera Selatan	112,14	116,49	124,11	128,19	131,12	123,62	123,49	130,48	130,47	141,23
Kepulauan Bangka Belitung	123,66	129,28	137,69	141,53	152,83	147,95	153,16	153,18	153,93	158,73
Bengkulu	163,83	173,04	187,60	198,60	203,23	197,67	201,59	208,32	204,50	200,27
Lampung	120,58	120,49	128,71	128,04	133,28	128,95	126,06	129,07	126,63	127,28
Kepulauan Riau	104,33	105,58	105,25	104,04	106,57	103,03	103,33	105,61	106,38	107,17
Nasional	119,54	117,63	119,92	121,59	123,62	121,31	123,52	124,58	124,80	126,87

Sumber: BPS, diolah



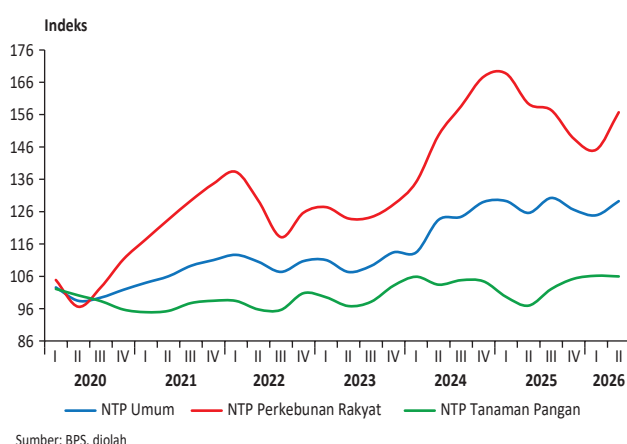
- Perikanan (NTNP) melanjutkan tren penguatan, dari 104,77 menjadi 105,23, atau meningkat 0,46 poin. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa daya tukar pelaku usaha perikanan tetap berada dalam tren positif, meskipun penguatannya relatif terbatas.

Dari sisi pembentuk NTP, penguatan terutama didorong oleh kenaikan Indeks Harga yang Diterima (It) petani sejalan dengan membaiknya harga komoditas pertanian



Grafik 5.12 Perkembangan Indeks Harga Diterima (It) dengan Indeks Harga Dibayar (Ib)

terutama TBS, Karet, dan Hortikultura yang diiringi dengan membaiknya produktivitas. It meningkat dari 158,66 pada triwulan I 2026 menjadi 166,78 pada triwulan II 2026, atau sekitar 5,11%. Sementara itu, Indeks Harga yang Dibayar (Ib) meningkat dari 127,13 menjadi 128,89, atau sekitar 1,39%. Perbedaan laju tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga yang diterima petani berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan harga yang dibayarkan, sehingga mendorong penguatan daya tukar petani pada triwulan II 2026.



Grafik 5.13 NTP Sumbar Menurut Subsektor



Halaman ini sengaja dikosongkan







Dari nAgari Untuk Negeri



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

BAB 6

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH



Perekonomian Sumatera Barat pada 2026 diperkirakan tumbuh meningkat dalam rentang 4,53 - 5,33% (yoy), dengan kecenderungan bias bawah. Perbaikan pertumbuhan terutama ditopang oleh menguatnya permintaan domestik, didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah untuk pelaksanaan program prioritas dan pemulihan pascabencana, serta berlanjutnya investasi infrastruktur pemerintah dan swasta. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari menguatnya perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi, disertai perbaikan pertanian serta transportasi dan perdagangan. Risiko yang dapat menahan pertumbuhan terutama berasal dari melemahnya keyakinan konsumen, realisasi anggaran dan proyek yang lebih lambat, kenaikan harga serta ketersediaan pasokan BBM bersubsidi, ketidakpastian geopolitik, dan risiko cuaca serta bencana. Di sisi lain, percepatan pemulihan pascabencana, peningkatan permintaan komoditas unggulan, dan pemulihan lahan pertanian yang lebih cepat dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi.

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan secara bertahap kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy), meskipun pada semester I 2026 sempat mengalami peningkatan tekanan harga akibat kenaikan harga pangan strategis, energi, dan komoditas global. Meredanya tekanan inflasi pada awal Triwulan III 2026 didukung oleh membaiknya pasokan pangan hortikultura, berlanjutnya masa panen di sejumlah sentra produksi, penguatan distribusi antardaerah, serta efektivitas berbagai program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di sisi eksternal, tekanan inflasi global diperkirakan tetap melandai meskipun masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, dinamika harga energi, dan volatilitas pasar keuangan global. Sementara itu, dari sisi domestik, aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat diperkirakan tetap terjaga, meskipun ekspektasi kegiatan usaha menunjukkan kecenderungan lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya.

Risiko inflasi ke depan masih perlu diwaspadai, terutama yang bersumber dari potensi gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem, serangan hama, dan peningkatan permintaan dari luar daerah yang dapat memengaruhi ketersediaan pasokan komoditas strategis. Selain itu, kenaikan harga energi global dan depresiasi nilai tukar rupiah berpotensi meningkatkan risiko imported inflation melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, TPID Sumatera Barat akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), mengoptimalkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta meningkatkan efektivitas stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah Sumatera Barat.





6.1. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2026

6.1.1. Prospek Ekonomi Global

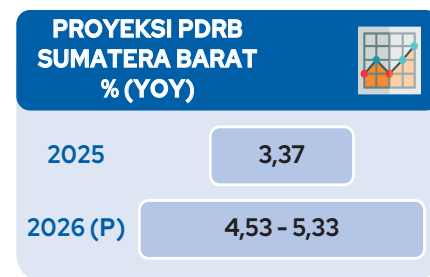
Prospek perekonomian global masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan komoditas dunia lainnya kembali naik. Pertumbuhan dunia diproyeksikan hanya mencapai sekitar 3,0%, lebih rendah dibandingkan proyeksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,1%, melanjutkan tren perlambatan akibat meningkatnya harga minyak dunia, terganggunya rantai pasok global, serta tingginya ketidakpastian kebijakan. Lonjakan harga minyak dunia meningkatkan prospek inflasi dunia, menyebabkan kebijakan moneter global yang lebih ketat. Aliran modal dari negara *emerging economies* diperkirakan akan bergeser ke aset *safe-haven*. Negara maju diperkirakan tumbuh moderat di kisaran 1,7%, sementara *emerging economies* juga melandai menjadi sekitar 3,8%. Secara keseluruhan, ekonomi global 2026 bergerak dalam lingkungan risiko tinggi yang membutuhkan respons kebijakan nasional yang adaptif dan komprehensif.

6.1.2. Prospek Ekonomi Nasional

Prospek ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap solid meski dihadapkan pada tekanan eksternal yang tinggi. Di tengah perlambatan ekonomi global, kebijakan

tarif AS, dan melambatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan, Indonesia diproyeksikan mampu menjaga momentum pertumbuhan dalam kisaran 4,9 – 5,7% melalui penguatan permintaan domestik dan stabilitas makroekonomi. Permintaan domestik menjadi motor utama, terutama konsumsi rumah tangga yang relatif kuat serta investasi yang terus meningkat seiring berlanjutnya transformasi industri dan pengembangan sektor-sektor bernilai tambah. Di tengah melemahnya perdagangan global, kinerja ekspor Indonesia tetap ditopang komoditas unggulan dan perluasan pasar regional.

6.1.3. Prospek Ekonomi Sumatera Barat



Perekonomian Sumatera Barat pada 2026 diperkirakan tumbuh meningkat dalam kisaran 4,53% sampai dengan 5,33% (yoy), dengan kecenderungan bias bawah. Pertumbuhan terutama ditopang oleh perbaikan permintaan domestik, peningkatan konsumsi pemerintah untuk pelaksanaan program prioritas dan

Tabel 6.1. Pertumbuhan Ekonomi Global

Negara	2024	2025	2026	2027
Dunia	3,5	3,5	3,0	3,4
Negara Maju	1,9	1,9	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,3	2,2
Kawasan Eropa	1,0	1,4	0,9	1,2
Jepang	-0,2	1,1	0,6	0,7
Negara Berkembang	4,5	4,4	3,8	4,5
Tiongkok	5,0	5,0	4,6	4,1
India	7,1	7,7	6,4	6,7
ASEAN-5	4,8	4,5	4,1	4,3
Amerika Latin	2,4	2,4	2,4	2,7

Sumber: WEO-IMF



pemulihan pascabencana, serta berlanjutnya investasi infrastruktur pemerintah dan swasta.

Darisi pengeluaran, peningkatan ekonomi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan PMTB. Konsumsi rumah tangga diperkirakan membaik didukung oleh kenaikan UMP, momentum HBKN, penyelenggaraan berbagai *event*, perbaikan pendapatan masyarakat berbasis komoditas, dan berlanjutnya pemulihan ekonomi pascabencana. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sejalan dengan pelaksanaan program prioritas serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu, PMTB tetap kuat ditopang investasi bangunan, pembangunan proyek pemerintah dan swasta, serta pemulihan infrastruktur. Meski demikian, melemahnya keyakinan konsumen, realisasi anggaran yang lebih lambat, dan tertahannya kinerja konstruksi menjadi faktor yang dapat menahan pertumbuhan.

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan ekonomi terutama didukung oleh perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, dan perbaikan pertanian. Perdagangan diperkirakan meningkat sejalan dengan perbaikan daya beli, aktivitas pemulihan, dan belanja pemerintah. Industri pengolahan tumbuh lebih tinggi didukung kebutuhan semen untuk rekonstruksi serta peningkatan kapasitas pengolahan CPO. Pertanian diperkirakan membaik seiring kinerja hortikultura, perkebunan, peternakan, dan jagung, meskipun produksi padi masih menghadapi dampak lanjutan kerusakan lahan. Transportasi dan pergudangan juga diperkirakan pulih dibandingkan 2025, tetapi pertumbuhannya tertahan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi serta risiko ketersediaannya.

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada kisaran 4,53 – 5,33 (yoy), terutama didorong oleh penguatan permintaan domestik seiring membaiknya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya kinerja belanja pemerintah utamanya untuk belanja infrastruktur PSN dan rehabilitasi bencana. Konsumsi rumah tangga

diperkirakan terus menguat didorong kenaikan UMP, penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah, masih kondusifnya harga komoditas, serta kembali pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat pascabencana. Belanja pemerintah juga diproyeksikan lebih tinggi, baik melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyesuaian remunerasi serta penambahan SDM, hingga akselerasi implementasi program prioritas pemerintah di daerah.

Kinerja investasi pada 2026 diperkirakan membaik, didukung pembangunan proyek strategis seperti Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I), PLTP Muara Laboh unit 2, serta pemulihan infrastruktur pertanian dan fasilitas umum yang terdampak bencana. Sementara itu, kinerja net ekspor diperkirakan akan tertekan akibat konflik geopolitik, meningkatnya kebutuhan domestik CPO untuk implementasi B50, serta perlambatan permintaan dari mitra dagang utama seperti India.

Percepatan pemulihan pascabencana juga diperkirakan menjadi katalis penting bagi sejumlah lapangan usaha, terutama sektor konstruksi yang menjadi motor utama melalui kebutuhan pemulihan infrastruktur sebesar Rp17,06 triliun. Aktivitas konstruksi yang lebih intensif ini akan memberikan efek rambatan yang kuat terhadap perdagangan, arus distribusi, serta mobilitas masyarakat. Peningkatan konektivitas dari proyek pemulihan turut mendukung kebangkitan sektor pariwisata, diperkuat penyelenggaraan tujuh *event* unggulan Sumatera Barat dalam kalender *Karisma Event Nusantara* (KEN), yang diperkirakan mendorong aktivitas transportasi, kuliner, dan ekonomi kreatif. Di tengah momentum positif tersebut, sektor pertanian masih menghadapi tantangan akibat bencana hidrometeorologi yang menekan produksi tanaman pangan dan kelapa sawit serta berdampak pada industri pengolahan, meskipun peluang perbaikan tetap terbuka melalui program makan bergizi gratis dan meningkatnya kebutuhan semen untuk rekonstruksi.

Secara keseluruhan, prospek perekonomian Sumatera Barat pada 2026 menunjukkan arah pemulihan yang kuat.



Meski demikian, perekonomian dihadapkan tantangan dan risiko ketidakpastian dampak peningkatan tensi geopolitik yang mendorong sikap *wait and see* sektor rumah tangga dan swasta serta peningkatan *risk appetite* sektor keuangan.

6.1.3.1. Komponen Pengeluaran

Konsumsi rumah tangga pada 2026 diperkirakan tumbuh meningkat didukung oleh kenaikan UMP Sumatera Barat sebesar 6,3%, dari Rp2,99 juta menjadi Rp3,18 juta, momentum HBKN, penyelenggaraan berbagai *event* nasional dan daerah, serta berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi pascabencana. Perbaikan harga komoditas pertanian dan perkebunan juga diperkirakan menopang pendapatan rumah tangga petani, sedangkan penyaluran program bantuan sosial dan program prioritas Pemerintah mendukung konsumsi kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Meski demikian, terdapat risiko konsumsi yang lebih rendah seiring dengan penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi dan kecenderungan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran. Ketidakpastian geopolitik global, kenaikan biaya energi dan transportasi, serta potensi tekanan harga turut menjadi faktor yang dapat menahan penguatan konsumsi.

Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat signifikan dibandingkan 2025, didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, implementasi program prioritas Pemerintah di daerah, pengembalian anggaran Transfer ke Daerah, serta peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan penyesuaian remunerasi.

PMTB atau investasi pada 2026 diperkirakan tumbuh kuat, terutama bersumber dari investasi bangunan untuk pemulihan pascabencana serta berlanjutnya proyek investasi pemerintah dan swasta. Proyek utama meliputi pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I), pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2, pemulihan

infrastruktur pertanian, dan rekonstruksi fasilitas umum yang terdampak bencana. Namun terdapat risiko tertahannya kinerja konstruksi akibat kenaikan harga energi serta perubahan jadwal beberapa proyek strategis dari rencana awal. Meski demikian, kebutuhan rehabilitasi infrastruktur yang besar, peningkatan belanja modal pemerintah, serta berlanjutnya investasi swasta diperkirakan menjaga pertumbuhan PMTB tetap tinggi.

Kinerja net ekspor pada 2026 diperkirakan tumbuh melambat, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan domestik komoditas CPO seiring dengan kebijakan B50, kenaikan impor barang modal dan bahan baku untuk pengerjaan proyek investasi dan kebutuhan produksi, serta peningkatan impor energi. Ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga komoditas energi juga berpotensi meningkatkan nilai impor yang turut menurunkan net ekspor. Permintaan CPO dari mitra dagang utama seperti India juga diperkirakan akan melambat sejalan dengan kondisi ekonomi dunia yang diperkirakan lebih lambat.

6.1.3.2. Komponen Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, peningkatan perekonomian Sumatera Barat pada 2026 diperkirakan ditopang oleh menguatnya aktivitas perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi, disertai perbaikan kinerja pertanian serta transportasi dan pergudangan. Berlanjutnya pemulihan pascabencana menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi melalui rehabilitasi infrastruktur, peningkatan investasi, dan perbaikan konektivitas. Perkembangan tersebut diperkirakan menciptakan efek rambatan terhadap permintaan bahan bangunan, aktivitas produksi industri, perdagangan barang, serta mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan berlanjutnya pemulihan aktivitas produksi pascabencana. Perbaikan terutama ditopang oleh kinerja hortikultura, perkebunan, peternakan, dan



produksi jagung. Prospek pertanian juga lebih baik didukung oleh proses pemulihan lahan yang berlangsung lebih cepat serta kinerja hortikultura yang lebih tinggi dari prakiraan awal. Perbaikan pendapatan masyarakat berbasis pertanian dan perkebunan selanjutnya diperkirakan turut menopang konsumsi rumah tangga dan aktivitas perdagangan, terutama di wilayah sentra produksi. Meski demikian, pemulihan subsektor tanaman pangan masih belum merata. Produksi padi masih menghadapi dampak lanjutan bencana hidrometeorologi karena sebagian lahan terdampak memerlukan waktu untuk kembali produktif. Selain itu, penertiban kawasan hutan berpotensi memengaruhi produktivitas sebagian perkebunan kelapa sawit.

Membaiknya kinerja pertanian dan tetap kuatnya permintaan domestik diperkirakan mendukung peningkatan aktivitas industri pengolahan. Industri makanan dan minuman memperoleh dukungan dari ketersediaan bahan baku pertanian, kebutuhan konsumsi masyarakat, serta pelaksanaan program prioritas Pemerintah. Pada saat yang sama, tingginya kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana diperkirakan meningkatkan permintaan terhadap produk industri yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi, terutama semen dan bahan bangunan. Kinerja industri pengolahan berbasis kelapa sawit juga diperkirakan membaik sejalan dengan mulai beroperasinya fasilitas pengolahan CPO baru dan tetap kuatnya permintaan domestik maupun global. Namun, kenaikan harga energi, tekanan biaya logistik, dan keterbatasan bahan baku pada beberapa komoditas tetap menjadi faktor yang dapat menahan peningkatan produksi dan margin pelaku usaha.

Penguatan aktivitas produksi, pemulihan pendapatan masyarakat, dan peningkatan belanja pemerintah selanjutnya diperkirakan mendorong kinerja lapangan usaha perdagangan. Kenaikan UMP serta membaiknya harga komoditas pertanian dan perkebunan diperkirakan menopang daya beli masyarakat. Aktivitas perdagangan juga diperkirakan memperoleh dukungan dari pelaksanaan program

prioritas Pemerintah, penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional dan daerah, serta meningkatnya transaksi ekonomi dan keuangan digital. Perbaikan konektivitas diperkirakan memperlancar perdagangan antardaerah dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Meski demikian, penurunan keyakinan konsumen serta kenaikan biaya transportasi dan distribusi dapat menahan penguatan perdagangan ritel.

Lapangan usaha konstruksi diperkirakan menjadi salah satu penopang utama pemulihan ekonomi Sumatera Barat. Aktivitas konstruksi didukung oleh pembangunan Flyover Panorama I atau Sitinjau Lauik I, pengembangan PLTP Muara Laboh Unit 2, serta rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana. Pembangunan kembali jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas umum, dan infrastruktur pertanian diperkirakan menjaga permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja konstruksi tetap tinggi. Penguatan konstruksi selanjutnya memberikan efek rambatan terhadap industri pengolahan, perdagangan, transportasi, serta berbagai jasa pendukung. Namun terdapat risiko terutama akibat kenaikan biaya energi serta realisasi proyek yang tidak sesuai rencana. Percepatan realisasi belanja modal dan pelaksanaan proyek pada sisa tahun akan menentukan besarnya dukungan konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan aktivitas konstruksi dan perdagangan, disertai perbaikan konektivitas, diperkirakan mendorong pemulihan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Perbaikan infrastruktur pascabencana dan operasionalisasi Jalan Tol Trans Sumatera ruas Padang-Sicincin diperkirakan meningkatkan kelancaran pergerakan orang dan distribusi barang. Penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional dan daerah juga memberikan tambahan permintaan terhadap jasa angkutan dan pergudangan. Peningkatan aksesibilitas menuju destinasi wisata selanjutnya berpotensi mendukung perjalanan wisatawan serta memberikan efek rambatan terhadap akomodasi, makanan dan minuman, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Kenaikan harga BBM bersubsidi berpotensi



meningkatkan biaya operasional angkutan dan distribusi, sehingga menahan kecepatan pemulihan mobilitas penumpang maupun angkutan barang.

Secara keseluruhan, prospek lapangan usaha utama Sumatera Barat pada 2026 menunjukkan arah perbaikan yang semakin luas dan saling terkait.

Pemulihan pertanian diperkirakan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat pasokan bahan baku industri. Peningkatan industri pengolahan dan pembangunan infrastruktur selanjutnya mendorong perdagangan, kebutuhan jasa angkutan, dan aktivitas distribusi. Sementara itu, perbaikan konektivitas diperkirakan memperluas akses pasar, mendukung mobilitas masyarakat, dan memperkuat aktivitas pariwisata. Meski demikian, kecepatan pemulihan tetap dipengaruhi oleh realisasi anggaran dan proyek, ketersediaan energi, perkembangan biaya logistik, kecepatan pemulihan lahan pertanian, serta risiko cuaca dan bencana.

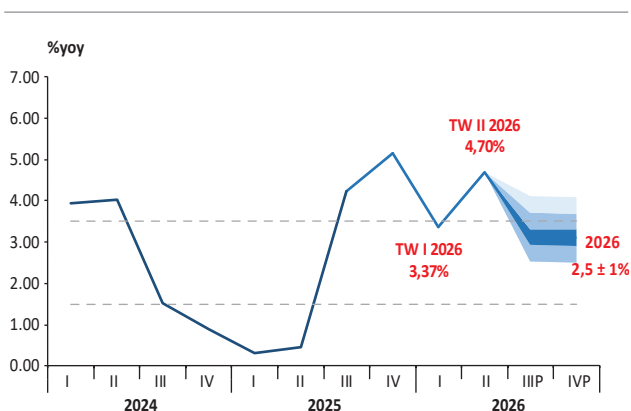
6.2. PRAKIRAAN INFLASI TAHUN 2026

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan secara bertahap menurun dan kembali berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (Grafik 7.1), meskipun pada semester I 2026 sempat mengalami peningkatan tekanan harga. Secara tahunan, inflasi Sumatera Barat meningkat dari

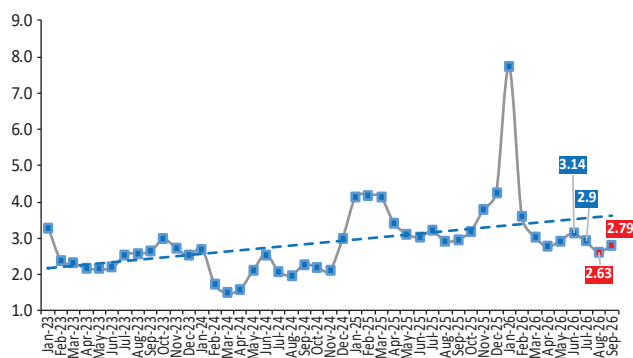
3,37% (yoy) pada akhir Triwulan I 2026 menjadi 4,70% (yoy) pada Triwulan II 2026, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai merah, beras, bensin, minyak goreng, dan emas perhiasan. Namun demikian, memasuki awal Triwulan III 2026 tekanan inflasi mulai menunjukkan tren perlambatan dengan inflasi Juli 2026 tercatat sebesar 4,12% (yoy). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi yang terjadi pada Triwulan II 2026 cenderung bersifat sementara dan diperkirakan akan mereda secara bertahap pada semester II 2026 seiring membaiknya pasokan pangan, berlanjutnya masa panen di berbagai sentra produksi, serta efektivitas berbagai program pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Dari sisi eksternal, tekanan inflasi global diperkirakan tetap melandai meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan inflasi global berada pada kisaran 3,8% – 4,4% pada tahun 2026, dipengaruhi oleh berlanjutnya proses melandainya inflasi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, serta meningkatnya risiko geopolitik dan ketidakpastian pasar energi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa proses normalisasi inflasi global belum sepenuhnya berlangsung secara linear dan masih rentan terhadap berbagai gangguan eksternal yang berpotensi memengaruhi harga komoditas internasional maupun arus perdagangan global.

Perkembangan tersebut tercermin pada proyeksi harga komoditas energi dunia yang masih menunjukkan dinamika yang cukup tinggi. Harga gas alam dunia diperkirakan berada pada kisaran USD2,63 – 2,79 per mmbtu pada semester II 2026 (Grafik 7.2), sementara harga minyak mentah dunia diproyeksikan berada pada kisaran USD76,7 – 82,6 per barel (Grafik 7.3). Meskipun level tersebut relatif lebih rendah dibandingkan puncak harga energi global yang terjadi pada periode sebelumnya, risiko kenaikan harga masih perlu dicermati apabila terjadi gangguan pasokan energi global, perubahan kebijakan produksi negara-negara produsen utama, maupun eskalasi konflik geopolitik. Dengan

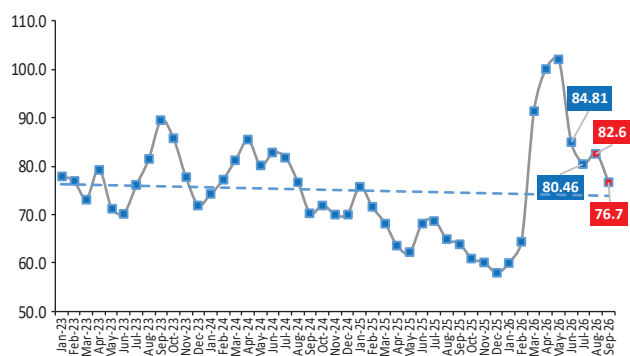


Grafik 6.1 Proyeksi Inflasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026



Sumber : Financial Forecast Center

Grafik 6.2 Proyeksi Harga Gas Alam Dunia (USD/mmbtu)

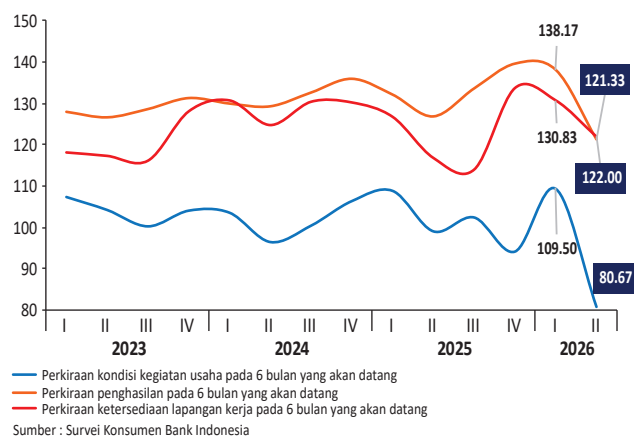


Sumber : Financial Forecast Center

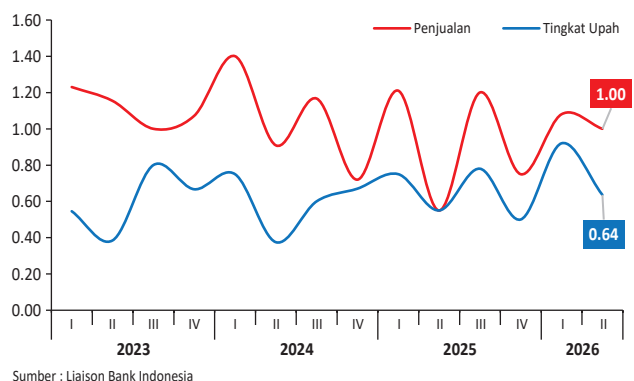
Grafik 6.3 Proyeksi Harga Minyak Mentah Dunia (USD/barrel)

demikian, perkembangan harga energi dunia masih berpotensi memengaruhi tekanan inflasi domestik melalui peningkatan biaya energi, biaya produksi, dan biaya distribusi pada berbagai sektor perekonomian.

Tekanan inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026 diperkirakan berasal dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, aktivitas konsumsi masyarakat diperkirakan tetap terjaga didukung oleh berlanjutnya aktivitas ekonomi daerah, meskipun optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan menunjukkan kecenderungan lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya. Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja ke depan masih berada pada zona



Grafik 6.4 Prakiraan Kondisi Ekonomi 6 Bulan ke Depan



Sumber : Liaison Bank Indonesia

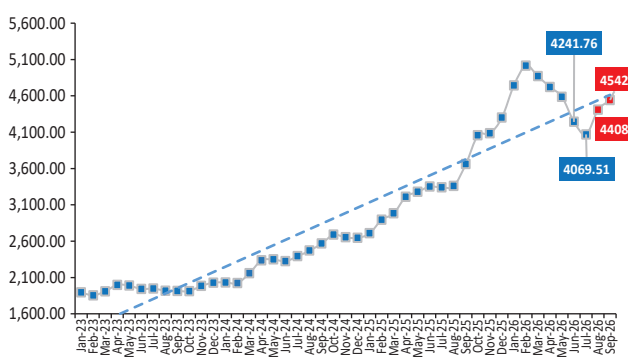
Grafik 6.5 Prakiraan Tingkat Upah dan Harga Jual 1 Tahun ke Depan

optimistis, masing-masing sebesar 121,33 dan 122,00, sementara ekspektasi terhadap kegiatan usaha menurun menjadi 80,67 (Grafik 7.4). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat masih memiliki keyakinan terhadap prospek pendapatan dan kesempatan kerja, pelaku ekonomi cenderung lebih berhati-hati dalam memandang prospek kegiatan usaha ke depan. Dari sisi dunia usaha, tekanan biaya diperkirakan masih relatif terkendali, tercermin dari prakiraan kenaikan harga jual sebesar 1,00 yang masih sejalan dengan prakiraan kenaikan tingkat upah sebesar 0,64 (Grafik 7.5). Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa permintaan domestik diperkirakan tetap terjaga, namun dengan tingkat optimisme yang lebih moderat dibandingkan periode sebelumnya.



Dari sisi penawaran, penurunan produksi komoditas hortikultura akibat faktor cuaca masih menjadi salah satu sumber risiko inflasi ke depan. Risiko peningkatan harga pangan terutama berasal dari potensi gangguan produksi cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan beras akibat curah hujan tinggi, serangan hama, maupun cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian. Selain itu, peningkatan permintaan komoditas pangan dari luar daerah juga berpotensi mengurangi pasokan domestik dan meningkatkan volatilitas harga apabila tidak diimbangi dengan kelancaran distribusi antarwilayah.

Ketidakpastian kondisi energi global juga masih perlu dicermati mengingat harga minyak mentah dunia pada semester II 2026 masih diperkirakan berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata historisnya. Perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan risiko *imported inflation* melalui kenaikan biaya energi, biaya produksi, dan biaya distribusi. Di sisi lain, harga gas alam dunia diprakirakan relatif stabil, sementara koreksi harga emas global berpotensi menahan tekanan inflasi yang berasal dari komoditas emas perhiasan domestik. Dengan demikian, perkembangan harga energi, nilai tukar, serta dinamika pasokan pangan diperkirakan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi arah inflasi Sumatera Barat pada semester II 2026.



Sumber : Financial Forecast Center

Grafik 6.6 Proyeksi Harga Emas Dunia (USD/oz-t)

Dalam merespons berbagai risiko inflasi ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat upaya pengendalian agar inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran melalui optimalisasi kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) serta penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian berbasis *good agricultural practices* (GAP), pengembangan Sekolah Lapang DAUN, penyaluran sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani, serta penguatan hilirisasi dan kemitraan dengan offtaker guna menjaga keberlanjutan pasokan pangan strategis. Selain itu, implementasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik intra maupun antar provinsi terus diperkuat untuk menjaga kecukupan pasokan, memperlancar distribusi, dan mengurangi disparitas harga antarwilayah.

Di sisi hilir, TPID Provinsi Sumatera Barat terus mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan fasilitasi distribusi pangan untuk menjaga keterjangkauan harga komoditas strategis. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM), rapat koordinasi, *focus group discussion*, dan berbagai kegiatan capacity building bagi TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu, pemanfaatan aplikasi KIAM Sumbar sebagai sarana pemantauan harga, ketersediaan pasokan, distribusi pangan, serta *early warning system* terus ditingkatkan guna mendukung respons kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat juga dilakukan melalui diseminasi informasi, edukasi publik, dan kampanye diversifikasi konsumsi pangan. Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas harga, menjaga ketahanan pangan daerah, serta mendukung pencapaian sasaran inflasi Sumatera Barat pada tahun 2026.



Daftar Istilah

Istilah	Penjelasan
BI-Rate	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
BI-RTGS	Sistem Bank Indonesia <i>Real Time Gross Settlement</i> (BI RTGS) adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (<i>real time</i>) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diterima perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.
<i>Financing-to-Deposit Ratio</i> (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (<i>purchasing cost</i>) dari sekelompok tetap barang dan jasa (<i>fixed basket</i>) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, merupakan rata-rata sederhana dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini dan Indeks Ekspektasi Konsumen.
Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini	Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini mencakup keyakinan konsumen mengenai penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, ketepatan waktu saat ini untuk melakukan pembelian barang tahan lama dan jumlah ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu.
Inflasi	Persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.



Istilah	Penjelasan
Kredit menurut Bank Pelapor/Kantor Cabang	Jumlah kredit yang disalurkan oleh kantor cabang bank yang memberikan persetujuan serta menyalurkan kredit.
Kredit menurut Lokasi Proyek	Jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan berdasarkan lokasi proyek yang dibiayai kredit tersebut.
Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Pada Bank Umum, kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Sedangkan pada BPR kredit digolongkan menjadi 4 kualitas, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
Loan-to-Deposit Ratio (LDR)	Rasio antara jumlah kredit yang disalurkan terhadap dana yang diterima (giro, tabungan dan deposito).
mtm	Persentase perubahan bulanan (<i>month-to-month</i>)
Non-Performing Loan (NPL)	Kredit yang termasuk dalam kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, merupakan rasio kredit yang tergolong NPLs terhadap total kredit. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs <i>gross</i> . Semakin rendah rasio NPLs, semakin baik kondisi bank yang bersangkutan.
Non-Performing Financing (NPF)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu daerah.
qtq	Persentase perubahan secara triwulanan (<i>quarter to quarter/q-t-q</i>) dari triwulan ke-n dihitung dengan metode <i>point-to-point</i> dengan dasar triwulan sebelumnya.
yoy	Persentase perubahan secara tahunan (<i>year on year/y-o-y</i>) bulan/triwulan ke-n dihitung dengan metode <i>point-to-point</i> dengan dasar bulan/triwulan yang sama dengan tahun sebelumnya (t-1).
ytd	Persentase perubahan menurut tahun kalender bulan ke-n dihitung dengan metode <i>point-to-point</i> dengan dasar bulan Desember tahun sebelumnya (t-1) (<i>year to date change/y-t-d</i>).



Penanggung Jawab

Mohamad Abdul Majid Ikram

Koordinator Penyusun

Andy Setyo Biwado

Editor

Rif'at Pasha

Tim Penulis

Ghifari Fathul Khoir

Larassayu Arvaneira Evanthe

Daffa Danendra

Satrio Budiarto

Hilmi Septabiyya

Lizarti





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Jend. Sudirman No.22, Jati Baru, Kec. Padang
Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129



(0751) 31700



www.bi.go.id